

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA
TIDAK TERTINGGAL**

(Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**ULLY HIKMAH ANDINI
0810310373**

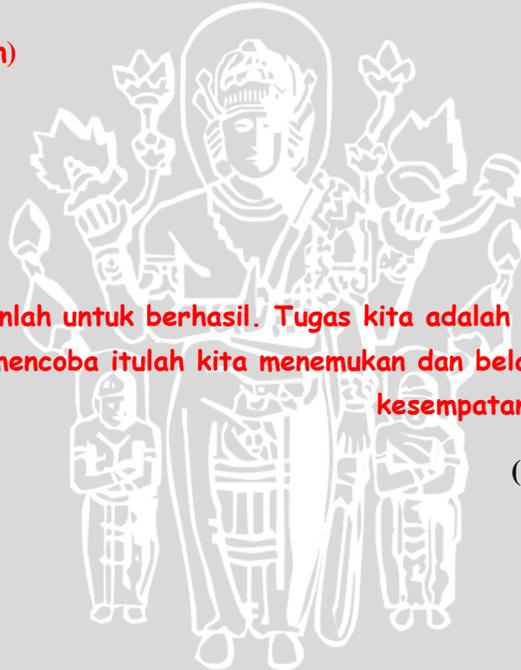


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

**Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat.
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan.**

(Thomas A. Edison)



**Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil**

(Mario Teguh)



TANDA PENGESAHAN

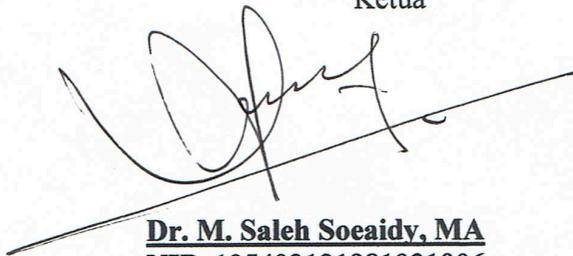
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 November 2014
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Uly Hikmah Andini
Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)**

dan dinyatakan LULUS

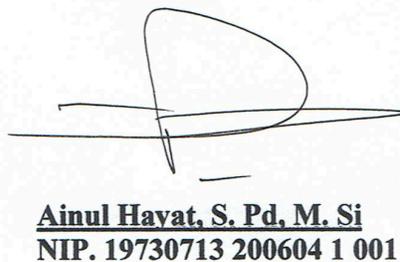
MAJELIS PENGUJI

Ketua



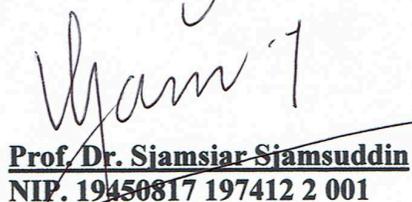
Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 195402121981031006

Anggota



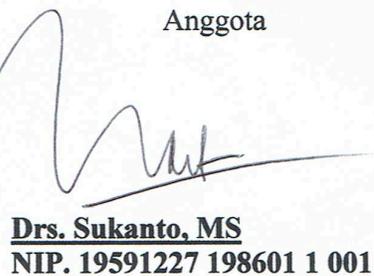
Ainul Hayat, S. Pd, M. Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Oktober 2014



Uly Hikmah Andini
0810310373

RINGKASAN

Ully Hikmah Andini, 2014, **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Ainul Hayat, S. Pd, M. Si, 211 halaman + xvi

Pembangunan nasional merupakan salah satu perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh suatu negara. Salah satu bidang dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Desa dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam kenyataannya, kondisi desa masih banyak yang tertinggal. Untuk pembangunan ekonomi ini, maka perlu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu desa tertinggal yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah Desa Muktiharjo yang terletak di Kecamatan Margorejo. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim, akses transportasi yang masih sulit serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, membuat Desa Muktiharjo tidak bisa berkembang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif menurut Miles dan Humberman. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui potensi ekonomi apa saja yang ada di Desa Muktiharjo dalam rangka pemberdayaan ekonomi diperlukan penelitian yang rinci. Selanjutnya diperoleh gambaran secara umum yang dapat dijadikan bahan untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan desa menuju desa tidak tertinggal.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari segi pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah kabupaten sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. Pemerintah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa. Dan pemerintah desa dengan upaya meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam melimpah dari sektor pertanian dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pemerintah desa sebagai aktor kunci pembangunan harus bisa memfasilitasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, kabupaten dan kecamatan.

Keywords: Pembangunan Nasional, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Desa Tertinggal

SUMMARY

Ully Hikmah Andini, 2014, **Economic Development from Underdeveloped Village to Developed Village (Study in Muktiharjo Village Margorejo Subdistrict, Pati Regency)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Ainul Hayat, S. Pd, M. Si, 211 pages + xvi

National development is a long term planning that do in a country. One of field in national development is economic development. Village can become a modal to improve economic development. But, in fact, many villages are in underdeveloped. To develop the potential economy in village, so need a way through economic empowerment. One of village in Pati Regency is Muktiharjo village. Education and health facilities is limited, less of transportation and condition of economy still low, make the Muktiharjo village become underdeveloped.

The research was a qualitative descriptive study using the technique of interactive analysis by Miles and Hunberman. This is used to determine the economy potential in the Muktiharjo Village to implement the economic empowerment. Subsequently obtained a general picture that can be used as material to create the efforts of government to develop the village become developed village.

The conclusion of this study indicated that economy potential that exist in Muktiharjo village can seen from agriculture sector, fishery sector, tourism sector and micro and small enterprises sector. Economic empowerment that is done can be seen from the efforts of regency government as a planner, facilitator, supervisor and evaluator. Subdistrict government as a facilitator between regency government and village government. And village government with the efforts like become the society as a subject and object the development, increase the participation of society and give the empowerment through training and education, build the cooperation and build the public facilities that needed by society. The supporting factors in this research are the existing of great natural in agriculture sector and great human resources, globalization and development of technology that effect the agricultural sector, fishery sector, tourism sector and micro and small enterprises sector. The obctacling factors are low of modal, public facilities and participation of society. The suggestions of this research that the society must more active to participate in the development process. Beside that, village government as tha main actor must facilitate the society in development process that supported by the central and local government.

Keywords: National Development, Economic Empowerment, Underdeveloped Village

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA TIDAK TERTINGGAL (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi merupakan aktivitas yang memerlukan keseriusan, kerajinan serta ketelitian agar dapat menghasilkan laporan yang relevan dengan ilmu pengetahuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak sangat berpengaruh bagi terselesaikannya laporan ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, selaku ketua pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ainul Hayat, S. Pd, M. Si, selaku anggota pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, mengarahkan serta bersikap sangat sabar kepada penulis sehingga selesai skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Sutiknyo, ibunda Maryana, adikku Soraya Amalia Haqun dan suamiku tercinta Christian Ari Wibowo yang tak henti-hentinya memberikan semangat, memberikan bantuan baik moril maupun materil serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tamsir dan Daryanto selaku bagian perencanaan pembangunan desa beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh masyarakat Muktiharjo yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2008 yang telah memberikan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga apa yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kontribusi Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Konsep Pembangunan Nasional	15
2.1.1 Hakekat dan Makna Pembangunan Nasional	15
2.1.2 Pengertian Pembangunan Nasional	17
2.2 Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal	19
2.2.1 Konsep Desa	19
a. Pengertian Desa	19
b. Karakteristik Desa	20
2.2.2 Konsep Pembangunan Desa Tertinggal	21
a. Pembangunan Desa Tertinggal	21
b. Desa Tertinggal	25
c. Strategi Pembangunan Desa Tertinggal	31
d. Sistem dan Mekanisme Pembangunan Desa Tertinggal	33
2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
2.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	34
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	34
b. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	39
c. Proses Pemberdayaan Masyarakat	40
d. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	46
2.3.2 Ekonomi Rakyat	51
2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	55

2.3.4	Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	58
2.4	Globalisasi	62
2.4.1	Pengertian Globalisasi	62
2.4.2	Teori Globalisasi	63
2.4.3	Dampak Globalisasi	64
BAB III	METODE PENELITIAN	67
3.1	Jenis Penelitian	67
3.2	Fokus Penelitian	68
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian	70
3.4	Jenis dan Sumber Data	71
3.4.1	Jenis Data	71
3.4.2	Sumber Data	72
3.5	Instrumen Penelitian	73
3.6	Metode Pengambilan Data	74
3.7	Teknik Analisa Data	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
4.1.1	Kabupaten Pati	78
a.	Kondisi Geografis	78
b.	Potensi Sumber Daya Alam	79
c.	Kondisi Demografi	81
4.1.2	Desa Muktiharjo	82
a.	Kondisi Geografis	83
b.	Kondisi Demografis	83
4.2	Penyajian Data Fokus.....	95
4.2.1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo dari Desa Tertinggal Menuju Tidak Tertinggal.....	95
a.	Potensi Ekonomi yang Dimiliki Desa Muktiharjo	96
1)	Pertanian/Perkebunan	96
2)	Perikanan	101
3)	Pariwisata	104
4)	Usaha Kecil dan Menengah	106
b.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal di Desa Muktiharjo	111
1)	Pemerintah Kabupaten.....	111
2)	Pemerintah Kecamatan	116
3)	Pemerintah Desa	118
4.2.2	Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo Menuju Desa Tidak Tertinggal	141
a.	Faktor Pendukung	142

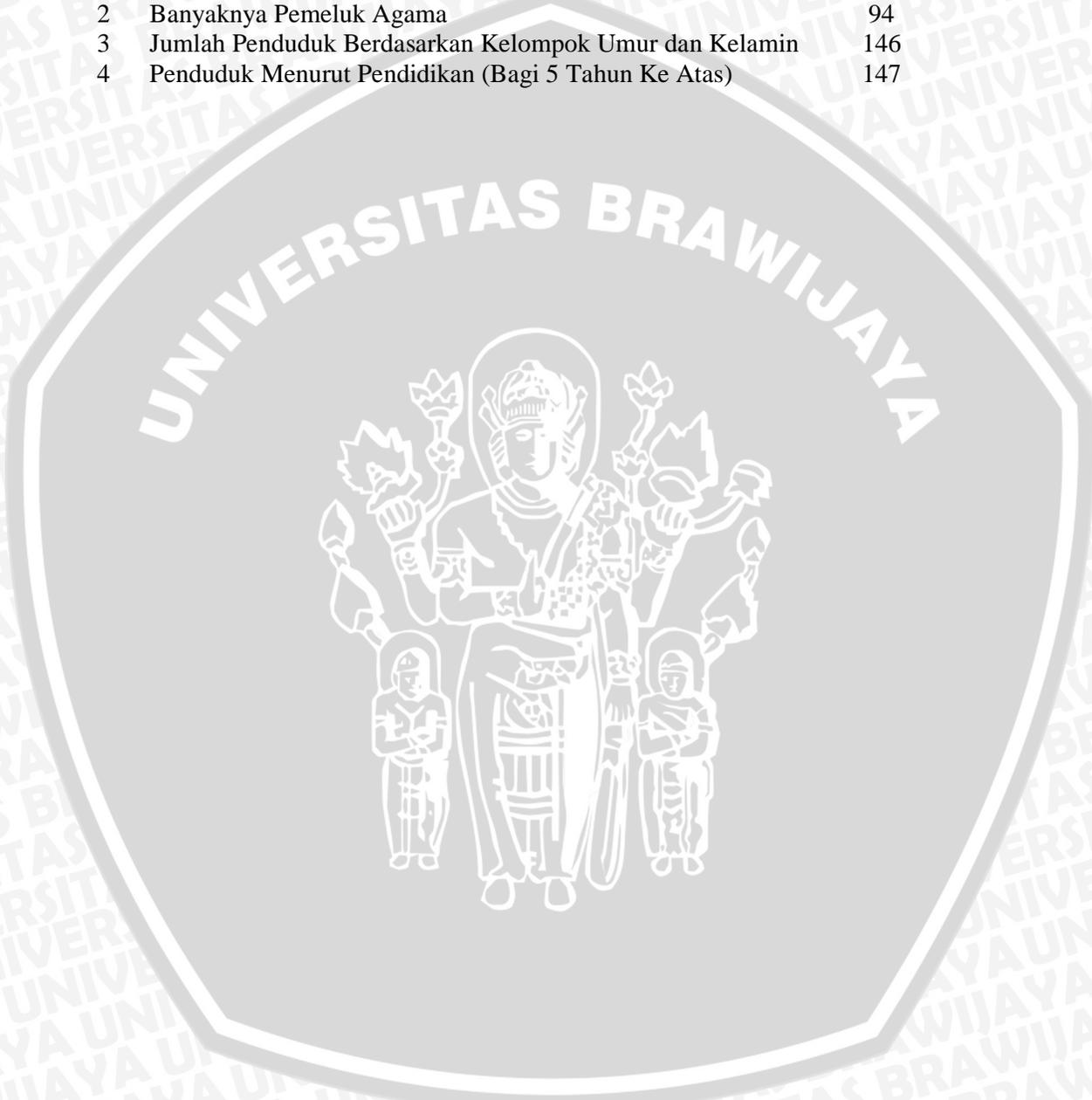
1) Sumber Daya Alam yang Melimpah	142
2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Banyak	144
3) Globalisasi	148
4) Kemajuan Teknologi	150
b. Faktor Penghambat	152
1) Keterbatasan Modal	152
2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kegiatan Ekonomi	154
3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat	157
4.3 Pembahasan	159
4.3.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal.....	159
a. Potensi Ekonomi yang Dimiliki Desa Muktiharjo	159
1) Pertanian/Perkebunan	161
2) Perikanan	163
3) Pariwisata	163
4) Usaha Kecil dan Menengah	164
b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal di Desa Muktiharjo	169
1) Pemerintah Kabupaten.....	169
2) Kecamatan	172
3) Pemerintah Desa	174
4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo Menuju Desa Tidak Tertinggal	186
a. Faktor Pendukung	186
1) Sumber Daya Alam yang Melimpah	186
2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Banyak	187
3) Globalisasi	190
4) Kemajuan Teknologi	193
b. Faktor Penghambat	196
1) Keterbatasan Modal	196
2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kegiatan Ekonomi	198
3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat	201
BAB V PENUTUP	203
5.1 Kesimpulan	203
5.2 Saran	210
DAFTAR PUSTAKA	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Model Analisis Interaktif	75
2	Letak Desa Muktiharjo	82
3	Salah Satu TK yang Ada di Desa Muktiharjo	87
4	Salah Satu TPQ yang Ada di Desa Muktiharjo	95
5	Salah Satu Aktivitas Petani di Desa Muktiharjo	98
6	Salah satu kolam ikan milik warga Desa Muktiharjo	103
7	Gapura Majapahit di Desa Muktiharjo	105
8	Usaha kripik singkong yang ada di Desa Muktiharjo	108
9	Usaha Jahit Pakaian di Desa Muktiharjo	109
10	Usaha bengkel di Desa Muktiharjo	110
11	Diagram upaya pemerintah Kabupaten pati dalam pembangunan desa tertinggal di Desa Muktiharjo	115
12	Upaya Kecamatan dalam Pembangunan Desa	117
13	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Konsep Pembangunan dari Bawah	123
14	Partisipasi Masyarakat di Desa Muktiharjo	128
15	Dam Air di Desa Muktiharjo	139
16	Saluran Irigasi di Sawah	139
17	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Muktiharjo	140
18	Kondisi Jalan yang Ada di Desa Muktiharjo	156
19	Sinergi antara Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan	171
20	Aktor dalam Upaya Pembangunan Desa	183

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Perbandingan Daerah Tertinggal dan Daerah Tidak Tertinggal	4
2	Banyaknya Pemeluk Agama	94
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Kelamin	146
4	Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi 5 Tahun Ke Atas)	147



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Lembar Selesai Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu negara agar dapat mempertahankan kehidupannya, selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti: pembangunan ekonomi, sosial dan budaya maupun politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan adanya arus globalisasi, sehingga memudahkan batas antar negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu negara belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa sistem pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara akan berbeda dengan negara lain. Di Indonesia, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil, apabila secara statistik terjadi peningkatan pertumbuhan angka ekonomi. Hal ini seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia

maju pesat, mulai dari pendapatan perkapita, pertanian dan pembangunan infrastruktur. Harapan dari pemerintah bahwa pembangunan ekonomi seperti ini bisa mempengaruhi bidang-bidang pembangunan lainnya. Tetapi kenyataannya, setiap pembangunan yang dilakukan selalu memberikan pertanyaan apakah hasil pembangunan yang dilakukan sudah merata dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata dan berkesinambungan.

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau dan terdiri dari banyak desa. Bahkan Indonesia merupakan wilayah yang dibangun dan bergantung dari desa. Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dana/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam yang besar. Dari sumber daya alam tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumber daya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem ekonomi rakyat yang terbukti bisa menopang perekonomian nasional bahkan pada saat krisis.

Menurut Mubyarto (2005:13), mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai “kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional”. Dan sebagian besar penopang ekonomi rakyat ini berada di desa. Sehingga desa dapat dijadikan modal dan sebagai langkah awal bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.

Komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi desa ini, di tandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU tersebut, desa merupakan wilayah otonom yang dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan munculnya UU ini, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pembangunan desanya khususnya pembangunan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaan UU ini, kondisi desa masih identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Hal ini ditandai dengan masih minimnya akses kebutuhan dasar yang membuat orang-orang tak berdaya mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya. Data mengenai kondisi desa di Indonesia, adalah sebagai berikut:

“Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) merilis bahwa, hingga bulan November 2011 ini jumlah daerah tertinggal tercatat 183 kabupaten dan 70 persen atau 128 di antaranya berada di kawasan timur Indonesia. Daerah tertinggal tersebut pada umumnya adalah daerah-daerah terpencil di Indonesia timur dengan geografis berada di kepulauan, perbatasan dan lokasinya terpencil. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menargetkan sebanyak 50 daerah tertinggal yang tersebar di 183 kabupaten dapat

dituntaskan melalui percepatan pembangunan sampai 2014. Dari data 183 Kabupaten tertinggal tersebut, jumlah desa yang tertinggal sebanyak 26.746 desa atau 35,47% dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia” (Mawardi, 2011).

Dari data mengenai kondisi desa di atas, mengindikasikan bahwa kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal.

Desa tertinggal, adalah kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal), sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan) (Adisasmita: 2006:10).

Desa tertinggal identik dengan kondisi desa yang miskin dan terbelakang. Berdasarkan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal beberapa kriteria untuk menentukan daerah tertinggal atau tidak tertinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Daerah Tertinggal dan Daerah Tidak Tertinggal

No	Indikator	Daerah Tertinggal	Daerah Tidak Tertinggal
1	Perekonomian masyarakat, dilihat dari: a. Prosentase keluarga miskin, b. Pengeluaran konsumsi per kapita,	Kekurangan dan belum bisa memanfaatkan dan menggunakan potensi fisik maupun non fisik sendiri serta mata pencaharian yang homogen	Bisa memanfaatkan potensi fisik maupun non fisik secara maksimal serta mata pencaharian yang beragam
2	Sumber daya manusia, dilihat dari: a. Indeks Pembangunan Manusia, b. Angka Harapan Hidup, c. Rata-rata Lama Sekolah, d. Angka Melek Huruf,	Sumber daya manusia yang rendah dari segi pendidikan,	Sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan potensi fisik

		kesehatan serta banyaknya pengangguran	maupun non fisik secara maksimal
3	Sarana dan prasarana, dilihat dari: a. Transportasi, b. Energi, c. Kesehatan, d. Pendidikan, e. Telekomunikasi, f. Sarana dan prasarana perekonomian.	Tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat	Cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat
4	Kemampuan keuangan daerah, dilihat dari tingkat celah fiskal.	Belum bisa mengelola sumber-sumber keuangan daerah	Bisa mengelola dan mencari sumber-sumber keuangan yang ada
5	Aksesibilitas, dilihat dari: a. Akses kantor desa, kelurahan atau sebutan lain ke kantor kabupaten/kota, b. Akses ke pelayanan kesehatan, c. Akses ke pelayanan pendidikan dasar.	Tidak dapat mengakses pelayanan kebutuhan dasar dengan mudah	Bisa mengakses pelayanan kebutuhan dasar dengan mudah dan cepat
6	Karakteristik daerah, dilihat dari: a. Di perbatasan antar negara, b. Gugusan pulau-pulau kecil, c. Rawan bencana, d. Rawan konflik.	Berada di wilayah terpencil jauh dari kota	Berada di wilayah yang dekat dengan kota atau daerah yang sudah modern

Sumber: RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dengan kondisi desa yang seperti tertinggal, desa yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi, menjadi terhambat. Salah satu cara untuk meningkatkan atau menggali potensi ekonomi desa agar tidak tertinggal, adalah dengan melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu

dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Adisasmita, 2006:4).

Dengan adanya pembangunan desa, peningkatan ekonomi penduduk desa khususnya di desa tertinggal akan dapat dilakukan sehingga menjadi desa yang tidak tertinggal. Kondisi seperti ini memunculkan sebuah cara atau metode baru dalam hal membangun ekonomi desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Secara konseptual, ketertinggalan desa disebabkan oleh model pembangunan yang belum tepat. Pola pembangunan dari atas ke bawah (*top down*) yang difokuskan ke wilayah kota memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, kemajuan pembangunan yang ada di kota harus dibayar mahal dengan terjadinya ketertinggalan di wilayah lain, yaitu wilayah desa. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma baru dalam pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat. Menurut Merriam Webster (dalam Prijono, 1996:56), pemberdayaan dapat diartikan sebagai “memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain”. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang menekankan aspirasi dari bawah. Sehingga pembangunan yang dilakukan didasarkan pada apa yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia yaitu ekonomi rakyat. Agar sistem ekonomi rakyat ini bisa berjalan dengan baik, maka aspirasi masyarakat harus ditampung dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Pemberdayaan masyarakat, adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di desa, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Selain itu, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin

tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi desanya adalah Kabupaten Pati. “Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak di 644°56,80” LS 11102°06,96” BT dengan luas wilayah keseluruhan 1.419,07 km yang terbagi menjadi 21 Kecamatan dan 405 Desa” (Priyops, 2009). Di Kabupaten Pati, terdapat desa yang masih berada dalam tingkatan desa tertinggal, yaitu desa Muktiharjo. Desa Muktiharjo, adalah desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Pati, di lereng Gunung Muria, yang terdiri dari 6 dusun dan 38 RT, serta berada di Kecamatan Margorejo. Jumlah penduduk di Desa Muktiharjo berjumlah 10.157 jiwa, dengan pembagian 4.698 jiwa laki-laki dan 5.459 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga yaitu 2.645 KK. Sedangkan prasarana ekonomi yang tersedia, hanya warung, koperasi dan industri kecil atau rumahan. Akses jalan yang ada di desa ini meliputi jalan desa dan kabupaten. Jalan desa dan kabupaten dengan panjang 20 km, yang sebagian sudah beraspal dan sebagian jalan tanah.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Desa Muktiharjo termasuk katagori desa tertinggal dan membutuhkan metode dan strategi baru dan khusus yang mampu mengatasi permasalahan desa agar tidak tertinggal, dan salah satunya adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu bagian dari pembangunan desa tertinggal. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, menurut Goulet (dalam Suryana, 2006:6) pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan.

Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo dalam rangka pembangunan desanya agar tidak tertinggal telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa yang berupa pemanfaatan sumberdaya alam serta potensi ekonomi lainnya yang dimiliki oleh desa dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan, kursus-kursus atau pelatihan mengenai pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata, UKM, didirikan koperasi simpan pinjam untuk memberi bantuan modal kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan sarana umum lainnya.

Dengan data dan konsep mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal di atas, mengindikasikan pula bahwa untuk membangun desa tertinggal harus dimulai dari perubahan paradigma pembangunan. Desa jangan diidentikkan suatu entitas yang senantiasa tertinggal dalam segala hal. Persepsi desa tertinggal, harus diubah menjadi desa yang memiliki segenap potensi, masyarakat yang punya semangat kemajuan. Selain itu, pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dimana hal itu dapat dicapai melalui penggalian potensi masyarakat agar dapat hidup secara mandiri. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi setiap desa juga membutuhkan strategi yang berbeda pula karena karakteristik desa yang berbeda. Namun, pada intinya setiap pelaku pembangunan harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latarbelakang, kemampuan atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggungjawab dan tenggangrasa untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Muktiharjo untuk mewujudkan desa yang tidak tertinggal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo menuju desa tidak tertinggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo menuju desa tidak tertinggal.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara akademis maupun praktis terhadap upaya pembangunan desa tertinggal yang ada. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Dapat menambah wawasan baru dalam berpikir, analisis dan membandingkan keadaan nyata di lapangan dengan teori-teori yang

ada dan yang telah dipelajari pada perkuliahan.

- 2) Sebagai referensi penelitian ilmiah selanjutnya dengan pengambilan tema dan judul yang sama.
- 3) Memberikan informasi bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam teori serta praktis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan gambaran bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa.
- 2) Memberikan gambaran bagaimana pembangunan desa ini penting dalam rangka pembangunan ekonomi secara nasional.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- 2) Memberikan gambaran kepada masyarakat akan dampak dari pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ini.
- 3) Menunjukkan bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan desa tertinggal di Indonesia khususnya di Desa Muktiharjo.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal (studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati), perumusan masalah yang terdiri dari pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal, analisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju desa tidak tertinggal, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pembangunan nasional, desa dan pembangunan desa tertinggal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab 3 Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian termasuk di dalamnya jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data melalui interview/wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan dan alat pendokumentasian. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Hunberman.

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Menjelaskan tentang pengkajian data yang menguraikan tentang gambaran umum Desa Muktiharjo, data fokus penelitian dan analisis data serta interpretasinya.

Bab 5 Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Nasional

2.1.1 Hakekat dan Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan pokok pikiran ini, maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila.

Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab kepada seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antar manusia dengan tuhan, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku

utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2.1.2 Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Siagian (2003:4) mendefinisikan pembangunan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Hal senada disampaikan oleh Tjokrowinito (dalam Suryono, 2006:21) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transcendental*, sebagai *metadisciplinery phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific*, dan *time specific*.

Di dalam pelaksanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pembangunan yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

(Siagian, 2003:3-4)

- a. Proses, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus.
- b. Sadar, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.
- c. Berencana, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Modernitas, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
- e. Multidimensional, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- f. *Nation building*, bahwa kesemua hal tersebut di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Bryant and White (dalam Tjokrowinoto, 1999:47), ada lima implikasi utama dari pembangunan:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemelorotan nilai dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara yang lain yang menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

2.2 Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal

2.2.1 Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Desa dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian agraris. Dalam Bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung. Desa dalam arti lain adalah “bentuk kesatuan administrasi yang disebut juga kelurahan dan lurah adalah kepala desa” (Daldjoeni, 1987:44). Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Bintarto (dalam Wasistiono, 2006:8) memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan “desa sebagai suatu hasil dari

perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya”. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Memang ada definisi yang titik beratnya dari desa sebagai pemukiman, yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Dalam definisi tersebut tersirat adanya tiga unsur desa yaitu penduduk, tanah dan bangunan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah:

1. Desa merupakan suatu wilayah di luar perkotaan yang didiami oleh sekumpulan orang sejak beberapa waktu lampau.
2. Desa mempunyai kebiasaan tertentu yang disebut adat istiadat.
3. Mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.
4. Masyarakat desa sebagian besar menggunakan tanah sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Karakteristik Desa

Menurut Paul H. Landis (dalam Mubyarto dkk, 1994:15)

ciri-ciri desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum.
- 4) Dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Sedangkan menurut Daldjoeni (1987:50-51), ciri-ciri kehidupan masyarakat desa, dapat diuraikan pokok-pokoknya sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakatnya, erat sekali hubungannya dengan alam. Terutama iklimlah yang pengaruhnya nampak pada permusimannya, seakan akan mengatur kegiatan manusia dalam bertani.
- b. Penduduk di desa, merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Jumlah mereka relatif tidaklah besar dan struktur ekonomi pada umumnya agraris. Bahkan kini lambat laun karena pengaruh kota atau pendidikan formal keadaan mulai agak menyimpang. Dalam hal itu, dapat pula dikatakan desa mengalami proses urbanisasi dalam arti mengkota, memperlihatkan ciri-ciri kekotaan baik secara fisik, ekonomi maupun budaya.
- c. Masyarakat desa, mewujudkan suatu paguyuban atau menurut sosiologi suatu *gemeinschaft* dimana ikatan kekeluargaan erat. Sementara itu, proses sosial, perubahannya yang dimaksud, berjalan lambat. Juga kontrol kemasyarakatannya di desa lebih ditentukan oleh adat, moral dan hukum yang informal.

2.2.2 Konsep Pembangunan Desa Tertinggal

a. Pembangunan Desa Tertinggal

Negara Indonesia terbagi atas beberapa desa, berarti kesuksesan pembangunan desa mendukung suksesnya pembangunan nasional. Yang dimaksudkan pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan desa, yang berlandaskan kepada

potensi desa seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Jadi jelas bahwa sifat dan cara pembangunan desa di suatu propinsi tidak sama dengan pembangunan di propinsi lain. Falsafah pembangunan pedesaan yang baik adalah yang satu mempertimbangkan secara langsung apa yang dikehendaki petani, yang biasanya tidak seragam karena adanya perbedaan ekologi dan agromini wilayah masing-masing.

Pembangunan desa menurut T.R Batten (dalam Beratha, 1984:66-67) adalah “suatu proses dimana orang atau masyarakat desa mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengajarkan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut”. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa dimulai dari keinginan masyarakat desa untuk maju dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, disamping itu juga tidak ingin ketinggalan jaman.

Menurut Adisasmita (2006:4) “pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong”.

Tujuannya:

- a. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina

usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perusahaan nasional.

- b. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Tujuan pembangunan desa secara parsial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan sinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sasaran pembangunan desa:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. Percepatan pembangunan desa.
- c. Peningkatan ketrampilan dan berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
- e. Penguatan kelembagaan.

Menurut Adisasmita (2006:5), prinsip-prinsip dalam pembangunan desa adalah:

- a. Transparansi.
- b. Partisipatif.
- c. Dapat dinikmati masyarakat.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, hakekat pembangunan masyarakat desa yaitu usaha mendorong rakyat untuk memperbaiki kehidupannya, yang meliputi segala macam pembangunan yang dipilih dan ditentukan secara bebas dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu pembangunan yang berdimensi kerakyatan, yaitu rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan jalannya pembangunan. Dengan adanya pembangunan

yang berfokus pada kerakyatan, rakyat telah diposisikan sebagai penentu dan sumber informasi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, sebab selama mereka tidak menjadi penggerak atau secara langsung terlibat dalam proses pembangunan maka hasil yang diperoleh akan sangat terbatas bahkan mungkin akan menjadi kontra produktif. Agar partisipasi masyarakat dapat terwujud, pemerintah diharapkan mampu memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, merumuskan kehendak mereka mengorganisasi usaha-usaha, meningkatkan kepentingan-kepentingan mereka yang sah, menjamin kondisi demi penghidupan mereka yang lebih baik dan memainkan peranan penting dalam pemecahan masalah mereka sendiri.

Membahas tentang desa (lokal) apabila dikaitkan dengan konsep pembangunan pedesaan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Strategi dan pendekatan yang demikian, lebih berfokus pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberikan kekuatan, kesempatan dan kekuasaan individu, kelompok, sasaran lokal, masyarakat serta struktur kelembagaan pembangunan agar berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun perlu diingat, bahwa masyarakat pedesaan mempunyai tradisi dan adat istiadat sendiri, karenanya dalam usaha pembangunan masyarakat desa tidak ada suatu rumus atau cara yang

dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, usaha-usaha pembangunan desa harus memperhatikan keadaan lingkungan masing-masing desa. Selain itu, yang harus ada dalam usaha melakukan pembangunan masyarakat desa, harus tetap memperhatikan tiga hal antara lain:

1. Mengusahakan agar yang baik-baik di desa tetap terpelihara.
2. Menyaring hal-hal yang datang dari kota dan dunia luar pada umumnya, yang baik kita manfaatkan dan yang buruk kita cegah masuk.
3. Meningkatkan kesejahteraan di desa supaya orang tidak tertarik mengadu nasib ke kota.

b. Desa Tertinggal

Desa tertinggal identik dengan kondisi desa yang miskin dan terbelakang. “Desa Tertinggal merupakan kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan)” (Mubyarto, 1994:24). Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Tertinggal yaitu:

- 1) Daerah pedesaan (unit administratif desa)
- 2) Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada:
 - a. Air Bersih.
 - b. Listrik.

- c. Irigasi
- 3) Sarana wilayah kurang/tidak ada:
 - a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri).
 - b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan).
 - c. Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)
- 4) Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)
- 5) Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun)
- 6) Produktivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif)

Pembangunan pedesaan diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduk tinggal di pedesaan sekitar 70-80% penduduk dunia terutama negara berkembang dan terbelakang bermukim di pedesaan. Keadaan negara-negara tersebut pada umumnya taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global.

Selanjutnya Lee (dalam Abdul Wahab, 1994:161) dan Supriatna (2000:71) merumuskan pembangunan pedesaan sebagai berikut “*community rural development is rural areas and making the process of their development self sustaining*”. Dalam hal ini, pembangunan masyarakat pedesaan sebagai upaya perbaikan standart kehidupan bagi sebagian penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal

di daerah pedesaan seraya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kata kunci dari pembangunan pedesaan tersebut adalah *self sustaining*, yang artinya pembangunan dimaksudkan untuk mengentaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinannya di daerah harus berangkat dari kebutuhan dan kekuatan masyarakat sendiri. Yang pada intinya pembangunan pedesaan merupakan segala proses yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam arti seluas-luasnya.

Melakukan pembangunan pedesaan, diperlukan adanya suatu pendekatan-pendekatan. Dimana pendekatan ini membutuhkan pemenuhan empat aspek pembangunan manusia untuk mempengaruhi masa depannya, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Capacity*, yakni kemampuan untuk melakukan pembangunan.
2. *Equity*, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan.
3. *Empowerment*, yakni pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting.
4. *Sustainable*, yakni kemampuan untuk hidup terus. Dengan demikian pendekatan ini merupakan proses membentuk manusia untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa dan kreativitasnya menumbuhkan partisipasi dalam mengambil keputusan dan membatasi ketergantungan.

Apapun bentuk pendekatan itu, tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Karena

kemiskinan dan keterbelakangan hanya bisa dikurangi kalau penduduk desa mampu mengembangkan dirinya untuk mandiri dan mampu dalam menguasai lingkungan sosialnya. Pembangunan pedesaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan pembangunan manusia karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai individu, kelompok dan komunitas yang saling berinteraksi dan saling berkomunikasi satu sama lain baik secara terorganisir dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. “Dalam suatu masyarakat selalu ditekankan pada kebersamaan, pemerataan, keberdayaan, kemandirian dan saling ketergantungan” (Supriatna, 2000:75-100). Sehubungan dengan hal itu, dalam pembangunan masyarakat haruslah selalu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi perubahan sosial dan masyarakat.

Sedangkan yang mempengaruhi sosial tersebut menurut Mubyarto (1994:45) dapat dikembangkan tujuh indikator pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Perubahan produktivitas pedesaan.
2. Perubahan tingkat kesempatan kerja.
3. Perubahan dalam pembagian pendapatan.
4. Perubahan struktur kekuasaan.
5. Perubahan tingkat mobilitas sosial.
6. Perubahan dalam nilai, kepercayaan dan sikap terhadap lingkungan sosial yang lebih luas.
7. Perubahan sasaran pelayanan sosial.

Dengan demikian, pembangunan pedesaan tidak saja memberikan karakteristik yang spesifik yang membedakan konsep pembangunan

pada umumnya, tetapi secara eksplisit menunjukkan beberapa indikator keberhasilan pembangunan desa dikatakan berhasil apabila:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Rasa tanggungjawab dalam pembangunan.
3. Kemampuan masyarakat untuk berkembang.
4. Prasarana fisik.
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Selanjutnya, Inayatullah (dalam Hagul, 1992:11) pengembangan pedesaan adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Dimana definisi tersebut mempunyai implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh pada penduduk pedesaan dalam mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini dapat dicapai kalau pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian mereka. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan tidak terbatas pada kelompok kuat di pedesaan melainkan harus merata diantara penduduk. Upaya pengembangan pedesaan memang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup warga desa dan individu.

Pada umumnya masyarakat desa mempunyai cara sendiri dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kebiasaan

hidup yang bergotong royong, yang merupakan hubungan sosial, sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat pedesaan. Diawali dengan hidup bergotong royong inilah maka hubungan sosial yang saling membutuhkan dan saling membantu ini dapat membantu masyarakat makmur, karena hubungan sosial tadi meningkat menjadi hubungan ekonomi yang saling membantu. Dimana hubungan ekonomi masih didasari pada sifat yang saling membantu tanpa memperhatikan imbalan atau lainnya.

Sementara itu, permasalahan kemiskinan pada khususnya di pedesaan menurut Sumodiningrat (1999:150) disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan akan kendala yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan seperti rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Dan faktor eksternal terkait dengan permasalahan infrastruktur, berbelitnya prosedur atau peraturan yang ada.

Sedangkan menurut Mubyarto (dalam Hagul, 1992:34) menyatakan tentang gambaran nyata dari adanya kemiskinan dan keterbelakangan di pedesaan, mengemukakan bahwa pendapatan mayoritas penduduk pedesaan yang rendah, adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dalam usaha pembangunan. Adapun penyebab dari kemiskinan dan keterbelakangan, antara lain:

1. Kurangnya pengembangan sumber daya manusia.

2. Kurangnya pengembangan sumber daya alam.
3. Kurangnya lapangan/peluang/kesempatan kerja dan berusaha.

Melihat fenomena dari teori tersebut, pembangunan pedesaan perlu lebih ditingkatkan dengan harapan taraf hidup masyarakat hidup dapat meningkat juga. Walaupun demikian, masyarakat pedesaan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta kesejahteraannya pada dasarnya mereka tidak kaku untuk menerima pembaharuan dari luar, asalkan pendekatan yang digunakan memadai dan dapat diterima dengan baik dan terbuka oleh masyarakat pedesaan setempat.

c.Strategi Pembangunan Desa Tertinggal

Pada umumnya di negara-negara berkembang paling tidak berkembang dari beberapa strategi. Menurut Abdul Wahab (1994:45) pada umumnya ada empat strategi yang sering dipakai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan yang termaktub dalam pembangunan desa yaitu:

1. *The Growth Strategy* (Strategi Pertumbuhan)

Strategi pertumbuhan pada umumnya bermaksud untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis dari *output* pertanian dengan cara mengeluarkan sumber-sumber pada para petani yang paling mudah untuk di jangkau dalam artian psikologis maupun artian administratif. Biasanya para petani besar, petani-petani modern yang memiliki kemampuan akses terhadap fasilitas kredit, teknologi padat modal dan pasar.

Titik berat strategi ini adalah pada peningkatan jenis-jenis tanaman yang akan menghasilkan keuntungan besar, seringkali berupa tanaman yang diekspor atau konsumsi elite.

2. *The Welfare Strategy* (Strategi Kesejahteraan)

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program-program sosial berskala besar seperti misalnya pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan gizi di desa.

3. *Resposip Strategy* (Strategi yang Tanggap Kebutuhan Masyarakat)

Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang telah dirumuskan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh penduduk desa. Selain dari pada itu strategi ini untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk desa melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang cocok untuk kepentingan mereka, terutama yang tidak tersedia di desa.

4. *The Integreted Strategy* (Strategi Terpadu)

Strategi terpadu dimaksudkan untuk mengkombinasikan unsur-unsur pokok dari pendekatan. Artinya ingin mencapai

secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut pertumbuhan, persamaan kesejahteraan dan partisipasi.

Keempat strategi tersebut apabila dicermati pada prinsipnya sulit untuk diterapkan di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan dapat kita terapkan disini, hal ini dapat dikaitkan dengan kompleksnya kepentingan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasyarakat melalui iforasi globalisasi dan kapasitas masyarakat semakin meningkat.

d. Sistem dan Mekanisme Pembangunan Desa Tertinggal

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses dan mekanisme pembangunan desa yang sedang berjalan menurut Maskun (1993:4) antara lain:

1. Pembangunan desa masih ditangani secara dekonstruksi, disamping sifat dan hakekat desa di Indonesia sangat beraneka ragam yang membutuhkan penanganan yang serba cepat dan tepat.
2. Dana pembangunan desa secara lintas sektoral masih memerlukan usaha dan dorongan yang kuat agar dana dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat desa. Mekanisme proyek pembangunan desa yang sedang berlangsung perlu seringkali dikaji ulang, untuk dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat desa melalui tingkat pemerintahan terbawah.
3. Gerakan pembangunan desa baru berkumandang pada pemerintahan atas dan masih perlu ditingkatkan dan lebih lanjut mengenai potensi desa ini, diintensifkan di kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, secara menyeluruh di desa-desa di segenap penjuru tanah air.

Dengan memperhatikan ketiga hal di atas, dalam melaksanakan pembangunan desa, mulai dari awal perencanaan harus

betul-betul diperhatikan, mulai dari segi perencanaan, dana pembiayaan yang diperoleh, sampai pada pelaksanaan serta hasil dari pembangunan tersebut.

2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Secara konseptual Priyono dan Pranarka (1996:3) menjelaskan pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua makna pokok yakni, (1) *To give power or authority to* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri); (2) *To give ability or enable* (meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan).

Berdasarkan pada pengertian itu, menurut Sulistyani (2004:77), pemberdayaan dapat dimaknai sebagai “proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya”. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya. Makna “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri, makna pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat tetapi

dari pihak lain yang mempunyai kekuatan dan kemampuan seperti pemerintah dan agen pembaharu lainnya.

Pambudi (2003:57-58) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dapat berarti:

1. Pemberdayaan bermakna ke dalam yang berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk memperbaiki kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan pemaknaan pemberdayaan masyarakat itu, maka Winarni (dalam Sulistyani, 2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yakni: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau sumber daya (*empowering*) dan terjadinya kemandirian. Jadi pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Kartasmita (1996:5) bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok yakni:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian maka sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun data itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan

- membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian *input* berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan) serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
 3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri yang hasilnya dipertukarkan dengan pihak lain.

Pengertian pemberdayaan di atas, berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, pada dasarnya semua masyarakat mempunyai potensi, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan ini adalah pengembangan daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Dari uraian tersebut Sulistyani (2004:79) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Definisi pemberdayaan menurut Suharto (2008:57-59) dilihat dari tujuan, proses dan cara pemberdayaan yaitu (1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang yang lemah; (2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya; (3) Pemberdayaan menunjuk kepada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur modal; (4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Parson (dalam Suharto, 2008:63) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada (1) Sebuah proses pembangunan yang bermula pada pertumbuhan individual uang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar; (2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain; (3) Pembebasan yang dihasilkan oleh sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa makna hakiki pemberdayaan adalah (1) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan

agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun dari dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering* dan *sustainable*”.

b. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2008:56):

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas “kecil”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia

- dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
 4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
 5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
 6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
 7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
 8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Pranarka dan

Prijono (1996:30) mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase, yakni:

1. Fase initial, suatu proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
2. Fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika masuk pada fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.
3. Fase emansipatoris, ini masyarakat sudah bisa menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri. Puncak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ketika berada pada fase emansipatoris. Untuk dapat merealisasikan hal ini dibutuhkan adanya dua persyaratan pokok yaitu persyaratan dalam perencanaan pembangunan dan persyaratan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan Friedman (1992:41-43) melihat beberapa tahap pembangunan yaitu:

1. Pemberdayaan individu, merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu ke jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan yang luas ini akan membentuk keberdayaan sosial. Keluarga disini didudukkan sebagai “prosedur sekaligus *customer*”.
2. Pemberdayaan ikatan antar individu atau kelompok yang merupakan “spiral model”. Pada hakekatnya individu satu dan lainnya diikat oleh satu ikatan yang disebut keluarga. Demikian antara satu keluarga dan lainnya diikat oleh ikatan berketetapan seterusnya sampai ikatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan pertama, hubungan yang terjadi disebabkan saling percaya satu sama lain, keyakinan agama, kesamaan keturunan, nasib atau kedekatan bertetangga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan ini dapat

terwujud dalam satu gerakan buruh, organisasi politik dan lainnya.

3. Pemberdayaan politik, pada hakekatnya dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik (*political exclusion*). Pada praktek ekonomi yang terjadi pada saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi oleh “*urban metropolitan economy*” dan “*multinational economy*” terhadap para orang miskin di pedesaan. Pengabaian ini nampak pada tidak dimasukkannya si miskin ke dalam proses dan struktur akumulasi kapital. Pengabaian ini juga nampak pada pengusuran-pengusuran sumber daya tanah yang dimiliki si miskin di pedesaan oleh sektor-sektor di perkotaan.

Proses pemberdayaan, dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hierarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu senasib untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut “*collective self-empowerment*”. Dalam kelompok, terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat, akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang pentahapan pemberdayaan tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004:83-84) menyebutkan bahwa tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pelaku pemberdayaan masyarakat menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Tahap ini merupakan tahapan pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang dibutuhkan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian itu

tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Dubois dan Miley dalam Suharto (2008:68), memberi beberapa cara dan teknik yang lebih spesifik, yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu serta menekankan kerjasama klien; (2) Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiaan klien; (3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi; (4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Selanjutnya Kartasmita (1996:76-79), mengemukakan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Upaya ini harus terarah (*targeted*), ini yang secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka, selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena cara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu besar kalau penanggulangan dilakukan secara individu.

Untuk mengukur apakah proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator tersebut menurut Suryana (2006:86), adalah: masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, dapat berjalannya "*bottom up planning*", memampukan dan aktivitas ekonomi, kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Dengan demikian, berarti proses pemberdayaan yang dimaksud adalah harus dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan melibatkan semua potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, yang dimulai dari pemberdayaan individu lalu kemudian pemberdayaan kelompok.

d. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Strategi pemberdayaan masyarakat secara konseptual menurut Suryana (2006:59) meliputi:

1. Pendekatan kelompok

Secara ekonomi, budaya dan politik yang ada di masyarakat khususnya pedesaan dewasa ini masih sangat rendah atau lemah. Hal ini akan sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara sendiri-sendiri, karena itu pendekatan kelompok adalah strategi paling efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat dimana pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang.

2. Penguatan kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan pada dasarnya dilaksanakan karena terdapat asumsi bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk memajemen masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Dengan memfungsikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan melalui berbagai *input* pembinaan dan arahan diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Di sisi lain akan terjadi proses pembelajaran dengan mengorganisir kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar berhasil secara optimal (*social learning*).

3. Pendampingan

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri. Adapun tugas pendamping meliputi menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan

pengetahuan, sikap, keterampilan maupun kinerja mereka.

Implementasi pengembangan SDM yaitu diharapkan adanya program-program kegiatan yang bersifat pendidikan dan latihan secara sistematis.

5. Pemberian stimulan

Stimulan yang diberikan biasanya berupa dana hibah baik hibah murni maupun bergulir (*revolving fund*). Dengan pemberian stimulan diharapkan ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan kemampuan serta mempersiapkan masyarakat secara teknis baik administratif maupun *skill*.

Menurut Elliot (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:13), di dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power* yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.
2. *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The Empowerment Approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses

kepada sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Hal ini ditambahkan oleh Prasojo (2004:68):

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat ditingkat kelurahan/desa:

1. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subjek.
2. Memberdayakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratif, efisien dan efektif.
3. Mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya.
4. Memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Menurut Suharto (2008:66), pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan yaitu:

1. Asas makro, pemberdayaan dilakukan terhadap klen secara individu melalui bimbingan, konseling *stress management*, *crisis intervention*.
2. Asas mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klen. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
3. Asas makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, ada lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2008:67):

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha

Dengan demikian, strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, haruslah dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti ini, akan tetapi setidaknya dapat menawarkan alternatif agar strategi pemberdayaan bisa mencapai tujuan.

2.3.2 Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat, dalam beberapa waktu terakhir pasca krisis menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum oleh banyak pihak. Krisis ekonomi membutuhkan ekonomi rakyat yang semula dipandang sebelah mata ternyata mempunyai daya tahan dan lenting yang kuat dan cepat pulih serta tidak membebani negara setelah badai krisis melanda. Ekonomi rakyat merupakan konsep asli Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pengertian ekonomi keluarga

dan ekonomi kerakyatan yang merupakan sila ke empat pancasila yang menekankan sifat demokratis sistem ekonomi indonesia.

Mubyarto (2005:13) mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai “kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional”. Dalam literatur ekonomi pembangunan ia disebut sektor informal, “*underground economy*”. Sebelum krisis, ekonomi rakyat ini tidak dipandang, sehingga diilustrasikan oleh Mubyarto sebagai kekayaan laksana “berlian” yang tidak siap dialihkan jadi modal sosial. Pada umumnya pelaku-pelaku ekonomi rakyat ini modalnya kecil, bahkan gurem, berasal dari pinjaman koperasi kecil, arisan kampung, pegadaian, rentenir dan tidak dipandang sebagai investasi.

Menurut Krisnamurthi dalam Mubyarto (2005:103), mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai “kegiatan ekonomi rakyat banyak, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil dan bukan kegiatan ekonomi oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar”. Jika dikaitkan dengan pertanian maka ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani, peternak dan nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah dan nelayan tanpa perahu. Jika dikaitkan dengan usaha perdagangan, industri dan jasa ekonomi rakyat adalah industri kecil dan rumah

tangga, pedagang kecil dan eceran, lembaga keuangan mikro dan sejenisnya. Perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang dimaksudkan dalam istilah demokrasi ekonomi yang dapat dipahami dari penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “produksi dikerjakan oleh semua pihak untuk semua, di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Perekonomian Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran rakyat daripada kemakmuran orang per orang atau kelompok yang disusun atas dasar demokrasi ekonomi”.

Dilain pihak Rintuh, Cornelis dan Miar (2005:4) memberi pengertian ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya, mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasanya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarga”. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup (*survival*) dari masyarakat miskin. Sebagian besar (lebih dari 60%) rakyat hidup di daerah pedesaan dari kegiatan pertanian (dalam arti luas) dan digolongkan dalam sektor ekonomi informal.

Menurut Ismawan (2005:17), kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat, dapat dikelompokkan sebagai berikut

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder-pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semula dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil dan semacamnya.
2. Kegiatan-kegiatan tersier transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah maupun alat produksi.
3. Kegiatan-kegiatan distribusi pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen serta usaha sejenisnya.
4. Kegiatan-kegiatan jasa lain pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang ekonomi rakyat, Ismawan (2005:18-20) menggambarkan beberapa karakteristik ekonomi rakyat sebagai berikut:

1. Informalitas, sebagian besar ekonomi rakyat bekerja di luar kerangka legal dan pengaturan yang ada. Sifat informalitas ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses lembaga keuangan informal dengan bunga yang tinggi.
2. Mobilitas, sektor ekonomi rakyat ini merupakan sektor yang mudah untuk dimasuki dan ditinggalkan karena tidak ada jaminan keberlangsungan aktivitas yang dijalani.
3. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga.
4. Kemandirian, salah persepsi terhadap ekonomi rakyat menyebabkan banyak pihak luar seperti lembaga keuangan formal membatasi diri berhubungan dengan sektor ekonomi rakyat.
5. Hubungan dengan sektor formal, walaupun sebagai sektor informal, namun juga berhubungan erat dengan sektor formal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi yang digeluti rakyat kebanyakan dan sebagian besar adalah masyarakat miskin dan dipastikan mempunyai skala kecil dan mikro dan kebanyakan tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, dalam konteks tulisan ini adalah ekonomi dari masyarakat miskin pedesaan dengan skala kecil dan keterbatasan modal.

2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kemiskinan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok saja, namun mempunyai banyak dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan serangan langsung terhadap penyebab kemiskinan dari berbagai dimensi tersebut. Pengentasan kemiskinan juga harus melihat kemiskinan dari kedua sisi, baik dari sisi *absolute* maupun *relative*. Sehingga perlu adanya suatu formulasi kebijakan yang mampu mengadopsi semua dimensi kemiskinan tersebut. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu strategi yang dapat memenuhi keinginan tersebut.

Perubahan paradigma pembangunan kearah *people centered development* dan fakta dibalik krisis ekonomi 1997 menyadarkan dan mengharuskan pemerintah mengubah pendekatan pembangunan ekonominya menjadi lebih bernuansa pemberdayaan. Program dan kebijakan pemerintah dituntut lebih populis dan memihak pada ekonomi rakyat yang sebelumnya dalam posisi yang termarjinalkan. Pada kenyataannya para pelaku dari ekonomi rakyat sebagian besar adalah masyarakat miskin dan tinggal di pedesaan, maka pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat pedesaan pada dasarnya juga adalah pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi adalah:

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kompetitif.
2. Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke *input* sumber daya ekonomi berupa modal, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar dan teknologi produksi.
3. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar (2005:84) mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Keberadaan ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil dan mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro ini mempunyai nilai strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro ini mempunyai nilai strategis seperti yang diungkapkan oleh Ismawan (2005:45), setidaknya dilihat beberapa alasan, yaitu:

1. Mereka telah mempelajari kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti.
2. Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan lebih mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil.

3. Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin serta usaha lanjut dan muda.

Rintuh, Cornelis dan Miar (2005:82-83), mengemukakan bahwa dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, dapat dilakukan melalui dua strategi:

1. Memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern tetap maju. Oleh karena kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan.
2. Memberdayakan sektor ekonomi dan lapis masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di jalur kehidupan modern.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2008:63). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet (dalam Suryana, 2006:6) pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar. Pada gilirannya strategi ini menurut Suryana (2006:29) memuat lima sasaran utama yaitu:

1. Dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Dibutuhkannya kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik; pendidikan, kesehatan, pendidikan yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain-lain.
3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan kerja sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terbinanya sarana dan prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa.
5. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembinaan proyek-proyek.

2.3.4 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam era reformasi ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana nafas dan nuansa undang-undang tersebut adalah mencerminkan sosok birokrasi yang inovatif dan humanis yang dapat membagi peran atau bahkan

bertindak sebagai fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat lokal mengekspresikan dirinya dalam membangun daerah dan masyarakatnya. Konsep pemberdayaan pada awalnya juga muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral negara terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Namun dengan adanya konsep pemberdayaan, maka konsep pemberdayaan masyarakat ini, berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat diberi kesempatan atau berhak mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka masyarakat yang dahulunya menjadi objek pembangunan, maka dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat merupakan subjek pembangunan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah bukan berarti lepas tangan namun menurut Suryana (2006: 122) memberi pendapat bahwa di era *good governance*, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lebih berfungsi sebagai regulator yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dengan menjalankan peran sebagai regulator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat maka pemerintah dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk pembangunan di semua sektor kehidupan. Hal tersebut dipertegas oleh Sulistyani (2004: 97-99) yang

menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum menyangkut formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi mediasi. Peran pemerintah paling menonjol adalah dalam peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Mengingat adanya kemungkinan terjadi sengketa dalam perjalanan pembangunan maka diperlukan peran mediasi. Untuk menjaga kualitas hasil, pemerintah menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan, menjaga kualitas dan tanggung jawab, pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi pada setiap program pembangunan. Dan kriteria tersebut dikonsultasikan, didiskusikan dengan pihak masyarakat yang memiliki kompetensi atau profesi relevan.

Pendapat lain tentang peran dan tugas pemerintah menurut Suryana (2006:45) dimana pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (1) Harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat; (2) Harus membangun partisipasi masyarakat. Artinya, memberi sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri; (3) Harus menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik pengetahuan maupun cara bekerja agar supaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif. Ini merupakan bagian

dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian; (4) Harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi amat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; (5) Harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri; (6) Harus mampu menciptakan instrumen peraturan dan pengawasan yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan berperan efektif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin (termasuk PNPM), sehingga pemerintah daerah diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara periodik melakukan “validasi keluarga miskin”, agar diketahui dan ditetapkan “nama dan jumlah keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) program penanggulangan kemiskinan, serta sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin”.
2. Mengembangkan “program penanggulangan kemiskinan spesifik daerah” yang dibiayai dari dana APBD, agar dapat berkontribusi simultan dengan program penanggulangan kemiskinan yang diintrodusir oleh pemerintah pusat.
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan, agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di masing-masing daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat sangatlah besar dimana perintah pada hakekatnya hanya menjadi fasilitator dan regulator dalam sebuah proses pemberdayaan.

2.4 Globalisasi

2.4.1 Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Menurut definisi Bank Dunia, globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan masyarakat melalui arus informasi, ide, aktivitas, teknologi, barang, jasa, modal dan manusia antarnegara (Stren, 2000:45).

Globalisasi adalah peruntuhan batas-batas jarak antar bangsa, antar negara dan negara, antara budaya yang satu dengan yang lain. Dengan demikian manusia akan berhubungan secara dekat dalam apa yang disebut dengan budaya gobal, pasar, *family* global. Sebagian yang lain juga mengistilahkan bahwa globalisasi adalah menjadikan dunia ini sebagai desa buasa (*global village*). Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing.

Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

2.4.2 Teori Globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat beberapa posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu:

1. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).

2. Para tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital.
3. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung”. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

2.4.3 Dampak Globalisasi

Adanya globalisasi membawa manfaat bagi umat manusia tetapi ada juga dampak buruknya. Dampak positif dan negatif dari globalisasi adalah:

1. Bidang sosial budaya

Dampak positif globalisasi di bidang sosial adalah para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Adapun dampak negatifnya adalah bahwa generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, melukis di tembok-tembok, dan lain-lain.

2. Bidang Ekonomi

Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda. Sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Globalisasi dan liberalisme pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional. Membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan

kekuasaan politik pada segelintir orang. Munculnya lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, WTO.

3. Bidang Budaya dan Politik

Dampak Positif Globalisasi:

- a. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.
- b. Mudah melakukan komunikasi.
- c. Cepat dalam bepergian.
- d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
- e. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
- f. Mudah memenuhi kebutuhan.
- g. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor.

Dampak Negatif Globalisasi:

- a. Informasi yang tidak tersaring.
- b. Perilaku konsumtif.
- c. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit.
- d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk.
- e. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat.
- f. Ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menggunakan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan atau objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini penting sebagai pedoman peneliti agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan baik. Metode merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Sedangkan penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metode penelitian mempunyai beberapa unsur yang pendukung, seperti jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih mengkaji pada hal-hal yang bersifat fenomenal, sehingga dengan pendekatan kualitatif, peneliti bisa mengungkap dan mendeskripsikan fakta-fakta yang tersembunyi di balik fenomena. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Arikunto (2006:28)

mendefinisikan "metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Dari penelitian ini peneliti dapat melihat dan mengungkap fenomena dan permasalahan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik desa yang masih tertinggal yang nantinya dapat dilakukan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan peneliti disini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Menurut Idrus (2009:29) "penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi". Disini peneliti akan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dilakukan di Desa Muktiharjo dalam rangka pembangunan desa.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang akan dijadikan sebagai pusat penelitian dalam penelitian ini dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Selain itu, penetapan fokus penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah

terjadinya pembiasaan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang akan diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Muktiharjo

- 1) Pertanian/perkebunan
- 2) Perikanan
- 3) Pariwisata
- 4) Usaha Kecil dan Menengah

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari upaya:

- 1) Pemerintah Kabupaten
- 2) Pemerintah Kecamatan
- 3) Pemerintah Desa

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal, yang dapat dilihat dari:

a. Faktor pendukung

- 1) Sumber daya alam yang melimpah
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang banyak
- 3) Globalisasi
- 4) Kemajuan teknologi

b. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan modal
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti, maka lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pati. Sedangkan situsnya adalah menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan dapat diperoleh. Maka situs penelitian ini adalah di Desa Muktiharjo, dengan pertimbangan bahwa desa ini adalah salah satu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Pati. Sehingga perlu diketahui bagaimana dan seberapa jauh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Muktiharjo dalam membangun desanya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Pada situs ini, peneliti akan melakukan penelitian pada masyarakatnya dan pada kepala desa beserta pejabatnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Idrus (2009:37) "data merupakan bahan atau keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan memberikan keterangan yang dapat berupa catatan dalam bentuk buku atau file". Sumber data merupakan asal dari manakah data tersebut diperoleh atau didapatkan. Sumber data utama menurut Lofland dalam Idrus (2009:38) dalam penelitian kualitatif adalah "kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Dengan demikian sumber data tersebut dapat berupa informan dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Menurut Idrus (2009:38) sumber data menurut derajat sumbernya dapat dibagi menjadi:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut.

Soal primer atau sekundernya sumber data tergantung pada maksud penelitian. Sumber primer sesuatu penelitian bisa merupakan sumber sekunder untuk penelitian lain. Dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, sumber primer diperoleh dari peneliti sendiri. Data primer ini diperoleh melalui observasi langsung di Desa Muktiharjo dan wawancara terhadap masyarakat Desa Muktiharjo. Dan dapat juga

dengan menggunakan data sekunder seperti dari koran, internet dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti yaitu masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang terjadi saat ini.

3.4.2 Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah :

1) Informan

Menurut Idrus (2009:40), informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Sedangkan Informan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Perangkat Desa Muktiharjo, meliputi: Kepala desa, Sekretaris desa, Bagian ekonomi dan pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa Muktiharjo, meliputi: Tokoh Masyarakat, Masyarakat umum, untuk memperoleh data mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2) Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Kantor Desa Muktiharjo serta masyarakat Desa Muktiharjo.

3) Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Muktiharjo.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Catatan lapangan

Menurut Idrus (2009:41) "catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas dan mendalam yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang aktor, aktivitas ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut.

2. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indra dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Pedoman wawancara (*interview guide*), sebagai pedoman dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer. Pedoman wawancara berisi rangkaian daftar pertanyaan yang akan ditayangkan kepada narasumber data penelitian.

4. Alat pendokumentasian, digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Metode Pengambilan Data

Dalam proses penelitian, diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan tata cara pengelompokan ataupun memilah-milah data yang kemudian dijadikan langkah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden. Dalam penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sumber informan yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian adalah masyarakat sebagai objek yang dikenai kebijakan.

2. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan pemahaman materi melalui data-data tertulis untuk mendapatkan informasi berupa data-data sekunder terkait dengan penelitian yang dilakukan. Analisis dokumen tertulis tidak terbatas pada teks berbentuk dokumen, akan tetapi peneliti bisa mengolah informasi dari jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, manuskrip atau sumber-sumber lain seperti kliping dan leaflet, yaitu semacam lembaran berita

yang terdiri dari selebar kertas yang dilipat memuat informasi singkat tentang lembaga, orang dan kegiatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkannya. *Leaflet* biasanya juga memuat isu-isu tertentu sesuai dengan kepentingan lembaga yang bersangkutan. Analisis dokumen yang akan membantu peneliti dalam penyusunan penelitian adalah informasi tertulis mengenai pemberdayaan masyarakat desa tertinggal sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, atau majalah universitas.

3. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan atas gejala-gejala tertentu baik secara langsung dengan melihat kejadian itu sendiri atau secara tidak langsung dengan menggunakan pengamatan dan pendapat orang lain di lokasi atau lapangan.

3.7 Teknik Analisa Data

Dalam suatu penelitian, agar data yang dihasilkan dapat dibaca maka perlu menggunakan suatu metode analisis data. Analisis data yang dimaksud adalah untuk dapat memberikan makna yang berguna dalam mencapai suatu kesimpulan guna memecahkan masalah penelitian. “Analisis data adalah proses mengkoordinasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja” (Idrus, 2009:45). Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992), dengan prosedur:

a. Reduksi data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan dalam reduksi data ini berarti suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

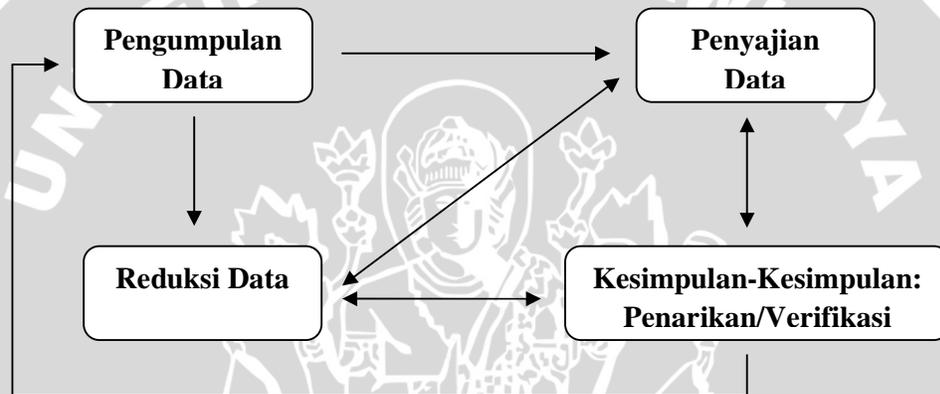
Penyajian data atau *display* data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang

mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Komponen-komponen analisis data tersebut di atas kemudian disebut sebagai model interaktif yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Idrus 2009:20)

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan fokus dan rumusan yang diangkat peneliti untuk dapat dituangkan ke dalam penyajian data. Sebelum data tersebut dituangkan ke dalam penyajian data, data tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dosen pembimbing sehingga data tersebut dapat terfokus dan dapat menjawab rumusan masalah. Setelah itu penyajian data ditelaah bersama-sama dosen pembimbing, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-sarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Pati

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15'-1110,15' BT dan 60,25'-70,00' LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa yang memiliki luas wilayah terkecil (4.085 ha). Kabupaten Pati terletak di sebelah timur ibu kota Provinsi. Jarak Kabupaten Pati

dengan ibukota provinsi 75 km, dapat di tempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan air laut yang dapat dibedakan seperti di bawah ini:

- 1) Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak.
- 2) Dataran rendah, yang membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara dan Tambakromo bagian utara.
- 3) Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Dengan kondisi wilayah tersebut, sektor pertanian memang masih menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Pati terutama bahan tanaman pangan dan buah-buahan. Usaha agroindustri juga turut dikembangkan, tanaman sayur-sayuran juga tidak kalah dalam produksi, seperti bawang merah, jagung, kacang tanah, kacang hijau, hingga cabai banyak dibudidayakan di beberapa kecamatan.

Kacang tanah lebih untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik makanan dari kacang tanah seperti pabrik Garuda dan kacang Dua kelinci yang berada di kabupaten ini. Tanaman perkebunan juga tumbuh subur, potensi hasil perkebunan yang cukup mencolok adalah produksi kelapa, juga perkebunan kopi yang berada di enam kecamatan yakni Gembong, Sukolilo, Tlogowungu, Margoyoso, Gunungwungkal dan Cluwak yang hasilnya antara lain dipasarkan ke beberapa industri pengolahan kopi di kabupaten ini.

Wilayah Pati yang berbatasan dengan laut, sudah tentu mengandalkan perikanan, kabupaten ini menjadi salah satu penghasil ikan di Jawa Tengah, terdapat juga hasil tambak, produksi ikan terbesar dihasilkan dari budidaya tambak dengan lahan tambak terutama banyak tersebar di Kecamatan Juwana berupa petak-petak yang letaknya mendekati bibir pantai. Jenis ikan bandeng dan udang banyak dibudidayakan di wilayah ini. Selain ikan segar, banyak pula diusahakan ikan olahan dengan cara pengawetan atau pengeringan ikan menjadi ikan asin, ikan pindang atau pun ikan asap. Letak Pati yang strategis juga membawa dampak yang cukup bagus bagi sektor perdagangan. Pemasaran komoditas pertanian, perikanan dan hasil industri selain lewat pelabuhan yakni perdagangan antar pulau dan ekspor mancanegara juga melalui jalur darat untuk perdagangan antar kabupaten maupun antar provinsi.

c. Kondisi Demografi

Berdasarkan Sensus Penduduk 2013, jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah 1.190.821 jiwa, terdiri dari 578.046 laki-laki dan 612.775 perempuan. Dari hasil tersebut penyebaran penduduk hampir merata di 21 Kecamatan. Kecamatan Pati, Juwana dan Sukolilo adalah 3 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Pati dengan 103.071 jiwa, Kecamatan Juwana dengan 90.006 jiwa dan Sukolilo dengan 84.426 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Gunung Wungkal yang hanya 34.950 jiwa.

Dengan luas wilayah 1503,68 km² yang didiami oleh 1.190.821 orang maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten pati adalah sebanyak 792 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pati yakni sebanyak 2.426 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pucakwangi yakni 335 orang per kilometer persegi. Dengan angka kepadatan mencapai 6 kali dari kecamatan terendah, menunjukkan bahwa ibu kota kabupaten merupakan daerah favorit untuk tempat tinggal atau bermukim karena dekat dengan segala fasilitas umum.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati dari tahun 2000-2013 sebesar 0,40%. Kecamatan dengan rata-rata laju pertumbuhan terbesar adalah Kecamatan Margorejo yaitu sebesar 1,55%. Hal ini terjadi mengingat Margorejo merupakan salah satu

daerah penyangga yang terdekat dengan ibu kota Kabupaten Pati, memiliki letak yang strategis untuk pengembangan karena dilalui oleh jalur pantai utara yang terkenal dengan keramaiannya. Banyak sekali pengusaha perumahan yang membangun perumahan baru di wilayah kecamatan ini sehingga memacu pertumbuhan penduduk/migrasi baik dari penduduk luar Kabupaten Pati maupun dari luar kecamatan yang bekerja di Pati untuk tinggal di Kecamatan Margorejo.

Yang menarik dari angka laju pertumbuhan penduduk ini adalah adanya beberapa kecamatan yang memiliki angka negatif yaitu Winong, Pucakwangi, Jakenan, Gabus dan Jaken. Kelima kecamatan ini memiliki letak yang berdekatan satu dengan yang lainnya. Penyebab menurunnya jumlah penduduk di kecamatan tersebut adalah banyaknya penduduk yang merantau, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan tempat tinggal/rumah yang tidak berpenghuni atau kosong.

4.1.2 Desa Muktiharjo



Gambar 4.1 Letak Desa Muktiharjo
Sumber: Profile Desa Muktiharjo, 2013

Desa Muktiharjo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang terdiri dari 6 dusun dan 38 RT. Kondisi Desa Muktiharjo dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, lokasi Desa Muktiharjo tidak jauh dari ibukota Kabupaten Pati. Desa Muktiharjo terletak di dataran rendah dan dekat dengan jalur pantai utara Jawa. Sehingga untuk mencapai desa ini tidak terlalu sulit meskipun belum ada transportasi umum yang dapat digunakan untuk menjangkau wilayah ini. Lingkungan alam Desa Muktiharjo dikelilingi dengan kawasan pertanian terutama tanaman tebu dan tanaman lain seperti randu, padi, kacang tanah, cabai dan tomat. Hal ini terkait dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris. Disamping itu, sebagian warga juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Desa Muktiharjo berjumlah 10.157 jiwa, dengan pembagian 4.698 jiwa laki-laki dan 5.459 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga yaitu 2.645 KK. Selain itu, kondisi demografis Desa Muktiharjo dapat dilihat dari beberapa segi kehidupan masyarakat yang menentukan kualitas kehidupan mereka. Kondisi tersebut antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, manusia dan pemerintah melalui bimbingan, penyajian

dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berperan dalam berbagai lingkungan hidup di masyarakat untuk masa kini dan yang akan datang. Kualitas pendidikan ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Di daerah pedesaan sebagian dari masyarakat telah memiliki kesadaran untuk mendidik anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, keadaan prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan dan gedung sekolah di daerah pedesaan relatif terbatas.

Ketersediaan prasarana pendidikan di daerah pedesaan yang masih kurang memadai dapat terlihat dari terbatasnya jumlah lembaga pendidikan serta kondisi fisik bangunan sekolah yang kurang representatif (rusak, tidak terawat dengan baik, kekurangan jumlah ruang kelas dan sebagainya). Selain itu, sarana pendidikan seperti ketersediaan buku-buku ajar, kondisi kursi dan meja belajar, sarana belajar elektronik, ketersediaan alat peraga juga masih terbatas. Keterbatasan prasarana dan sarana pendidikan di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat daerah pedesaan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa terutama ke daerah perkotaan. Hal ini turut mendorong laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Kondisi pendidikan di Desa Muktiharjo dapat dikatakan meningkat. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan pada jumlah lulusan SMA dan sarjana. Peningkatan jumlah ini dipengaruhi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pendidikan. Kondisi pendidikan di Desa Muktiharjo dapat dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Suwandi berikut ini:

“Kondisi pendidikan di desa ini sudah mulai menunjukkan angka peningkatan mbak. Hal itu karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan meningkat. Buktinya sekarang banyak lulusan dari SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Mungkin hal ini didorong dengan adanya arus modernisasi mbak, yang mengakibatkan terjadinya gelombang teknologi dan informasi. Ditambah lagi letak geografis desa ini yang berada di kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah pengaruh dari luar yang membawa dampak positif bagi pembangunan pendidikan di desa ini” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Sebelum ada pembangunan dan peningkatan di bidang pendidikan ini, dulu, masyarakat di Desa Muktiharjo ini masih banyak yang buta huruf. Hal ini dikarenakan pendidikan bukan merupakan faktor penting dalam kehidupan mereka. Kondisi ini diperjelas dengan wawancara dengan Bapak Rokim di bawah ini:

“Memang mbak, dulu di desa ini banyak yang masih memandang sebelah mata masalah pendidikan. La gimana lagi mbak, ekonomi masyarakat juga masih susah. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih mencari, apalagi ditambah dengan beban sekolah anak-anaknya. Dulu juga banyak mbak yang masih buta huruf

karena sekolah mereka kebanyakan tidak tamat SD. Apalagi untuk anak perempuan, pandangan orangtua dulu bahwa anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga masak di dapur. Jadi, pendidikan bukan prioritas utama bagi masyarakat” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00).

Selain itu, kondisi pendidikan desa yang tertinggal juga diperjelas oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa kondisi tersebut juga diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Sudiman:

“Iya mbak, memang dulu kita jarang ada yang dapat menikmati bangku pendidikan. Ya mungkin, hanya orang-orang kaya yang mampu untuk bersekolah. Makanya, dulu kita banyak yang tidak bisa baca tulis. Selain itu, di desa kami untuk sekolah tingkat SD hanya satu. Jadi, untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi harus pergi ke kota yang jaraknya jauh serta tidak adanya transportasi umum. Namun, sekarang kami sadar bahwa pendidikan juga penting. Sehingga minimal lah anak kami bisa sekolah biar tidak seperti orangtuanya” (wawancara dengan Bapak Sudiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 29 Maret 2014 pukul 10.30 WIB).

Seiring dengan terjadinya pembangunan, kondisi pendidikan di Desa Muktiharjo juga semakin meningkat, maka keterbukaan masyarakat akan informasi yang masuk sudah dapat diterima dengan baik. Meskipun, harus diseleksi pula informasi yang mempunyai dampak baik dan buruk bagi masyarakat. Jenjang pendidikan yang dibangun juga meningkat dari level TK sampai SD, meskipun belum punya untuk tingkat SMP dan

SMA. Berikut ini salah satu Taman Kanak-kanak yang ada di Desa Muktiharjo:



Gambar 4.2 Salah Satu TK yang Ada di Desa Muktiharjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat diketahui bahwa kondisi pendidikan di Desa Muktiharjo mengalami peningkatan. Namun juga banyak faktor yang mempengaruhi bidang pendidikan ini seperti faktor ekonomi, kurangnya informasi, kondisi sosial budaya, persediaan sarana dan prasarana dan bahkan arus modernisasi seperti saat ini. Dimana arus teknologi, informasi dan bahkan urbanisasi sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat.

2) Ekonomi

Ekonomi merupakan sektor sentral bagi perkembangan suatu wilayah. Bahkan, tolak ukur dari berhasil tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari kondisi ekonominya.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti, kondisi ekonomi di Desa Muktiharjo masih dalam proses pembangunan. Banyaknya potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan produktivitas masyarakat yang rendah. Berikut wawancara dari Bapak Suwandi mengenai hal ini:

“Kalau dari segi ekonomi, desa ini masih dalam tahap perkembangan mbak. Seperti yang mbak lihat, banyak potensi desa dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dari desa ini. Namun, bagaimana untuk mengolah dan memanfaatkan potensi masih belum dijalankan secara maksimal. Hal ini menyebabkan produktivitas dari sektor ekonomi tidak berkembang dan cenderung mengakibatkan banyaknya pengangguran pada usia produktif. Sehingga ini masih menjadi tugas bersama mbak, bagaimana untuk mengelola sumber daya yang ada di desa ini demi pembangunan ke depan yang lebih baik” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Selain itu, kondisi ekonomi di Desa Muktiharjo juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti sarana transportasi dan jalan yang memudahkan akses untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rokim yang memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebelum terdapat pembangunan desa di bawah ini:

“Begini mbak, pembangunan ekonomi disini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti transportasi dan jalan. Hal ini karena kedua hal tersebut merupakan akses dasar untuk memajukan ekonomi masyarakat di desa ini. Dulu, jalan-jalan disini tidak sebagus sekarang mbak, sedangkan tidak ada transportasi yang melewati desa ini. Sehingga masyarakat susah untuk distribusi atau

mendapatkan barang dari daerah lain. Kebanyakan dari mereka hanya mengolah apa yang ada di desa mereka sendiri. Namun, setelah ada pembangunan jalan dan transportasi ini, roda perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit mengalami peningkatan” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo terdiri dari industri kecil seperti warung dan toko. Hal ini juga dapat digambarkan melalui wawancara dengan salah satu warga yang mempunyai warung kelontong yaitu Ibu Sutinah di bawah ini:

“Kondisi ekonomi kami ya seperti ini mbak. Saya berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari sudah dari dulu. Sebelum ada pembangunan, untuk mendapatkan barang dagangan susah, karena akses untuk menuju ke pasar masih harus melalui transportasi yang jauh dari desa. Namun, saat ini, ya alhamdulillah sudah mudah mbak. Dulu, yang berjualan seperti saya sedikit, jadi masyarakat bergantung pada sawah atau ladang yang mereka miliki. Saat ini, sudah banyak yang berjualan, jadi masyarakat mempunyai banyak pilihan” (wawancara dengan Ibu Sutinah, salah satu warga Desa Muktiharjo, 24 Maret 2014 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terdapat pembangunan transportasi dan jalan yang mendukung berkembangnya sektor ekonomi masyarakat. Namun, penggalian dan pemanfaatan potensi desa belum dilaksanakan secara maksimal untuk peningkatan sektor ekonomi ini. Sehingga masih terdapat banyak pengangguran usia produktif karena

keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu juga mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan keluar desa.

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan dengan kesehatan yang baik maka sumber daya manusia yang dihasilkan juga mempunyai kualitas yang baik. Kondisi kesehatan di Desa Muktiharjo cukup baik. Sarana kesehatan seperti posyandu atau poskesdes juga tersedia di desa ini. Kemandirian masyarakat untuk menjaga kesehatannya ke petugas-petugas medis juga meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi dan pendidikan mereka. Seperti yang diketahui bahwa kesehatan, ekonomi dan pendidikan merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, program pemerintah untuk masyarakat miskin dalam hal kesehatan ini seperti Jamkesmas dan Jamkesda juga sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini seperti wawancara dengan Bapak Suwandi di bawah ini:

“Kondisi kesehatan di desa ini menurut saya juga sudah baik mbak. Seperti yang mbak bisa lihat, sarana kesehatan sudah memadai, begitupula dengan sarana pendukungnya seperti jalan. Partisipasi masyarakat untuk mengunjungi dan memanfaatkan sarana kesehatan yang ada juga baik. Bahkan untuk masyarakat miskin, mereka tidak usah khawatir masalah biaya dalam menjaga kesehatannya, karena desa ini juga difasilitasi oleh Jamkesmas dan Jamkesda” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Kondisi di atas juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Siti mengenai kesehatan di Desa Muktiharjo saat ini. Sebelum terdapat pembangunan desa, kesehatan merupakan kebutuhan sekunder masyarakat. Untuk pergi ke sarana kesehatan pun mereka masih jarang. Kebanyakan dari mereka masih menggunakan pengobatan tradisional dengan resep dari orangtua mereka. Selain itu, sarana kesehatan yang tersedia dan akses untuk mencapainya juga masih terbatas. Sehingga masyarakat menggunakan sumber-sumber kesehatan yang ada di sekitar mereka dengan biaya yang lebih murah. Berikut ini wawancara dengan Ibu Siti mengenai kondisi kesehatan di Desa Muktiharjo:

“Kalau kondisi kesehatan di desa ini, saat ini sudah cukup baik mbak. Sarana kesehatan seperti posyandu dan tenaga medis juga tersedia. Selain itu, kondisi akses untuk menuju sarana kesehatan juga mudah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dulu, dimana masyarakat sudah untuk menjangkau sarana kesehatan. Selain itu, minimnya tenaga medis menyebabkan masyarakat masih percaya dengan jasa seorang dukun atau mantri” (wawancara dengan Ibu Siti, salah satu warga Desa Muktiharjo, 23 Maret 2014 pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan di Desa Muktiharjo sudah cukup baik. Hal ini ditunjang dengan infrastruktur yang tersedia seperti sarana kesehatan dan petugas medis yang ada. Selain itu program-program kesehatan bagi masyarakat miskin seperti Jamkesmas dan Jamkesda juga sudah dilakukan dengan baik. Partisipasi

masyarakat dalam memanfaatkan sarana kesehatan yang ada juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kunjungan dari masyarakat ke fasilitas kesehatan ini.

4) Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan faktor dimana setiap individu berinteraksi dan bekerjasama dalam suatu masyarakat tertentu.

Kuatnya hubungan individu dalam masyarakat juga mempengaruhi berhasil tidaknya pembangunan dilakukan.

Dengan adanya sifat-sifat seperti gotong royong, tidak ada kecurigaan dan sikap kooperatif, maka hubungan di dalam masyarakat akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis.

Namun sebaliknya, dalam masyarakat yang terdapat banyak kecurigaan, saling tertutup satu sama lain, akan menghasilkan kondisi yang menjurus ke dalam disintegrasi masyarakat.

Kondisi hubungan dalam masyarakat di desa dapat digambarkan dalam wawancara dengan Bapak Rokim di bawah ini:

“Kalau berhubungan dengan kondisi sosial di desa ini mbak, hubungan yang terjalin diantara warga disini cukup baik. Namun, terkadang juga masih ada konflik yang menyebabkan keretakan hubungan diantara masyarakat. Sehingga, menurut saya kerukunan antar warga disini masih kurang. Namun, ke depannya akan kami kembangkan upaya-upaya untuk merekatkan hubungan antar warga disini” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Kondisi mengenai hubungan diantara masyarakat di atas, seperti yang dikatakan pula oleh Bapak Solikin di bawah ini:

“Gimana mbak ya, hubungan antar warga masyarakat disini yang baik-baik saja. Ya mungkin kadang masih terdapat konflik-konflik yang menyebabkan keretakan hubungan warga disini. Ya kita kan juga tahu, dalam hidup bermasyarakat, setiap individu mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi, ya tinggal bagaimana setiap individu tersebut untuk membuat perbedaan tersebut menjadi suatu modal dalam mempererat hubungan dalam masyarakat ini” (wawancara dengan Bapak Solikin, salah satu warga Desa Muktiharjo, 23 Maret 2014 pukul 11.30 WIB).

Di dalam suatu masyarakat, adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik memang sudah biasa. Namun yang terpenting adalah bagaimana untuk mewadahi perbedaan tersebut ke dalam suatu persatuan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wahab:

“Menurut saya solidaritas warga di Desa Muktiharjo cukup baik mbak, hal itu terlihat jika ada warga yang sakit atau meninggal, umumnya warga lain memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga yang terkena musibah terbut. Demikian halnya ketika ada warga yang sedang hajatan, warga lain secara berbondong akan mengunjungi keluarga yang sedang hajatan tersebut dengan membawa bawaan sebagaimana kebiasaan warga setempat. Jadi, kondisi sosial masyarakat disini merupakan hubungan yang sudah terjalin cukup lama dari nenek moyang mereka mbak” (wawancara dengan Bapak Wahab, salah satu ketua RT di Desa Muktiharjo, 26 Maret 2014 pukul 11.00 WIB)

Selain itu, kondisi sosial di Desa Muktiharjo dapat dikatakan homogen dari sisi etnis yaitu Jawa dan dari sisi agama, yaitu Islam. Berikut mengenai kondisi masyarakat dari sisi agama di Desa Muktiharjo:

Tabel 4.1
Banyaknya Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	9441
2	Kristen Katolik	216
3	Kristen Protestan	444
4	Budha	-
5	Hindhu	12
6	Lainnya	-

Sumber: Monografi Desa Muktiharjo, 2013

Organisasi kemasyarakatan/keagamaan di desa ini antara lain: PKK, Karang Taruna, kelompok Tani, Organisasi Muslimat/Fatayat. Selanjutnya, di desa tersebut juga terdapat pranata sosial berupa nilai-nilai yang tetap lestari di masyarakat hingga saat ini, yakni: sambatan ketika mengerjakan lahan pertanian mengerjakan rumah dan kerjabhakti/gotong royong kebersihan lingkungan.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial di Desa Muktiharjo cukup baik. Namun, masih membutuhkan kemauan dari berbagai pihak agar keretakan yang terjadi di dalam masyarakat tidak mengarah kepada disintegrasi masyarakat. Berikut ini merupakan salah satu lembaga yang digunakan masyarakat untuk menimba ilmu agama yang dinamakan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang ada di Desa Muktiharjo.



Gambar 4. 3 Salah Satu TPQ yang Ada di Desa Muktiharjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

4.2 Penyajian Data Fokus

4.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal

Desa tertinggal merupakan kondisi desa yang masyarakatnya syarat dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Di Indonesia, desa menjadi tonggak dari pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan bahan mentah yang dibutuhkan untuk pembangunan banyak terdapat di desa seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan kondisi tersebut, ketertinggalan desa membutuhkan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pembangunan desa diarahkan untuk mencapai kondisi ekonomi yang meningkat. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan indikator penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Dan desa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu cara pembangunan desa yang didasarkan pada potensi masyarakat adalah melalui pemberdayaan

masyarakat. Dalam penelitian ini, difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan peningkatan ekonomi masyarakat desa diharapkan dapat memperbaiki kondisi bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan bahkan kesejahteraan masyarakat.

a. Potensi Ekonomi yang Dimiliki Desa Muktiharjo

Potensi ekonomi dalam hal ini adalah sumber daya desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi ekonomi tidak hanya dari segi modal, tetapi juga faktor-faktor pendukung yang lain seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seperti yang telah diketahui bahwa desa merupakan tempat dari keberadaan dua faktor ini. Banyak desa di Indonesia yang tidak mampu untuk melihat, memanfaatkan atau bahkan mengelola potensi ini menjadi sesuatu yang dapat bernilai ekonomi. Jadi, potensi-potensi inilah sebenarnya yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dalam arti luas. Dalam rangka pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo adalah sebagai berikut:

1) Pertanian/Perkebunan

Di Desa Muktiharjo, potensi sumber daya alam yang terbentang luas adalah lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis desa yang berada di dataran rendah. Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor ekonomi primer, yaitu bertumpu

pada bidang pertanian. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian. Jadi, kegiatan di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah baik bahan kebutuhan pangan, sandang maupun lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Dari sektor pertanian, hasil utama dari Desa Muktiharjo adalah tebu. Namun juga ada hasil tanaman lain seperti padi, kedelai, jagung, kapuk dan hasil kebun berupa pisang dan buah-buahan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Begini mbak, desa ini merupakan desa yang letaknya di dataran rendah. Sehingga potensi yang besar adalah dibidang pertanian. Sebagian besar penduduk menanam tebu. Dari hasil ini, pendapatan yang didapat cukup besar. Hal ini karena tergantung pada permintaan pasar akan gula. Selain itu, terdapat hasil bumi lain seperti padi, jagung, kacang tanah dan kapuk. Dari hasil perkebunan pun ada seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Potensi pertanian dan perkebunan di desa ini cukup membantu perekonomian masyarakat dari dulu sampai sekarang. Dari sistem yang tradisional sampai yang modern seperti saat ini. Ya, mau gimana lagi mbak, kan sebenarnya masyarakat kita bergerak dibidang agraris” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).



Gambar 4.4 Salah Satu Aktivitas Petani di Desa Muktiharjo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara di atas, komoditas utama pertanian di Desa Muktiharjo adalah tebu. Hasil tebu disini oleh petani disetorkan langsung ke pabrik tebu, dimana harga dari hasil olahan tebu ini tergantung dengan permintaan pasar dan musim atau kondisi alam. Apabila permintaan pasar naik, maka petani akan mendapatkan untung besar. Hal sebaliknya akan terjadi apabila permintaan pasar turun, hal ini seperti adanya impor gula besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah yang dijual lebih murah dengan harga dalam negeri. Selain itu, apabila terjadi bencana seperti alam atau konflik di suatu daerah seperti banjir di Jakarta yang menyebabkan terganggunya proses distribusi barang. Harga gula pun juga bisa dipengaruhi oleh kondisi alam seperti musim hujan yang berkepanjangan yang akan mempengaruhi kualitas tebu serta musim kemarau yang akan menyebabkan kekeringan. Berikut wawancara dengan Bapak Said:

“Iya mbak, memang di desa ini tanahnya cocok untuk menanam tebu. Oleh sebab itu, banyak petani yang

berinvestasi untuk menanam tebu. Dalam menanam tebu, kita harus siap untung ruginya mbak. Hal ini dikarenakan petani tebu sangat tergantung dengan naik turunnya harga gula. Selain itu, prosedur penggilingan tebu di pabrik tebu juga mensyaratkan kualitas tebu yang baik. Sedangkan kualitas tersebut juga tergantung musim dan sistem penanaman yang baik. Makanya, para petani tebu juga tergantung pula dengan kebijakan pemerintah misalnya dalam hal impor gula atau penyuluhan mengenai cara menanam tebu yang baik” (wawancara dengan Bapak Said, salah satu petani tebu di Desa Muktiharjo, 27 Maret 2014 pukul 11.00 WIB).

Hasil produksi lain dari Desa Muktiharjo ini adalah kapuk. Dimana kapuk-kapuk ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah lain dalam bentuk barang jadi seperti kasur, bantal dan kursi atau dikirim bahan mentah. Namun terkadang masyarakat di desa ini juga mendatangkan kapuk dari wilayah lain untuk menambah hasil produksi. Potensi produksi kapuk ini juga menyerap tenaga kerja yang ada di desa ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rokim melalui wawancara berikut ini:

“Memang benar mbak, selain tebu, desa ini juga banyak menghasilkan kapuk. Dengan banyaknya bahan baku yang ada, maka didirikanlah gudang untuk memproses kapuk-kapuk tersebut. Selain dapat meningkatkan perekonomian, komoditas kapuk ini juga menyerap tenaga kerja. Seperti yang mbak lihat, banyak ibu-ibu dan remaja yang bekerja di pabrik tersebut. Hasil olahan kapuk ini nantinya akan dikirim ke wilayah lain untuk diproses lebih lanjut. Namun, juga tidak sedikit masyarakat sini yang memproduksi hasil olahan kapuk yang sudah jadi seperti kasur, bantal dan kursi. Terkadang apabila kehabisan bahan baku mbak, kita bisa mendatangkan bahan baku dari wilayah lain. Ya semoga potensi ini dapat kita lanjutkan secara berkelanjutan mbak” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain dua komoditas utama di atas, hasil pertanian lain seperti padi, jagung dan kacang tanah juga berkembang di desa ini. Hasil perkebunan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran juga dapat dijadikan alternatif untuk menyokong kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini didukung pula dengan letak desa yang strategis yaitu di jalur pantai utara Jawa sehingga hasil pertanian dapat dipasarkan dengan mudah. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Sumadi di bawah ini:

“Potensi ekonomi di desa ini memang dari sektor pertanian mbak. Padi, jagung, kacang tanah, buah-buahan serta sayur-sayuran menjadi tulang punggung sehari-hari kami. Hasil panen dari pertanian ini selain untuk kebutuhan sehari-hari juga kami jual di pasar. Sehingga harga jual yang diperoleh juga tergantung pasar. Tapi ya alhamdulillah mbak, desa ini dekat dengan lalu lintas perdagangan pantai utara Jawa, sehingga kami bisa mudah melakukan perdagangan terhadap hasil pertanian dan perkebunan kami” (wawancara dengan Bapak Sumadi, salah satu petani di Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB).

Untuk meningkatkan potensi pertanian ini, masyarakat khususnya para petani juga mengalami beberapa kendala seperti distribusi pupuk dan sistem irigasi persawahan. Meskipun terkadang sering dilupakan, tapi hal-hal tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas hasil pertanian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Iya mbak memang kita menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan potensi pertanian ini. Salah satunya adalah masalah distribusi pupuk dan persediaan air yang cukup pada musim kemarau. Oleh sebab itu, kita sudah melakukan beberapa program agar pembagian pupuk merata kepada semua petani. Selain itu, kami juga membuat sumur bor dalam untuk mengantisipasi datangnya musim

kemarau” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo dibidang pertanian ini sangat tinggi. Dua komoditas utama dari desa ini adalah tebu dan kapuk, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pula hasil pertanian dan perkebunan lain seperti padi, jagung, kacang tanah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam pengembangannya, para petani ini juga menghadapi beberapa kendala seperti tidak meratanya distribusi pupuk serta pencegahan untuk menghadapi musim kemarau yang panjang. Namun, pemerintah desa sudah memberikan solusi untuk masalah ini seperti memberikan program bagi petani mengenai distribusi pupuk serta pembuatan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan. Selain itu, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, desa ini akan dikembangkan pula sebagai wilayah pertanian unggulan.

2) Perikanan

Dari hasil observasi peneliti, sebenarnya Desa Muktiharjo juga memiliki potensi dari sektor perikanan. Pengembangan sektor perikanan ini tidak harus yang berbasis pada perikanan air asin, tetapi juga untuk perikanan air tawar. Pengembangan sektor perikanan ini juga dinilai dapat meningkatkan potensi perekonomian desa. Hal ini dikarenakan

komoditas ikan ini seiring dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sumber daya ekonomi yang tinggi terlebih lagi apabila sampai ekspor-impor. Bagi masyarakat desa, budidaya perikanan juga dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka serta menambah ekonomi keluarga. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sulaiman:

“Meskipun tidak menjadi komoditas utama di desa ini, namun sektor perikanan ini dapat menjadi tambahan penghasilan masyarakat desa disini mbak. Ya lumayan mbak buat tambah-tambah biaya sekolah anak. Saya bergerak disektor perikanan ini belum lama mbak. Awalnya juga diajak teman, namun lama kelamaan sektor ini juga dapat meningkatkan taraf perekonomian kita” (wawancara dengan Bapak Sulaiman, salah satu pemilik kolam ikan di Desa Muktiharjo, 27 Maret 2014 pukul 14.00 WIB).

Perkembangan di sektor perikanan ini juga didukung dengan adanya rencana pembangunan di Kabupaten Pati untuk menjadikan Desa Muktiharjo di Kecamatan Margorejo menjadi kawasan untuk pengembangan perikanan khususnya tambak untuk ikan air tawar. Dengan usaha budidaya ikan dalam kolam juga cocok untuk daerah-daerah di pinggir sungai. Berikut ini salah satu kolam ikan yang dimiliki oleh warga di Desa Muktiharjo:



Gambar 4. 5 Salah satu kolam ikan milik warga Desa Muktiharjo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Dengan banyaknya aliran sungai yang mendukung pengembangan perikanan di desa ini, maka pengembangan potensi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah desa. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rokim di bawah ini:

“Iya mbak, memang pengembangan disektor perikanan ini memang masih baru dalam program pembangunan desa ini. Awalnya, pengembangan sektor ini dikarenakan banyaknya aliran sungai yang melewati desa ini. Sehingga potensi ekonomi perikanan ini dapat menjadi sumber daya dalam peningkatan ekonomi desa. Bahkan, pengembangan sektor perikanan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten. Sehingga untuk lebih memajukan sektor ini dibutuhkan kerjasama berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah dan pihak swasta” (wawancara dengan Bapak Rokim, salah satu pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan merupakan potensi yang baru dikembangkan di desa ini. Namun, pengembangan sektor

perikanan ini didukung dengan kondisi geografis desa yang banyak dialiri oleh sungai. Seperti yang diketahui bahwa sungai merupakan faktor penting dalam pengembangan perikanan air tawar. Dalam pengembangannya, sektor perikanan ini masih membutuhkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah dan swasta.

3) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang tidak dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai sumber daya alam dan sejarah sosial budaya yang berbeda-beda. Di Desa Muktiharjo, sektor pariwisata ini dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi desa. Hal ini seperti yang digambarkan pada wawancara dengan Bapak Rokim di bawah ini:

“Memang mbak, desa ini mempunyai peninggalan sejarah yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Desa ini merupakan bekas dari kerajaan mataram kuno dan terdapat pula peninggalan dari kerajaan majapahit yang berupa gapura atau pintu gerbang kerajaan. Namun, masyarakat maupun kami sebagai aparat desa masih mau mengupayakan agar peninggalan sejarah ini dapat dikelola dengan baik sehingga mendatangkan sumber ekonomi yang dapat mendukung perkembangan desa ini” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).



Gambar 4.6 Gapura Majapahit di Desa Muktiharjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Objek Wisata Situs peninggalan Gerbang Majapahit di Desa Muktiharjo ini adalah peninggalan sejarah berupa Pintu Gerbang terbuat dari kayu jati. Pintu gerbang ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai Putra Sunan Muria. Namun setelah tiba di Desa Muktiharjo, Kebo Nyabrang tidak mampu lagi mengangkat dan tidak mampu melanjutkan perjalanan kemudian menunggu pintu gerbang tersebut sampai meninggal dunia. Tempat wisata ini berjarak dari kota Pati 4 km. Berdekatan dengan obyek wisata Sendang Tirta Sani. Namun, dalam perkembangannya, pemeliharaan untuk objek wisata ini kurang dapat dilakukan dengan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukiman:

“Iya mbak, memang desa ini mempunyai satu objek wisata yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yaitu gapura Majapahit. Namun, dibandingkan dengan objek

wisata lain yang ada di Kabupaten Pati, Gapura Majapahit ini kurang diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan perawatan dan pemeliharaan lokasi belum dilaksanakan dengan baik. Bahkan terkadang masyarakat secara swadaya yang kerjabakti membersihkan lingkungan wisata ini. Tindakan ini sebagai bentuk sikap mereka dalam menghargai budaya bangsanya” (wawancara dengan Bapak Sukiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 26 Maret 2014 pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata dapat dijadikan potensi ekonomi dalam pembangunan Desa Muktiharjo. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor tambahan dalam susunan program pembangunan suatu daerah. Kondisi ini disesuaikan dengan sumber daya alam dan sosial budaya yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Objek wisata Gapura Majapahit ini yang merupakan situs peninggalan sejarah dapat dijadikan sumber ekonomi desa selain untuk menambah wawasan sejarah masyarakat. Namun, pemeliharaan dan perawatan situs sejarah tersebut membutuhkan strategi yang berkelanjutan.

4) Usaha Kecil Menengah

Dari sektor perekonomian masyarakat, Desa Muktiharjo mempunyai potensi untuk pengembangan usaha kecil menengah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa industri atau usaha kecil yang terdapat di desa ini. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dibidang ekonomi, penggalan potensi dan kemauan

masyarakat untuk berkembang sangat dibutuhkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Untuk permasalahan pengembangan ekonomi masyarakat mbak, disini mulai berkembang beberapa usaha mikro dan kecil. Menurut saya, potensi ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain itu juga berguna bagi pembangunan ekonomi desa. Dari pengembangan usaha mikro dan menengah ini dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat itu mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri, namun terkadang untuk memulainya itu susah mbak. Ya semoga, ini menjadi awal yang baik untuk pembangunan ekonomi desa kami” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Muktiharjo).

Salah satu usaha mikro dan menengah yang ada di desa ini adalah usaha kripik singkong. Usaha ini mulai digemari masyarakat setelah mereka menyadari bahwa usaha kripik ini mempunyai daya jual yang lumayan baik. Selain itu, bahan dasar yang mudah didapat dan harga yang terjangkau juga merupakan faktor untuk mengembangkan usaha ini. Seperti yang telah diketahui bahwa Desa Muktiharjo mempunyai lahan pertanian yang luas sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menanam berbagai jenis tanaman. Selain itu, usaha kripik ini juga tidak membutuhkan peralatan yang mahal, masyarakat dapat menggunakan peralatan yang sehari-hari dipakai. Berikut ini wawancara dengan Ibu Sutinah, salah satu pemilik usaha kripik singkong di bawah ini:

“Kami memulai usaha ini beberapa tahun yang lalu mbak. Awalnya kami hanya mencoba untuk membuat kripik dalam jumlah kecil dan mencoba menitipkannya di warung-

warung desa sini saja mbak. Hal ini karena kami juga mempunyai dana terbatas. Usaha ini kami lakukan karena melihat tanaman singkong yang mudah didapat dan harganya relatif terjangkau dengan kantong kami. Namun, lama kelamaan usaha ini ternyata mempunyai daya jual yang lumayan besar. Banyak langganan kami yang memesan dalam jumlah banyak. Sehingga kami terus berusaha untuk mengembangkan usaha ini. Sekarang hasilnya lumayan mbak bisa meningkatkan kondisi ekonomi keluarga” (wawancara dengan Ibu Sutinah, salah satu pemilik usaha kripik singkong, 24 Maret 2014 pukul 09.30 WIB, di rumah Ibu Sutinah).



**Gambar 4. 7 Usaha kripik singkong yang ada di Desa Muktiharjo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014**

Selain itu, potensi usaha kecil dan menengah ini juga dapat dilihat dari usaha penjahit pakaian. Ada beberapa usaha penjahit pakaian yang ada di desa ini. Usaha penjahit pakaian ini mulai banyak digemari masyarakat karena banyak masyarakat yang mempunyai keahlian dalam hal menjahit. Potensi ini kemudian digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha. Saat ini, banyak masyarakat yang pembuatan pakaiannya di tangan-tangan terampil tukang jahit ini. Berikut ini merupakan

wawancara dengan Mbak Saidah, salah satu pemilik usaha jahit baju di bawah ini:

“Usaha ini memang belum lama dikembangkan mbak. Dulu, banyak masyarakat desa sini yang mempunyai keahlian menjahit. Hal ini dikarenakan budaya dulu kebanyakan masyarakat menjahit sendiri pakaiannya. Setelah itu, kami melihat bahwa ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari usaha ini. Sehingga saya mencoba untuk mulai merintisnya. Saat ini, sudah lumayan banyak pelanggan yang datang kesini untuk menjahitkan baju mereka. Apalagi kalau hari-hari menjelang lebaran, banyak pesanan yang kadang kami tidak mampu untuk menampungnya. Apabila kita menjahit sendiri kan punya keuntungan mbak, kita bisa menentukan sendiri model baju yang diinginkan. Ya alhamdulillah mbak, saat ini usaha jahit pakaian mulai berkembang dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi kita” (wawancara dengan Mbak Saidah, salah satu pemilik usaha jahit pakaian, 27 Maret 2014 pukul 13.00 WIB, di rumah Mbak Saidah).



Gambar 4. 8 Usaha Jahit Pakaian di Desa Muktiharjo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Di Desa Muktiharjo, juga terdapat usaha kecil dan menengah lain seperti terdapatnya beberapa bengkel yang dibangun oleh warga setempat. Usaha ini dibangun kecil-kecilan

oleh masyarakat dengan beberapa spesifikasi barang yang diperbaiki seperti sepeda motor dan barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik ini juga terkadang dijual kembali dengan harga yang lebih murah apabila masih bisa digunakan. Untuk bengkel sepeda motor, letaknya menyebar yaitu di desa itu sendiri dan terkadang menyebar di sepanjang jalan raya yang memudahkan mereka untuk mendapatkan pelanggan. Berikut wawancara dengan Bapak Tono, salah satu pemilik bengkel sepeda motor di bawah ini:

“Iya mbak, memang usaha ini dibangun atas ketrampilan dan keahlian yang kita miliki. Sebelum ini kami nganggur dan tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki komdisi ekonomi keluarga. Lalu, kami mencoba keberuntungan untuk usaha bengkel ini. Hasilnya lumayan mbak untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Hal ini juga didukung dengan letak yang strategis dari usaha kami yang berada di pinggir jalan raya. Selain itu, saat ini juga kendaraan bermotor juga meningkat pesat jumlahnya. Ya, semoga usaha ini bermanfaat bagi kami ke depannya” (wawancara dengan Bapak Tono, salah satu pemilik bengkel sepeda motor, 27 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, di bengkel Bapak Tono).



Gambar 4. 9 Usaha bengkel di Desa Muktiharjo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Muktiharjo mempunyai potensi untuk dijadikan sentra berbagai usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan ada beberapa usaha yang dapat dikembangkan di desa ini seperti kripik singkong, jahit pakaian dan bengkel. Selain itu, usaha ini juga didukung pula dengan kondisi alam desa yang baik serta kualitas sumber daya manusianya yang berguna bagi pembangunan ekonomi desa.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal menuju Desa Tidak Tertinggal di Desa Muktiharjo

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang khususnya ekonomi. Pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi desa yang dulunya mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat diketahui melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun desa tertinggal di Desa Muktiharjo di bawah ini:

1) Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten merupakan pemerintahan yang diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Pemerintah

kabupaten atau yang disebut dengan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dalam pembangunan daerah tertinggal di Desa Muktiharjo, Kabupaten Pati merupakan aktor yang diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rokim di bawah ini:

“Setiap program pembangunan di desa ini merupakan kebijakan dari kabupaten mbak. Ya meskipun desa mempunyai otonomi sendiri, tapi tetap tidak boleh bertolak belakang dengan kebijakan di atasnya. Pemerintah kabupaten hanya sebagai perencana, fasilitator dan pengawas dari setiap pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Meskipun demikian, otonomi desa tetap mempunyai legalitas hukum yang terkadang dalam implementasinya kurang berjalan begitu baik. Peran pemerintah kabupaten disini juga sangat kami harapkan demi kelancaran pembangunan desa. Karena komunikasi yang terjalin di setiap level pemerintahan akan menghasilkan suatu pembangunan yang dapat berjalan secara berkesinambungan” (wawancara dengan Bapak Rokim, salah satu pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Muktiharjo).

Peran Pemerintah Kabupaten Pati selain menjalankan fungsi perencanaan, fasilitator dan pengawasan, juga mengadakan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan disini bukan berarti pembangunan yang dilakukan tidak berhenti pada suatu titik, namun dapat dilakukan secara terus menerus. Pada dasarnya, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai tiga fungsi utama yaitu mengatur, mengelola dan melindungi masyarakat. Dalam upaya menjalankan fungsi

tersebut, pemerintah mengadakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan di implementasikan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini agar masyarakat sebagai pihak yang dikenai kebijakan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Oleh sebab itu, semua kebijakan ini harus dilakukan secara berkesinambungan.

Di Desa Muktiharjo, program pemberdayaan ekonomi yang ada diupayakan untuk mempunyai program yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dari semua sektor yaitu pertanian/perkebunan, perikanan, UKM dan pariwisata. Program berkelanjutan ini sudah dituangkan dalam peraturan Kabupaten Pati untuk melakukan rencana pengembangan wilayah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Berikut wawancara dengan Bapak Suwandi:

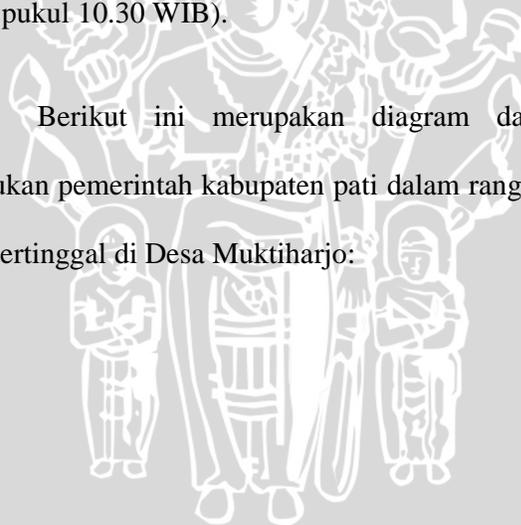
“Untuk program pembangunan berkelanjutan mbak, kita masih belum rencana. Namun, untuk yang ditingkat kabupaten sudah mempunyai peta pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah tersebut kan juga membutuhkan perhitungan dan penelitian yang matang juga mbak. Kan tidak bisa kita merencanakan program pembangunan dengan tanpa melihat kondisi nyata di lapangan. Program pengembangan potensi wilayah ini juga merupakan salah satu cara agar pembangunan yang dilakukan dapat terus berkesinambungan” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

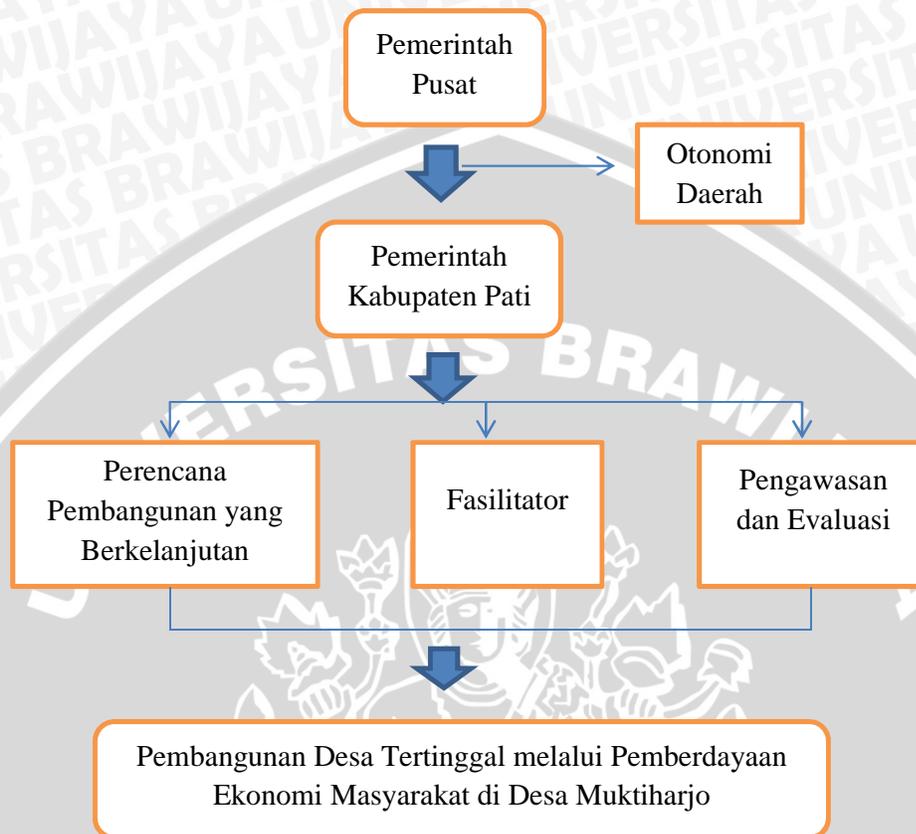
Pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat ini juga diperlukan agar program

pembangunan yang dilakukan tidak putus ditengah jalan dan memberikan dampak secara terus menerus. Hal ini seperti harapan dari Bapak Sudiman dari program pembangunan berkelanjutan ini:

“Sebagai masyarakat desa ini mbak, ya sewajarnya kita mengharapkan bahwa pembangunan ekonomi yang ada bisa dijalankan secara terus menerus dan berkesinambungan. Ya, kita tahu lah mbak, kebanyakan program pembangunan di negeri ini hanya bersifat jangka pendek dan hal ini kurang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Misalnya saja program pelatihan bagi petani, apabila tidak mempunyai program jangka panjang kedepan, proses pendidikan akan terputus. Mbak juga kan banyak melihat gedung-gedung yang mangkrak pembangunannya. Ya semoga pemberdayaan ekonomi yang ada di desa ini memberikan manfaat bagi kita” (wawancara dengan Bapak Sudiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 29 Maret 2014 pukul 10.30 WIB).

Berikut ini merupakan diagram dari upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten pati dalam rangka pembangunan desa tertinggal di Desa Muktiharjo:





Gambar 4. 10 Diagram upaya pemerintah Kabupaten pati dalam pembangunan desa tertinggal di Desa Muktiharjo
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara dan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pembangunan desa tertinggal di Desa Muktiharjo berkaitan erat dengan upaya dan peran dari pemerintah Kabupaten Pati. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pati mempunyai peran sebagai perencana pembangunan yang berkelanjutan, fasilitator serta pengawasan dan evaluasi. Hal ini disesuaikan pula dengan program dari pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan potensi Desa Muktiharjo yang meliputi

pengembangan sektor pertanian, perikanan, UKM dan pariwisata. Dengan adanya program berkelanjutan maka peningkatan ekonomi masyarakat desa dapat dilakukan. Karena selain dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, kebijakan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan pengawas juga dibutuhkan untuk program pembangunan yang baik.

2) Pemerintah Kecamatan

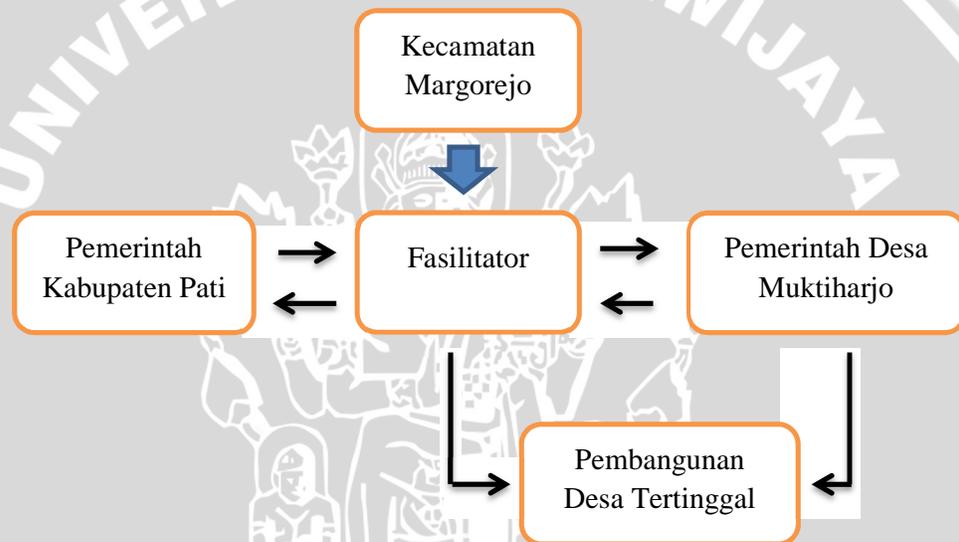
Pemerintah kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten guna memudahkan pemberian tugas kepada level pemerintah di bawahnya. Pemerintah kecamatan tidak mempunyai otonomi seperti pemerintah kabupaten. Adapun kewenangan kecamatan adalah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dalam pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo bertindak pula sebagai fasilitator antara pemerintah Kabupaten Pati dengan pemerintah Desa Muktiharjo. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Menegenai kewenangan dari kecamatan, dalam hal pembangunan desa di Desa Muktiharjo ini hanya merupakan fasilitator dari pemerintah kabupaten. Jadi, kalau ada masalah mengenai pembangunan, biasanya kami lapor dulu kepada pihak kecamatan, yang kemudian akan disampaikan ditingkat kabupaten. Selain itu, apabila kami membutuhkan sesuatu seperti pembangunan sarana dan prasarana atau penyaluran dana untuk pembangunan, harus

melalui kecamatan dulu. Sehingga disini kecamatan dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari kabupaten dalam mengawasi pembangunan yang ada di daerahnya” (wawancara dengan Bapak Suwandi, salah satu pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Muktiharjo).

Mengenai upaya yang dilakukan oleh kecamatan dalam pembangunan desa tertinggal dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



Gambar 4. 11 Upaya Kecamatan dalam Pembangunan Desa
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2014

Berdasarkan data dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan hanya mempunyai wewenang melaksanakan apa yang ditugaskan oleh bupati. Hal ini dikarenakan kecamatan tidak mempunyai otonomi. Sehingga, kecamatan merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah kabupaten mengawasi pembangunan setiap daerah

yang menjadi wilayahnya. Di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo hanya sebagai perantara untuk mempermudah akses dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.

3) Pemerintah Desa

Desa merupakan level pemerintahan terendah yang mempunyai otonomi sendiri untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing. Desa yang menjadi tolok ukur pembangunan di Indonesia, membutuhkan pembangunan yang dapat meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan, kebanyakan kondisi desa di Indonesia mengalami kemiskinan dan ketertinggalan. Seiring dengan dengan munculnya paradigma baru dalam pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat, maka pembangunan desa dimulai dari pemerintah desa yang menjadi tingkat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Di Desa Muktiharjo, upaya yang dilakukan pemerintah desa sebagai berikut:

- a. Menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Dalam pembangunan ekonomi desa ini masyarakat sebagai pihak yang dikenai kebijakan bertindak sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dari bawah, terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga pengambilan kebijakan

dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

Di Desa Muktiharjo, pembangunan aspirasi dari bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memberikan masukan dan dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi desa. Dari sektor pertanian dan perkebunan dapat ditunjukkan melalui beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah desa seperti permasalahan distribusi pupuk dan pengaturan irigasi. Awalnya, aspirasi mengenai permasalahan tersebut dari para petani. Para petani membuat suatu perkumpulan untuk membahas mengenai hasil pertanian mereka. Setelah itu mereka mengajukan usul dan pendapat mereka ini kepada pemerintah desa. Hal ini dikarenakan aktor pertama yang mengetahui kondisi pertanian di desa mereka adalah para petani itu sendiri bukan pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dulah:

“Mengenai permasalahan pertanian di desa ini mbak, kita, para petani sering mengadakan perkumpulan sendiri. Hal ini dikarenakan agar kita dapat bertukar pendapat mengenai pertanian atau bahkan perkebunan kita. Setelah itu baru kita sampaikan ke pemerintah desa. Misalnya ya mbak, untuk masalah distribusi pupuk kemarin, setelah kita sampaikan ke pejabat desa, akhirnya terdapat kebijakan baru mengenai pendistribusian pupuk ini kepada petani. Sehingga terdapat jadwal mengenai siapa yang mendapatkan pupuk. Selain itu, untuk masalah pengairan mbak, kita sering mengeluh kepada pejabat pengairan desa

mengenai jadwal irigasi dan antisipasi terhadap kekeringan. Namun, alhamdulillah mbak, keluhan kami direpson dan saat ini sedang direncanakan untuk dibuat sumur bor sebagai antisipasi musim kemarau” (wawancara dengan Bapak Dulah, salah satu petani padi di Desa Muktiharjo, 25 Maret 2014 pukul 14.00 WIB).

Dibidang perikanan yang merupakan potensi yang masih baru dikembangkan, masyarakat juga memberikan ide-idenya untuk pengembangan potensi ini. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk mengembangkan potensi perikanan ini harus didukung dengan sistem perairan yang baik, pemilihan dan pembelian bibit unggul serta perawatan ikan yang baik. Dalam pengembangannya, kelompok masyarakat yang mempunyai budidaya perikanan ini mempunyai strategi sendiri untuk mengelola perikananannya seperti sistem pengairan sungai yang mengalir kolam ikan mereka, penjadwalan sistem jaga untuk menjaga kolam mereka dari para pencuri, pembelian dan perawatan bibit unggul serta sistem penjualan hasil panen ikan. Namun, semua itu membutuhkan pendampingan dari pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat desa. Berikut wawancara dengan Bapak Sulaiman:

“Untuk pengembangan sektor perikanan ini mbak, para pemilik kolam ikan sering berkumpul untuk membicarakan mengenai permasalahan yang dihadapi. Sebagai sektor yang baru dibangun, kami juga masih menjajaki sektor ini. Namun, sejauh ini potensi perikanan ini juga menjanjikan mbak. Sekalipun terdapat beberapa kendala yang membutuhkan peran

pemerintah. Kendala tersebut seperti kemarin mbak, sungai yang mengalir kolam ikan kami tercemar limbah yang berasal dari pabrik. Sehingga masyarakat berswadaya untuk membuat perlindungan kolam ikan dari limbah tersebut. Ya, ke depannya, semoga sektor ini juga menjadi prioritas untuk pengembangan ekonomi desa kami mbak” (wawancara dengan Bapak Sulaiman, salah satu pemilik kolam ikan di Desa Muktiharjo, 27 Maret 2014 pukul 14.00 WIB).

Dibidang pariwisata juga ditunjukkan dengan masyarakat melalui swadaya mereka untuk tetap melestarikan peninggalan sejarah yang ada di desa mereka. Hal ini didukung pula dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang baik. Peningkatan potensi ekonomi disektor pariwisata ini membutuhkan kerjasama berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat bahkan swasta. Berdasarkan usulan dari warga desa setempat untuk melakukan perawatan dan promosi mengenai pariwisata yang ada di desa mereka, pemerintah desa akan membuat program mengenai fasilitas tambahan untuk menarik minat pengunjung. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukiman di bawah ini:

“Untuk pengembangan sektor pariwisata ini mbak, kami sudah mengusulkan kepada pemerintah desa untuk melakukan pemeliharaan dengan baik serta mempromosikan wisata ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Dan pemerintah desa juga sudah menyetujui hal tersebut yang kemudian akan diprogramkan untuk membangun sarana wisata lain untuk meningkatkan jumlah pengunjung di objek wisata ini. Ya, saya harap itu bukan hanya rencana semata mbak, namun dapat direalisasikan dengan segera” (wawancara dengan Bapak Sukiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 26 Maret 2014 pukul 16.00 WIB).

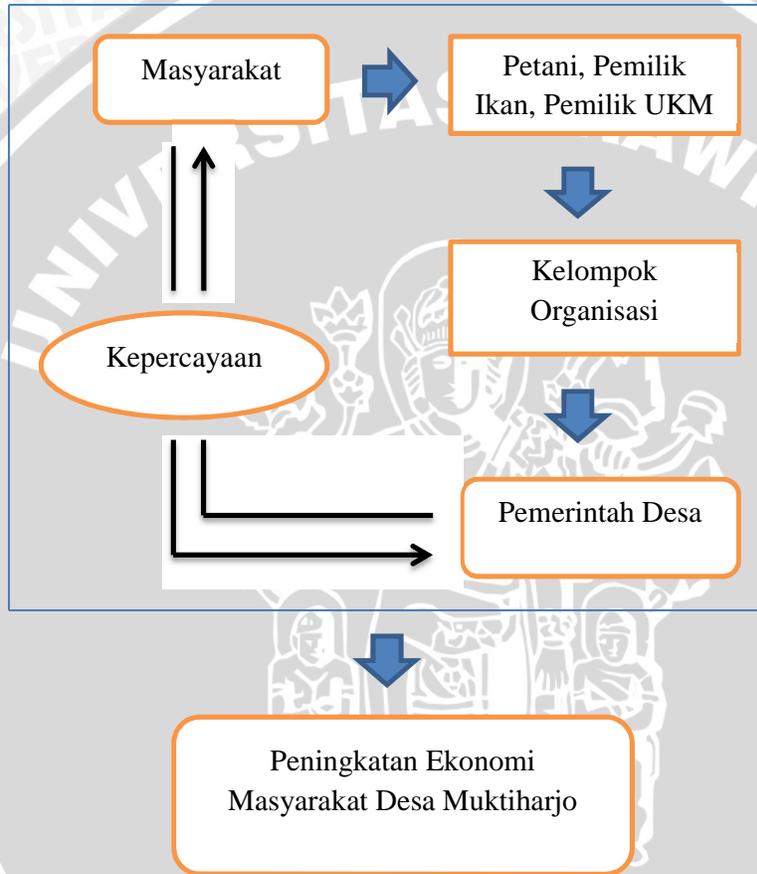
Di bidang usaha kecil dan menengah, masyarakat juga mengusulkan agar dibentuknya sentra industri kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan, agar proses distribusi penjualan komoditi masyarakat dapat meningkat. Dengan adanya usulan ini maka pemerintah desa mempunyai rancangan untuk membangun pasar desa yang berguna bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kelompok-kelompok usaha kecil ini juga memahami bahwa pengembangan usaha ini juga berguna untuk membuat mereka lebih mandiri terhadap kondisi ekonomi masing-masing.

Adanya dua arah komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat ini menjadi simbol interaksi yang bersifat horizontal. Berikut ini wawancara dengan Bapak Rokim mengenai konsep pembangunan dari bawah ini:

“Iya mbak, memang saat ini telah dikembangkan konsep mengenai pembangunan dari bawah. Maksudnya dari bawah disini itu ya masyarakat itu sendiri. Saya kira masyarakat desa ini sudah melalui sadar akan perannya dalam upaya pembangunan desa ini. Pengembangan potensi ekonomi desa seperti pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata masyarakatlah yang berkontribusi aktif mengenai ide-ide baru untuk memajukan sektor-sektor tersebut. Ya semoga ke depannya dapat dikembangkan lebih baik lagi lah mbak” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan data di atas, mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan cara atau metode untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam upaya

meningkatkan kehidupan mereka. Sehingga tidak selalu mereka menggantungkan dari kepada pemerintah. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4.12 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Konsep Pembangunan dari Bawah

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibutuhkan kemauan dari masyarakat untuk ikut

berkontribusi dalam upaya pembangunan desa, hal ini seperti yang dilakukan di Desa Muktiharjo dimana masyarakat membentuk kelompok organisasi untuk mengorganisir kepentingan mereka. Selain itu, di Desa Muktiharjo ini, pembangunan dari bawah untuk meningkatkan sektor pertanian/perkebunan, perikanan, UKM dan pariwisata antara masyarakat dan pemerintah terdapat rasa kepercayaan satu sama lain.

Sehingga dapat dipahami bahwa kepercayaan merupakan modal pokok dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepercayaan tersebut meliputi kepatuhan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini seperti patuhnya masyarakat Muktiharjo untuk membentuk kelompok usaha mereka. Selain itu, kepercayaan pemerintah kepada masyarakatnya juga dapat dilihat melalui keterbukaan pemerintah mengenai program-program pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, terdapat faktor yang menghambat kepercayaan, seperti sikap individualis dan banyaknya konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, dengan kepercayaan yang tinggi diharapkan dapat menciptakan suatu keterbukaan dalam kerjasama membangun ekonomi desa.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi desa.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek utama dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep dasar dari pemberdayaan itu sendiri adalah menciptakan iklim kemandirian dan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Selain itu, dengan tingginya partisipasi masyarakat mengindikasikan kesadaran akan pentingnya terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri.

Di Desa Muktiharjo, partisipasi masyarakat cukup baik. Dalam meningkatkan potensi ekonomi desa yang terdiri dari sektor pertanian/perkebunan, perikanan, UKM dan pariwisata, masyarakat secara aktif menambah pengetahuan dan kemampuan mereka. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat seperti kelompok tani, kelompok UKM dan kelompok pemilik kolam ikan. Di dalam kelompok-kelompok ini masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain mengenai kebutuhan dan kepentingan mereka. Apabila dihubungkan dengan upaya pembangunan desa, masyarakat juga aktif dalam mengikuti

musrenbangdes yaitu perencanaan pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rokim:

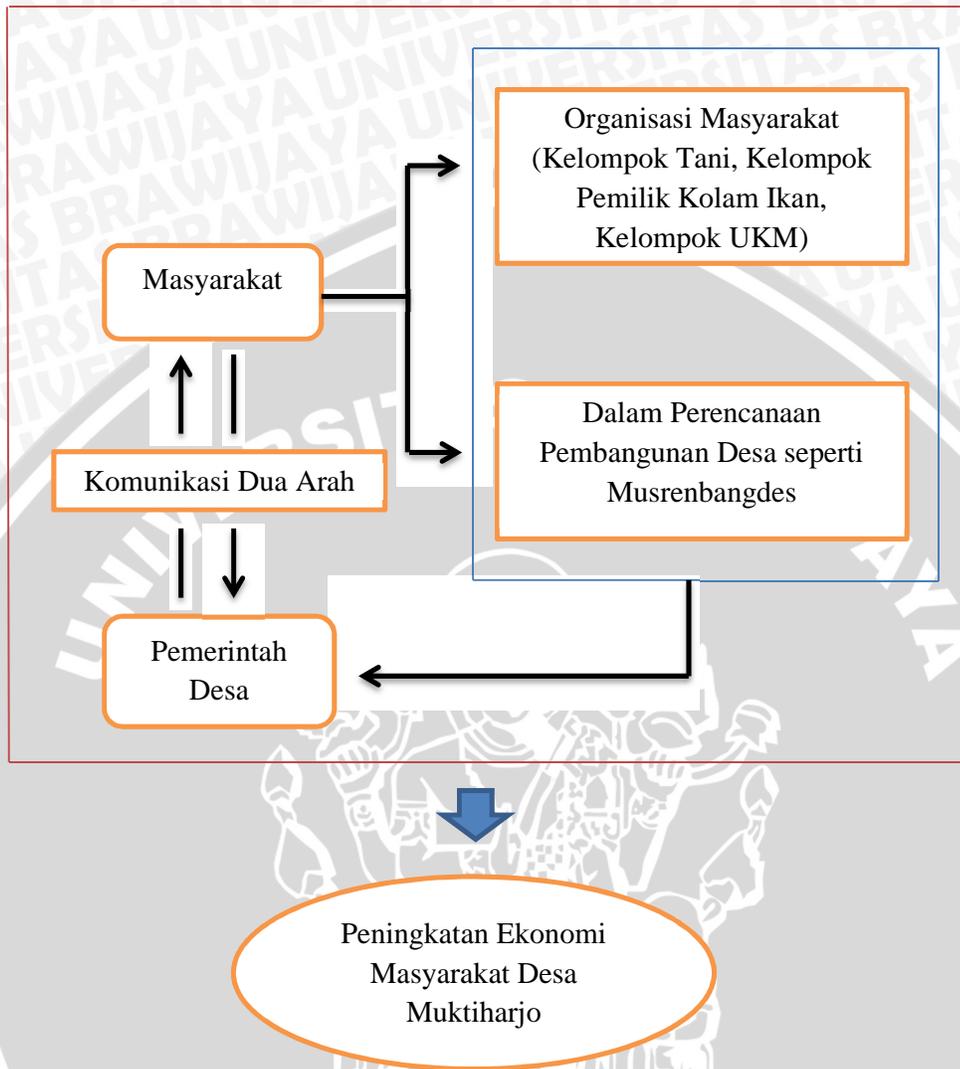
“Untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mbak, masyarakat kami sudah aktif mengikuti musyawarah-musyawarah tersebut. Meskipun, terjadinya keaktifan masyarakat ini bukan hal yang mudah. Sehingga membutuhkan suatu strategi yang mengundang masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam upaya pembangunan desa. Biasanya masyarakat aktif dalam acara musrenbangdes mbak. Dan saya kira itu modal yang bagus untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan keterlibatan tersebut kita bisa merencanakan program-program ekonomi terkait dengan pertanian/perkebunana, perikanan atau pariwisata dan langsung bertatap muka dengan masyarakat. Sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat tahu kebijakan apasaja yang ada di desa mereka untuk meningkatkan ekonomi desa” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Partisipasi masyarakat ini juga dapat dilihat dari peningkatan sektor-sektor yang berkontribusi dalam peningkatan kondisi ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Dari segi pendidikan, terjadi peningkatan angka lulusan dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari sektor kesehatan pun demikian, hal ini ditunjukkan dengan rutusnya masyarakat mengunjungi pos-pos kesehatan seperti posyandu untuk memeriksakan kesehatan mereka secara berkala. Partisipasi aktif ini terjadi karena terdapat program-program pelatihan yang mendorong kemauan dan pengetahuan mereka. Sehingga terjadi peningkatan kualitas kehidupan mereka. Dengan adanya partisipasi masyarakat dari sektor

pendidikan dan kesehatan ini pula maka kondisi ekonomi masyarakat juga dapat dikatakan meningkat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Danang di bawah ini:

“Untuk partisipasi masyarakat dari sektor pendidikan dan kesehatan di desa ini memang meningkat mbak. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dulu dimana kita susah untuk mengakses dua sektor tersebut. Untuk meningkatkan potensi ekonomi desa mbak, seperti dibidang pertanian, sekarang kita sudah tahu bagaimana untuk memilih bibit unggul, bagaimana melakukan irigasi yang baik bahkan dengan teknologi yang tepat guna. Sedangkan di sektor perikanan, kita juga tahu bagaimana untuk memasarkan produk keluar desa sehingga mendapatkan harga yang tinggi. Itu semua berkat pendidikan mbak” (wawancara dengan Bapak Danang, salah satu warga Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 12.00 WIB).

Peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dijadikan modal bagi pemerintah desa untuk berjalan bersama-sama dalam upaya pembangunan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan gambar mengenai partisipasi masyarakat di Desa Muktiharjo ini dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa:



Gambar 4.13 Partisipasi Masyarakat di Desa Muktiharjo

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Muktiharjo dapat diketahui melalui pembentukan organisasi-organisasi sosial seperti kelompok tani dan kelompok pemilik

kolam ikan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perencanaan pembangunan desa seperti rutin mengikuti musrenbangdes. Namun, juga terkadang partisipasi ini turun naik kualitasnya. Sehingga dengan adanya partisipasi aktif ini terjalin komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa.

Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan antara masyarakat dan aparat desa. Sinergitas yang tinggi antar aktor pembangunan ini menghasilkan suatu hubungan yang horizontal sehingga program yang baik sekalipun tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat maka tidak akan gunanya dalam proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi desa tertinggal dengan menggunakan pemberdayaan masyarakat ini.

- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan dari bawah (*bottom up*). Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat. Dibidang ekonomi, telah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di

desa. Di Desa Muktiharjo, program pemberdayaan ekonomi yang ada adalah program yang berasal dari pemerintah pusat dan berlaku secara nasional yaitu PNPM Mandiri. Dengan adanya program pemberdayaan tersebut, pembangunan infrastruktur desa, seperti: pembangunan sarana ekonomi seperti pasar dan pembangunan jalan dapat dilakukan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin juga sudah diterapkan di desa ini. Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan pembangunan “Dam” yang diperuntukan bagi pengairan sawah warga khususnya untuk mengantisipasi musim kemarau juga sudah diprogramkan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Rokim di bawah ini:

“Dalam proses pembangunan desa ini mbak, kami tidak mempunyai program khusus. Ya, jadi program pembangunan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berasal dari pemerintah pusat yaitu PNPM Mandiri. Jadi, kita tinggal melaksanakannya saja. Selain itu, juga terdapat program lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat disini yaitu bantuan untuk pembangunan dam sebagai antisipasi musim kemarau” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Untuk pemberdayaan ekonomi melalui program ini, beberapa program yang ada di Desa Muktiharjo adalah sebagai berikut:

1) Program pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan ini diadakan agar masyarakat mempunyai keahlian yang dapat dikembangkan. Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Di Desa Muktiharjo, program pendidikan dan pelatihan ini sangat mendukung peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan antara ekonomi dan pendidikan merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan. Rendahnya perekonomian di desa salah satunya adalah disebabkan pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan bahan mentah, distribusi barang, peningkatan produktivitas dan mengelola sumber keuangan.

Di sektor pertanian/perkebunan, adanya program pendidikan dan pelatihan ini, dirasakan oleh masyarakat Muktiharjo sebagai suntikan pendorong untuk meningkatkan kemampuan mereka mengolah sumber daya ekonomi. Para petani diberikan pelatihan mengenai cara mengolah lahan yang baik dimulai dari pemilihan bibit unggul sampai distribusi hasil pertanian. Selain itu, mereka juga diberikan bekal cara berorganisasi sehingga terbentuk kelompok-kelompok petani kecil. Tujuan dari pembentukan kelompok tani ini adalah untuk mengorganisir kepentingan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini seperti ketika ada masalah mengenai kelangkaan distribusi pupuk maka kelompok tani ini bisa memberikan solusi untuk membuat sebuah jadwal agar pemberian pupuk terjadwal secara merata dan adil.

Dari segi irigasi, dengan adanya program pendidikan dan pelatihan ini, masyarakat Desa Muktiharjo bisa membuat sebuah teknik pengairan dengan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa desa ini dialiri oleh beberapa sungai. Dimana sungai-sungai tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengiri sawah mereka. Sistem irigasi dengan sungai ini akan berlangsung baik

jika musim penghujan. Namun, dengan adanya pendidikan dari program ini, masyarakat diberi pengetahuan mengenai pembuatan sumur bor dalam untuk mengatasi datangnya musim kemarau. Sehingga, program pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu cara meningkatkan kemandirian masyarakat untuk belajar membuat solusi sendiri dari masalah yang ada di sekitar mereka. Selain itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pembangunan ekonomi.

Dari segi perikanan, adanya pendidikan dan pelatihan ini juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang budidaya ikan. Mereka dibekali dari usaha pemilihan bibit ikan sampai penjualan hasil panen. Semua itu dilakukan karena keterbatasan mereka dalam mengakses pendidikan pada masa dulu. Dari segi pariwisata pun demikian, masyarakat Desa Muktiharjo juga dibekali bagaimana cara menarik wisatawan untuk datang ke desa mereka.

Berikut wawancara dengan Bapak Sugiman di bawah ini:

“Memang mbak, pendidikan dan pelatihan ini penting bagi kami. Seperti yang mbak lihat, dulu, untuk mengenyam pendidikan saja seperti sebuah mimpi. Sehingga, dengan adanya penyuluhan mengenai berbagai macam bidang sangat membantu kami. Disana kami diberi berbagai macam materi baik dibidang pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata dan bidang lainnya”

(wawancara dengan Bapak Sugiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 13.00 WIB).

Dengan program pendidikan dan pelatihan ini pula, masyarakat dibekali ketrampilan dan keahlian seperti membuat kerajinan tangan. Sehingga juga menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Industri kecil menengah juga terdapat di desa ini seperti mayarakat yang mendirikan warung-warung makanan atau warung yang menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga telah berkembang usaha kecil seperti kripik singkong, jahit pakaian dan bengkel. Hal ini dikarenakan adanya program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat.

Sehingga tidak hanya laki-laki saja yang diberikan pelatihan disini, namun juga para perempuan atau ibu rumah tangga juga dididik untuk memiliki ketrampilan sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Di Desa Muktiharjo ini banyak pengangguran diusia produktif karena keterbatasan lapangan kerja serta mereka yang tidak mempunyai keahlian. Dan program ini akan sedikit membantu mereka dalam mengembangkan kondisi perekonomian wilayah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan. Dengan demikian sebenarnya bukan tidak ada motivasi untuk menerima pemberdayaan, namun yang diperlukan adalah pemberian contoh konkrit tentang keberhasilannya. Jadi, pemberdayaan tidak sebatas penyampaian ide, gagasan dan teknologi baru, tetapi dibutuhkan praktek di lapangan.

2) Program simpan pinjam

PNPM Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan ini diperuntukkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi harus dilihat juga bahwa apa yang mendasari terjadinya kemiskinan adalah tidak terdapatnya lapangan pekerjaan. Dan itulah yang seharusnya dicari solusinya terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dalam program PNPM Mandiri yang ada di Desa Muktiharjo, menitikberatkan pada upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa kendala utama untuk memajukan masyarakat desa adalah mengenai modal. Desa yang identik dengan sektor pertanian, tidak mempunyai daya upaya untuk mengembangkan bidang lainnya. Program PNPM Mandiri ini merupakan program yang memberikan masyarakat kesempatan untuk berusaha mengembangkan usahanya dengan bantuan dana dan menyediakan modal usaha bagi yang belum mempunyai pekerjaan.

Tujuan utama dari upaya pemberdayaan ekonomi ini adalah pemberian dana kepada masyarakat, namun tidak hanya sekedar pemberian saja tetapi juga bagaimana untuk memberikan hasil produksi yang maksimal dengan pemberian tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut dibentuklah koperasi simpan pinjam. Dimana di dalam koperasi tersebut, masyarakat tidak hanya mencari bantuan dana, tetapi juga diberikan pelatihan dan cara berorganisasi agar mereka dapat saling bertukar informasi.

Dengan adanya program simpan pinjam ini, meningkatkan pengetahuan masyarakat akan cara mengatur uang dan membuat perencanaan keuangan. Sehingga mereka bisa memperkirakan efisiensi dan

efektifitas dari setiap usaha yang mereka kerjakan. Di Desa Muktiharjo, kegiatan simpan pinjam ini juga dipakai sebagai wadah berkumpulnya masyarakat untuk berdiskusi masalah ekonomi. Sehingga selain dapat mempererat persaudaraan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi desa.

Berikut ini merupakan wawancara dengan Bapak Sugiman:

“Memang mbak, finansial merupakan modal utama dalam proses pembangunan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di desa ini mbak, untuk mengembangkan usaha, kita masih terbentur dengan terbatasnya modal. Dengan adanya program simpan pinjam ini, kita sedikit terbantulah mbak. Jadi, dalam program ini kita tidak hanya meminjam uang saja, tetapi juga diberi pengetahuan mengenai bagaimana untuk memutar modal tersebut dan membawa hasil. Selain itu, juga ada program seperti arisan dimana kita memberikan sejumlah uang secara rutin yang nantinya dapat diambil sesuai giliran. Pokoknya, dalam program ini kita dididik bagaimana cara untuk mengelola keuangan mbak” (wawancara dengan Bapak Sugiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 13.00 WIB).

Namun, dari segi teknis transparansi dana memang harus lebih diperhatikan karena masalah dana merupakan masalah yang sangat krusial. Dari segi prioritas kebijakan ini memang diprioritaskan karena masalah utama bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang adalah masalah kemiskinan. Selain itu PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud

kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3) Program pembangunan sarana dan prasarana

Program pembangunan sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo. Seperti yang telah diketahui bahwa selain modal, pendukung dari berhasilnya suatu program pembangunan adalah adanya sarana dan prasarana yang baik. Di Desa Muktiharjo, program pembangunan sarana dan prasarana ini mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Banyak pembangunan yang dapat mendorong meningkatnya perekonomian desa ini seperti perbaikan jalan yang mempermudah masyarakat untuk melakukan distribusi barang serta melakukan kegiatan ekonomi antar wilayah di luar desa. Selain itu, pembangunan sarana pendukung lain seperti sarana kesehatan dan pendidikan juga dilakukan di desa ini. Hal ini terbukti juga dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

Di sektor pertanian, pembangunan sarana irigasi juga sudah dapat dijalankan. Hal ini untuk mendukung masyarakat dalam mengelola tanaman pertanian.

Pembangunan dibidang irigasi dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 4.14 Dam Air di Desa Muktiharjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

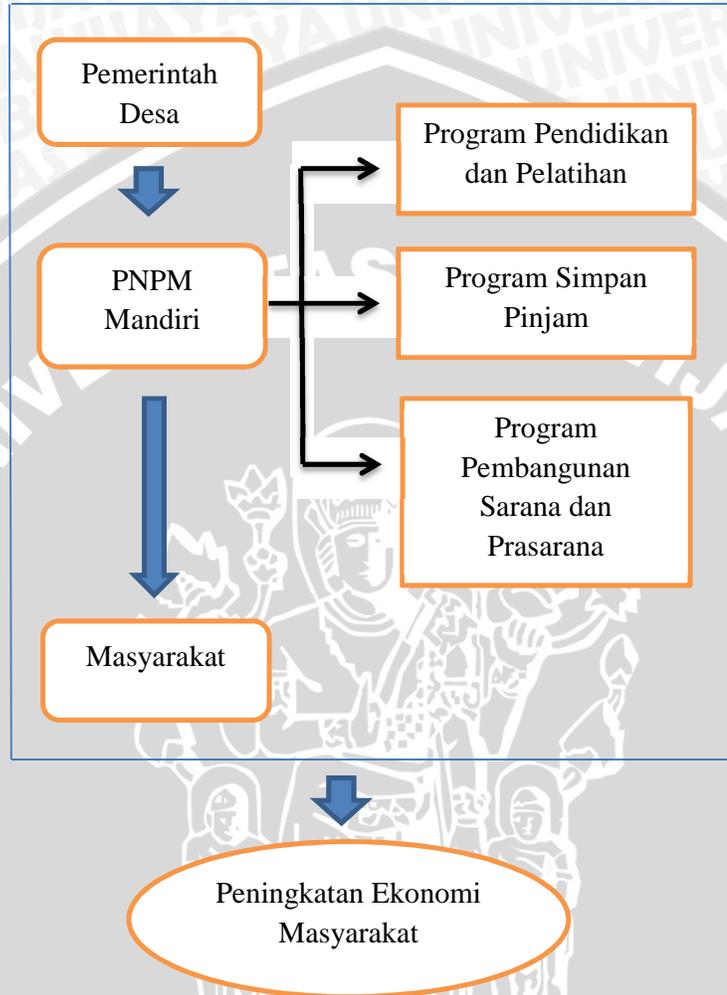


Gambar 4.15 Saluran Irigasi di Sawah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2014

Dengan melihat program-program pemberdayaan ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo, dapat diketahui bahwa program pemberdayaan sangat membantu masyarakat.

Berikut ini merupakan gambar mengenai proses pemberdayaan yang terjadi:



Gambar 4.16 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Muktiharjo

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo berasal dari program PNPM Mandiri yang

mempunyai tiga program yaitu program pendidikan dan pelatihan, program simpan pinjam dan program pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi ini, peningkatan kondisi ekonomi desa dapat diperbaiki secara perlahan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dan wawancara mengenai pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembangunan ekonomi desa membutuhkan penggalan potensi yang bisa dimanfaatkan bagi peningkatan ekonomi desa. Di Desa Muktiharjo, potensi ekonomi ini dapat dilihat dari sektor pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata dan usaha kecil menengah. Dengan melihat adanya potensi ini, maka kemudian pemerintah dapat mengambil tindakan atau upaya pembangunan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing. Dalam hal ini dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa merupakan aktor kunci dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program pembangunan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo Menuju Desa Tidak Tertinggal

Dalam melakukan pembangunan desa ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Alam yang Melimpah

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dalam merencanakan sebuah pembangunan. Sumber daya alam yang dimiliki satu daerah akan berbeda dengan daerah lain sehingga membutuhkan strategi pengembangan dan pemanfaatan yang berbeda pula. Desa Muktiharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Margorejo yang mempunyai bentang alam berupa lahan pertanian/perkebunan yang melimpah. Selain itu kondisi geografis yang dilalui beberapa sungai menyebabkan desa ini mempunyai potensi pula dibidang perikanan.

Dengan kondisi tanah yang subur, menyebabkan berbagai tanaman dapat dihasilkan dengan baik di desa ini. Komoditas tebu yang merupakan produksi unggulan desa mampu meningkatkan ekonomi desa melalui pertanian. Selain itu juga terdapat produksi kapuk yang meningkatkan pertukaran barang dan uang antara Desa Muktiharjo dengan desa lain. Hasil pertanian lainnya seperti kacang tanah juga mendapat pertimbangan ekonomi yang tinggi, hal ini karena terdapat dua pabrik makanan ringan yaitu Kacang Garuda dan Dua Kelinci. Pemanfaatan potensi alam yang sedang dalam proses perkembangan ini juga dilakukan melalui bidang perikanan. Perikanan yang dimaksud adalah perikanan air tawar seperti

bandeng, mujair dan gurami. Berikut ini wawancara dengan Bapak Rokim:

“Sebenarnya mbak, kalau dari segi sumber daya alam memang potensi desa ini berada disektor pertanian/perkebunan. Wilayah kita berada di dataran rendah, tidak di pegunungan atau wilayah pesisir. Sehingga segi pertanian inilah yang sedang kita genjot untuk meningkatkan perekonomian desa. Seperti yang mbak tahu bahwa desa itu kan identik dengan pertanian. Sebagian besar masyarakat desa hidup bergantung pada alam. Jadi, kalau orang kota beranggapan bahwa desalah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah memang benar” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Sumber daya alam yang melimpah merupakan faktor yang dimiliki Desa Muktiharjo dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut ini pernyataan dari Bapak Sudiman:

“Menurut saya ya mbak, memang dari dulu sampai sekarang, potensi sumber daya alam yang besar adalah di desa. Dan potensi tersebut lebih banyak dari sektor pertanian. Hal itu pula yang dimiliki oleh Desa Muktiharjo ini. Sektor pertanian menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami” (wawancara dengan Bapak Sudiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 29 Maret 2014 pukul 10.30 WIB).

Sumber daya alam yang melimpah ini apabila dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sebaliknya apabila pemanfaatan dilakukan dengan cara merusak alam maka yang dihasilkan adalah bencana. Sehingga hal ini tergantung pada bagaimana untuk memanfaatkan potensi ini sesuai dengan porsinya. Karena biasanya antara

lingkungan dan ekonomi mempunyai hasil yang berbanding terbalik.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang melimpah dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Muktiharjo. Sumber daya alam yang terdapat di desa ini berupa lahan pertanian yang luas. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di dataran rendah. Sehingga untuk memanfaatkan potensi alam ini, dibutuhkan komitmen yang kuat diantara para aktor pembangunan.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia adalah aktor yang menjalankan pembangunan. Dalam upaya pembangunan ekonomi desa, sumber daya manusia merupakan sumber daya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Desa Muktiharjo adalah desa yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan penduduk dapat digunakan sebagai aset yang dapat meningkatkan pembangunan.

Selain itu, banyaknya jumlah penduduk di Desa Muktiharjo juga dipengaruhi oleh letak desa yang strategis sehingga memudahkan orang untuk keluar masuk desa ini.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Suwandi mengenai jumlah penduduk ini:

“Memang benar mbak, desa ini merupakan desa yang mempunyai banyak penduduk. Pertambahan penduduk selain dari kelahiran juga dari migrasi penduduk. Namun, banyaknya penduduk ini kurang menghasilkan produktivitas yang baik sehingga menghasilkan pengangguran. Dampaknya adalah pada beban anggaran desa yang menyebabkan proses pembangunan terhambat akibat terbatasnya dana” (wawancara dengan Bapak Suwandi 2014, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Seperti yang telah diketahui bahwa banyaknya jumlah penduduk ini selain dapat dimanfaatkan sebagai modal manusia untuk pembangunan, tapi juga dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Sehingga pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia juga membutuhkan penanganan khusus agar pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak terhambat. Pembangunan ekonomi yang terhambat ini adalah akibat sumber daya manusia yang tidak produktif sehingga dana yang akan digunakan untuk pembangunan desa harus digunakan untuk kebutuhan tenaga kerja ini. Sehingga hanya menambah masalah yang harus dicarikan solusinya. Maka pemerintah desa harus membuat angka prioritas untuk pembangunan bidang yang urgen. Berikut ini data mengenai jumlah penduduk di desa ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	348	403	751
2	5-9	489	568	1057
3	10-14	446	456	902
4	15-19	412	521	933
5	20-24	408	520	928
6	25-29	522	592	1114
7	30-39	661	676	1338
8	40-49	697	810	1507
9	50-59	473	652	1115
10	60-	236	274	510
Jumlah		4698	5457	10155

Sumber: Monografi Desa Muktiharjo, 2013

Dalam upaya pembangunan ekonomi di Desa Muktiharjo ini, banyaknya jumlah penduduk juga diimbangi dengan peningkatan pada sektor pendidikan. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Desa Muktiharjo. Berikut penuturan dari Bapak Rokim:

“Desa kami memang mempunyai penduduk yang besar mbak. Jumlah penduduk yang besar ini apabila bisa dimanfaatkan dengan baik akan mendatangkan keuntungan tapi apabila tidak bisa akan menimbulkan kerugian. Tapi alhamdulillah mbak, banyaknya jumlah penduduk saat ini juga dibarengi dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai potensi dan kemampuan untuk dikembangkan. Meskipun selain dari pendidikan, cara untuk memberikan bekal pelatihan masyarakat disini masih dalam proses perencanaan. Selain itu, juga masih ada masyarakat yang menganggur” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Peningkatan kondisi pendidikan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di Desa Muktiharjo ini juga dapat dilihat dari tabel jumlah lulusan dari setiap level pendidikan berikut ini:

Tabel 4.4
Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi 5 Tahun Ke Atas)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan Akademi, Perguruan Tinggi	1084
2	Tamatan SLTA	3585
3	Tamatan SLTP	1015
4	Tamatan SD	1010
5	Tidak Tamat SD	635
6	Belum Tamat SD	1424
7	Tidak Sekolah	604
Jumlah		9384

Sumber: Monografi Desa Muktiharjo, 2013

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi sumber daya manusia, Desa Muktiharjo mempunyai penduduk yang banyak. Besarnya jumlah ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi desa apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Di Desa Muktiharjo ini kualitas sumber daya manusia juga meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini juga didukung dengan adanya program pemberdayaan dari pemerintah yang memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat baik itu disektor

pertanian/perkebunan, perikanan, pariwisata atau bahkan perdagangan.

3) Globalisasi

Globalisasi adalah suatu era dimana arus teknologi informasi sudah melampaui batas antar negara. Selain itu, dampak dengan adanya globalisasi menjangkau ke berbagai bidang khususnya ekonomi. Namun, dampak globalisasi apabila dimaknai secara positif akan berdampak keuntungan tetapi sebaliknya apabila dimaknai secara negatif akan berdampak pada kerugian. Dampak dari arus globalisasi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja namun sudah menjangkau sampai ke desa.

Di Desa Muktiharjo, globalisasi ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi desa yang sedang berlangsung. Hal yang tampak nyata adalah dalam bidang pertanian. Saat ini untuk memupuk tanaman para petani tidak menggunakan pupuk dari alam tetapi menggunakan pupuk kimia. Selain itu, pengendalian hama tidak dikontrol melalui ekosistem atau predator alami tetapi dari racun kimia. Pengolahan sawah pun tidak dilakukan oleh hewan atau manusia melainkan dengan mesin seperti traktor. Tujuannya dari peralihan sistem tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Namun, dibalik itu, terdapat juga pengaruh negatif dari globalisasi bagi pembangunan desa yaitu terjadinya urbanisasi. Dengan terjadinya urbanisasi maka desa ditinggal oleh

masyarakatnya sehingga pembangunan tersendat. Lahan pertanian pun berkurang karena diganti dengan pembangunan pabrik-pabrik yang lebih modern. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi kondisi perekonomian desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rokim di bawah ini:

“Kita tidak bisa menolak atau menghindari dari adanya proses globalisasi ini mbak. Semua tahu bahwa globalisasi ini memudahkan batas antar negara. Terhadap kondisi perekonomian desa ini, globalisasi mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya mungkin terasa pada sektor pertanian dengan penggunaan alat-alat yang serba modern dan zat-zat kimia untuk meningkatkan produktivitas. Namun, terdapat sisi negatif dari adanya globalisasi ini mbak yaitu banyaknya produk impor yang masuk ke desa kita. Oleh sebab itu, saya akan membuat sektor UKM di desa ini bisa bertahan apalagi bersaing dengan produk impor karena apabila tidak kita lindungi bisa mati usaha mikro ekonomi rakyat.” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Perkembangan globalisasi ini juga memberikan dampak negatif lainnya yaitu persaingan yang ketat antara hasil produksi dalam negeri dan luar negeri. Bagaimana tidak, di kota pembangunan mal atau pasar modern bisa mengalahkan daya jual dari produksi yang berasal dari desa. Padahal desa masih dalam tahap pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi kecil seperti UKM yang belum bisa bersaing kuat dengan produk impor. Sehingga desa dituntut untuk memanfaatkan potensi ekonomi desa yang bersaing dengan kondisi ekonomi kota. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sudiman:

“Mengenai apa itu arus globalisasi mbak, kita orang desa tidak banyak yang mengetahui mbak. Ya pokoknya yang kita paham bahwa produk-produk dari luar negeri banyak yang masuk ke desa kita. Sehingga terkadang produk olahan kita kalah bersaing dengan mereka baik dari segi kualitas maupun biaya. Dengan kondisi ini mungkin pemerintah bisa melindungi dan memberikan pengawasan agar kondisi ekonomi kami rakyat desa tidak terpuruk. Seperti misalnya mbak, dari sektor pertanian, hasil tebu desa kami kemarin mendapat harga yang turun drastis. Hal ini akibat impor berlebihan yang dilakukan pemerintah” (wawancara dengan Bapak Sudiman, salah satu warga Desa Muktiharjo, 29 Maret 2014 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi di Desa Muktiharjo. Pengaruh tersebut mulai dari sistem perdagangan dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti dana dan sumber daya manusia. Sehingga, globalisasi adalah bagaimana kita menyikapi sebuah era dengan pudarnya batas antar negara.

4) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi ini juga dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Kemajuan teknologi ini dapat terjadi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi dan informasi. Di Desa Muktiharjo, perkembangan teknologi ini ikut mempengaruhi pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari sektor pertanian, adanya penerapan teknologi tepat guna untuk sumur bor. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi, masyarakat juga dapat dengan mudah untuk

mengakses perkembangan sistem bertani, mengelola ikan atau bahkan mendirikan sebuah usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Kemajuan teknologi informasi ini memang sudah merambah desa ini mbak. Hal ini berbeda dengan kondisi dulu yang syarat dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi ini masyarakat banyak terbantu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna, sistem perdagangan dan pengelolaan keuangan, semua diberikan oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini. Sehingga sejauh mana kita memanfaatkan teknologi ini, tentunya akan berdampak baik pula pada perkembangan ekonomi desa” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Kemajuan dibidang teknologi ini juga mendapatkan respon positif bagi masyarakat Desa Muktiharjo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali di bawah ini:

“Untuk masalah kemajuan teknologi ini memang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian kita mbak. Dengan adanya perkembangan teknologi baik informasi maupun teknologi dibidang lain, memberikan pengetahuan kepada kita mengenai bagaimana untuk meningkatkan potensi ekonomi desa yang ada. Dibidang pertanian misalnya kita diberi pengetahuan untuk mengelola sawah dengan teknologi modern dan bagaimana memasarkan hasil produksi. Dibidang perikanan kita diberi teknologi untuk memelihara ikan dengan baik agar ikan yang dihasilkan memberikan hasil yang memuaskan. Dibidang pariwisata kita juga mengerti bagaimana untuk memasarkan objek wisata melalui online sehingga mendatangkan banyak wisatawan” (wawancara dengan Bapak Ali, salah satu warga Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi sebagai dampak dari arus globalisasi juga

memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian di Desa Muktiharjo. Namun, kemajuan teknologi yang ada tergantung bagaimana memanfaatkannya. Masyarakat Desa Muktiharjo sudah menyadari dan memahami kemajuan teknologi ini sebagai sarana bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan hasil produksi mereka dalam mengolah potensi desa mereka seperti pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Dana

Dana merupakan faktor penting dalam upaya melaksanakan pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, ketersediaan dana ini penting untuk usaha produksi dan distribusi barang sehingga dapat mencapai produktivitas yang diinginkan. Selain itu, dana merupakan pendukung dari terlaksananya suatu program pembangunan. Di Desa Muktiharjo, keterbatasan modal ini menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa ketersediaan dana dapat mendukung atau menghambat pembangunan. Kondisi keterbatasan dana yang ada di Desa Muktiharjo mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Berikut penuturan dari Bapak Rokim:

“Kalau masalah dana itu sensitif mbak. Hal ini kenapa, karena dana ini menjadi acuan berhasil atau gagalnya suatu pembangunan. Di desa ini memang kami mengalami keterbatasan dana mbak, sehingga dana yang tersedia hanya

berasal dari anggaran desa saja. Sedangkan ketersediaan dana tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa yang besar. Selain itu mbak, dana yang cukup apabila tidak diimbangi dengan adanya transparansi juga dapat mempengaruhi suatu pembangunan. Jadi, kami tekankan disini bahwa ketersediaan dana akan membuat pembangunan desa berhasil apabila terdapat transparansi dalam penggunaan dan pengawasan dari berbagai pihak” (wawancara dengan Bapak Rokim, pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain karena banyaknya jumlah penduduk di Desa Muktiharjo, putaran modal yang ada di desa tidak dapat berkembang. Seperti yang telah diketahui bahwa desa merupakan lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Namun, karena dana untuk menyokong perkembangan ekonomi desa terbatas sehingga pembangunan menjadi stagnan. Di Desa Muktiharjo ini, sumber keuangan untuk pembangunan hanya berasal dari bantuan pemerintah dan anggaran desa. Hal itu juga rentan terhadap penyelewengan dana oleh pejabat setempat, sehingga pembangunan menjadi tersendat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Memang mbak, masalah penyelewengan dana juga berpotensi dilakukan bahkan pada level pemerintahan terendah seperti desa. Namun, kita juga berusaha melakukan pengawasan untuk hal ini. Dan mengenai keterbatasan dana pembangunan yang ada di desa ini kami juga terus menggali potensi desa yang dapat dijadikan sumber ekonomi. Selain itu, adanya program pemberdayaan dari pemerintah pusat seperti adanya simpan pinjam juga membantu kami untuk mengatasi masalah keuangan ini. Sehingga kami disini juga berusaha untuk mandiri dan kreatif dalam meningkatkan ekonomi desa” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dana merupakan modal pokok dalam melaksanakan suatu pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Di Desa Muktiharjo, permasalahan dana menjadi masalah krusial. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan prioritas. Sumber pendanaan yang tersedia di desa ini juga hanya bersumber dari anggaran pemerintah desa. Sehingga untuk meningkatkan sumber keuangan ini, pemanfaatan sumber ekonomi desa terus dikembangkan. Selain itu, dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai ekonomi. Sehingga tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dijadikan tambahan dana bagi pembangunan ekonomi di Desa Muktiharjo.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kegiatan Ekonomi

Sarana dan prasarana merupakan syarat yang harus tersedia dalam melakukan pembangunan khususnya untuk desa tertinggal. Pembangunan sarana dan prasarana ini harus dijadikan prioritas karena menjadi akses dalam melakukan berbagai aktivitas seperti dalam bidang ekonomi. Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi

(seperti jalan raya dan jembatan) dan sarana transportasi (seperti mobil dan sepeda motor). Ketersediaan parasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan.

Di Desa Muktiharjo, ketersediaan sarana dan prasarana ini merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase dan fasilitas publik lain seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sudah tersedia. Namun, dalam pengembangannya masih membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan sia-sia. Sehingga pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk memelihara dan merawat infrastruktur yang ada.

Berdasarkan temuan lapangan, Desa Muktiharjo yang terletak di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dari sisi ketersediaan transportasi, desa ini telah terhubung dengan desa disekitarnya, dengan jalan aspal, namun dalam kondisi kurang baik. Transportasi utama penduduk desa ini, baik antar desa maupun ke kecamatan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat. Berikut kondisi jalan yang sudah diperbaiki di Desa Muktiharjo:



Gambar 4.17 Kondisi Jalan yang Ada di Desa Muktiharjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain sudah dibangunnya jalan sebagai penghubung antar desa, untuk meningkatkan kondisi ekonomi, di Desa Muktiharjo juga direncanakan akan ada pembangunan pasar desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suwandi di bawah ini:

“Begini mbak, untuk rencana pembangunan di desa ini, terdapat program dari pemerintah desa mengenai akan dibangunnya pasar desa. Rencan ini juga sudah dimusyawarahkan dengan pemerintah dan masyarakat desa ini. Selain itu, juga sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten. Namun, untuk pelaksanaannya, kita masih menunggu perintah dari pihak kabupaten yang nantinya akan ada kesinambungan atau sinergi antara pelaku pembangunan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat” (wawancara dengan Bapak Suwandi, pejabat desa Muktiharjo bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, di kantor desa Muktiharjo).

Dengan adanya pembangunan pasar desa tersebut, kegiatan ekonomi desa akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak akan susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selain itu,

akses untuk menjual hasil pertanian maupun perikanan juga semakin dekat dengan pembeli. Sehingga perputaran modal tidak hanya dalam lingkup desa saja tetapi menyebar ke daerah lain. Rencana pembangunan pasar desa ini juga disambut baik oleh masyarakat desa Muktiharjo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Umi di bawah ini:

“Iya mbak, saya dengar juga terdapat rencana untuk pembangunan pasar desa di desa ini. Kami setuju saja mbak asalkan dapat membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian kami. Dengan adanya pasar desa kan kita dekat apabila membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kita juga mudah membawa hasil pertanian kami ke penjual atau pembeli lain. Hal itu akan jauh lebih mahal biaya trasportasinya apabila kita harus menjual hasil pertanian ke kota mbak” (wawancara dengan Ibu Umi, salah satu warga Desa Muktiharjo, 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan data dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi infrastruktur di Desa Muktiharjo sudah mengalami pembangunan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pembangunan jalan, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan bahkan direncanakan akan adanya pasar desa. Pembangunan infrastruktur tersebut mengindikasikan komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembangunan ekonomi desa.

3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan aspek utama dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep dasar dari pemberdayaan itu sendiri adalah menciptakan iklim

kemandirian dan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat akan menentukan efektif tidaknya pembangunan yang sedang dijalankan.

Di Desa Muktiharjo, partisipasi masyarakat dirasakan kurang. Hal ini dapat diketahui dari masih kurangnya masyarakat dalam musyawarah-musyawarah yang membahas mengenai pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rokim di bawah ini:

“Untuk masalah partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa mbak, saya rasa masih kurang. Ya, sebagian memang ada yang aktif, tapi yang tidak aktif juga banyak mbak. Mereka yang tidak aktif hanya pasrah saja terhadap wakilnya di pemerintahan tanpa ingin memberikan pendapatnya untuk kepentingan umum. Dalam rangka pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi ini, masyarakat diwajibkan untuk andil dalam melaksanakan pembangunan. Sampai saat ini masih kita pikirkan mbak ke depannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini” (wawancara dengan Bapak Rokim, salah satu pejabat desa bagian pembangunan desa, 28 Maret 2014 pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Muktiharjo).

Pendapat di atas, senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di bawah ini:

“Iya mbak, memang partisipasi masyarakat di desa ini masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Ya mungkin karena banyak faktor mbak, seperti sosialisasi yang kurang dan kemauan masyarakat yang masih rendah. Program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini sudah coba kami rancang seperti penerapan motivasi bahwa partisipasi aktif ini dapat mendorong kemauan dan pengetahuan mereka. Sehingga terjadi peningkatan kualitas kehidupan

mereka. Selain itu, juga berusaha untuk menjaga hubungan antar masyarakat agar tidak terjadi disintegrasi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat” (wawancara dengan Bapak Suwandi, salah satu pejabat desa bagian hubungan masyarakat, 28 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, di Kantor Desa Muktiharjo).

Dari data dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa tertinggal di Desa Muktiharjo melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Faktor pendukung yang mempengaruhi meliputi sumber daya alam dan manusia yang baik, globalisasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi pembangunan meliputi keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat. Pengidentifikasian faktor-faktor ini penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tercapai hasil yang maksimal.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal

a. Potensi Ekonomi yang Dimiliki Desa Muktiharjo

Potensi ekonomi desa merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan, potensi ekonomi ini penting sebagai faktor utama yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengembangan

perekonomian tersebut. Menurut Beratha (1982:104) “potensi desa sebenarnya adalah meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi baik yang sudah berwujud, maupun yang belum berwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya”. Jadi, potensi-potensi inilah sebenarnya yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dalam arti luas. Seperti yang telah diketahui bahwa pada dasarnya hambatan-hambatan pokok masyarakat desa adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau bahkan melakukan pembangunan desa apabila tidak mengetahui potensi apa yang ada di desa mereka. Oleh sebab itu, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan penggalian, mengusahakan serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada dilingkungan desanya.

Menurut Beratha (1982:105-108), potensi desa dibagi menjadi dua bagian yang besar yaitu:

1. Potensi fisik alam, meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Air
 - c. Iklim dan angin
 - d. Tenaga kerja
2. Potensi non fisik, meliputi:
 - a. Masyarakat itu sendiri

- b. Lembaga-lembaga yang ada di desa
- c. Perangkat pamong desa

Di Desa Muktiharjo, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan adalah dibidang pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata. Dari masing-masing bidang tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1) **Pertanian/Perkebunan**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan desa. Bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia hidup bergantung pada desa. Desa mempunyai sumber daya alam yang melimpah tidak terkecuali dari sektor pertanian. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris. Semua pemenuhan kebutuhan bersumber pada hasil produksi pertanian. Bahkan pada masa Orde Baru, Indonesia adalah negara swasembada beras. Melihat kondisi yang seperti ini dapat dinyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam bidang pertanian apabila bisa dimanfaatkan dengan baik.

Di Desa Muktiharjo, bidang pertanian ini juga merupakan potensi unggulan untuk meningkatkan kondisi perekonomian desa. Apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, desa ini dapat dijadikan sentra penghasil tebu. Produksi lain juga tidak kalah dalam menyokong perekonomian desa seperti kapuk, padi, jagung, kacang tanah, sayur-sayuran dan buah-

buah. Mata pencaharian masyarakat di Desa Muktiharjo pun sebagian adalah petani. Meskipun mereka ada yang mempunyai sawah sendiri atau hanya menjadi buruh tani.

Potensi tanah pertanian yang subur ini merupakan sumber potensi yang sangat penting bagi masyarakat desa. Karena tanah bagi masyarakat desa adalah sumber dan tempat tumpuhan penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat desa pada umumnya. Dengan tanah pertanian mereka dapat menghasilkan tanaman bahan makanan, bahan perdagangan dan kebutuhan lainnya. Maka dapat dibayangkan bagi desa-desa yang sebagian besar masih bersifat agraris, dimana petani sangat tergantung pada kesuburan tanah ini. Kemudian tanah juga merupakan potensi-potensi yang tergantung di dalam tanah seperti bahan tambang, mineral, gas bumi, sumber panas dan lain-lain.

Selain itu, untuk mendukung sektor pertanian ini, desa juga mempunyai potensi dari iklim dan angin. Keduanya dapat berperan penting bagi desa khususnya daerah yang beriklim agraris. Dengan potensi desa angin misalnya akan bisa dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak, sebagai penggerak kincir angin untuk keperluan pengairan, bagi desa-desa pertanian potensi iklim sangat berpengaruh, kapan mereka harus menanam tanaman yang semuanya dengan memperhatikan potensi dari iklim.

2) Perikanan

Dari sektor perikanan, tidak semua desa mempunyai potensi dibidang ini. Hal ini dikarenakan perikanan juga tergantung pada kondisi geografis desa apakah sesuai dengan pengembangan perikanan ini. Indonesia selain sebagai negara agraris juga merupakan negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga tidak mengherankan apabila sektor perikanan juga merupakan potensi unggulan dalam meningkatkan ekonomi nasional.

Di Desa Muktiharjo, sektor perikanan ini merupakan bidang yang baru dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Hal ini setelah diketahui bahwa desa ini juga berpotensi dibidang perikanan karena dilalui oleh beberapa sungai. Perikanan yang dikembangkan di desa bukanlah perikanan seperti yang ada di pesisir pantai namun perikanan ikan air tawar dengan sistem kolam atau tambak. Ikan yang dihasilkan juga bermacam-macam seperti bandeng, lele, mujair atau gurami.

3) Pariwisata

Dalam pengembangan dari sektor pariwisata ini, setiap desa tidak akan beruntung mempunyai objek wisata yang dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi. Indonesia mempunyai berbagai macam objek wisata baik yang terbentuk

secara alami maupun buatan. Selain itu, banyaknya wisata ini terdiri dari wisata alam maupun wisata sejarah. Peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata ini dapat dihasilkan melalui pengunjung yang datang, selain untuk tujuan memberikan hiburan juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai suatu objek wisata tertentu.

Di Desa Muktiharjo, terdapat satu objek wisata yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ekonomi desa yaitu gapura majapahit. Objek wisata ini merupakan peninggalan dari kerajaan yang pernah berdiri di desa ini. Namun, pengunjung yang datang tidak sebanyak seperti objek wisata lain yang ada di Kabupaten Pati. Dalam meningkatkan kualitas wisata ini merupakan tantangan tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat agar wisata ini bisa menambah pendapatan desa mereka.

4) Usaha Kecil Menengah

Sektor usaha kecil menengah saat ini sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menopang kondisi perekonomiannya. Kekuatan tersebut dapat dilihat pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis dan yang bisa bertahan adalah sektor usaha kecil dan mikro ini. Potensi pengembangan usaha mikro dan menengah di Desa Muktiharjo ini bisa menjadi awal dari pembangunan desa. Hal ini

dikarenakan kebanyakan usaha kecil dan menengah ini berada di desa.

Desa yang menjadi tulang punggung perekonomian negara harus bersusah payah dalam meningkatkan ekonominya dan bersaing ketat dengan perekonomian di kota. Pengembangan usaha kecil dan menengah di Desa Muktiharjo ini menjadi bukti bahwa sektor ini mampu menghidupkan persaingan ekonomi yang dulunya tertinggal. Sektor ini pula, kebanyakan masyarakat mampu melakukannya karena sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Sehingga dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Desa Muktiharjo ini membutuhkan pula peranan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan motivasi bagi pengembangan selanjutnya.

Setelah menggali potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo seperti pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata di atas, agar potensi ini dapat digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi desa membutuhkan suatu upaya atau strategi yang tepat sesuai dengan kondisi alam dan masyarakat desa. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan desa merupakan sarana dalam mewujudkan kondisi tersebut. Menurut Beratha, (1982:105) dengan perencanaan pembangunan desa yang terarah maka:

1. Akan menjamin keseimbangan tata lingkungan desa yang stabil dan stabilitas desa. Jadi, dengan

perencanaan, penggalian, serta pemanfaatan potensi desa yang terarah maka akan benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan perorangan maupun golongan.

2. Akan dapat pula dihindari perusakan-perusakan lingkungan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Perlu ditegaskan pula bahwa potensi desa yang satu dengan potensi desa yang lainnya tentu tidak sama. Ada desa-desa yang mempunyai potensi desa yang tinggi dan ada pula desa-desa yang mempunyai potensi sedang dan berpotensi rendah. Dengan potensi desa yang berbeda-beda ini masyarakat dapat mempunyai hubungan yang erat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut Beratha (1982:34) menyebutkan bahwa “nilai desa sangat ditentukan dan sangat tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan”. Baik potensi yang sudah terwujud maupun potensi yang belum terwujud, dalam arti masih tetap tersimpan di dalam desa. Oleh karena itu, bagi desa yang memiliki potensi tinggi apabila tahap demi tahap bisa digali, diolah, dan dimanfaatkan maka akan nampak klasifikasi tingkat perkembangan desanya terus meningkat.

Sebaliknya walaupun desa memiliki potensi tinggi, tetap tersimpan dalam arti tidak atau belum diolah maka tingkat klasifikasi perkembangan desanya berjalan lamban maka tidak mengalami perkembangan. Jadi, dengan penggalian

serta pemanfaatan dari potensi desa yang ada, maka diharapkan:

1. Mata pencaharian penduduk desa secara bertahap menjadi bertambah lebih baik.
2. Tingkat produktivitas desa secara berangsur-angsur akan bertambah setiap tahunnya.
3. Kelembagaan, baik lembaga sosial, lembaga pendidikan dan organisasi lainnya yang ada di desa diharapkan terus tumbuh dan berkembang.
4. Pendidikan diharapkan pula terus berkembang dan meningkat terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan bagi pembangunan desa.
5. Bertambahnya serta meningkatnya prasarana yang ada di desa terutama yang menyangkut prasarana produksi, prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran.
6. Kesehatan masyarakat khususnya dan ketahanan masyarakat desa pada umumnya akan lebih terjamin pula adanya.

Di dalam usaha penggalan dan pemanfaatan potensi desa ini, peranan penelitian tentang potensi yang ada di desa disertai dengan tindakan lanjut berupa perencanaan kegiatan adalah kegiatan awal yang penting. Disinilah peranan pemerintah untuk memberikan bimbingan serta rangsangan

material kepada masyarakat desa umumnya untuk bersama-sama melaksanakan usaha-usaha pembangunan desanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggalian potensi desa sangatlah penting untuk melakukan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Di Desa Muktiharjo, potensi yang dapat digali adalah dari sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan pariwisata. Namun, sektor yang paling diunggulkan adalah sektor pertanian. Sebagian besar penduduk pedesaan mempunyai pencaharian di sektor pertanian. Oleh karena itu penggunaan lahan di daerah pedesaan sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Disamping itu juga dimanfaatkan untuk permukiman, peternakan, kehutanan dan sosial. Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi yang besar. Potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam dan tenaga kerja. Namun, permasalahan yang dihadapi masyarakat desa saat ini adalah bagaimana untuk mengelola serta memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Muktiharjo, dimana desa ini juga mempunyai potensi ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal di Desa Muktiharjo

1) Pemerintah Kabupaten

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah daerah atau kabupaten sangat penting dalam pengembangan desa tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah atau kabupaten juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di desa tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

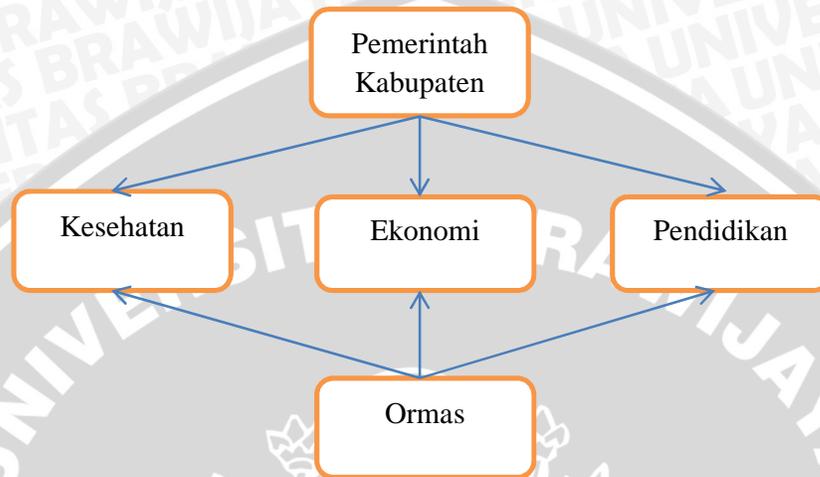
Selain itu, pemerintah daerah atau kabupaten diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pengembangan desa tertinggal. Untuk kepentingan dan tujuan tertentu, intervensi pemerintah terhadap

pengembangan desa tertinggal dapat saja dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Intervensi yang dimaksudkan di sini adalah turut campur secara aktif dan bertanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunan desa. Hal ini bertujuan agar setiap pembangunan yang direncanakan mempunyai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan.

Di Desa Muktiharjo, peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan melakukan pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik desa. Hal ini seperti dalam bidang pertanian yang berusaha untuk memfokuskan Desa Muktiharjo dengan komoditi tebu, mencoba untuk mengembangkan sektor perikanan dan UKM. Dengan adanya pengembangan wilayah yang didasarkan pada perencanaan pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati ini, maka upaya pembangunan berkelanjutan sudah diterapkan di desa ini.

Selain itu, dalam rangka melakukan pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan ekonomi mempunyai banyak dimensi pendukung seperti kondisi pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting karena dalam melakukan pembangunan, pembuatan analisa mengenai kondisi internal dan eksternal perlu diketahui. Selain itu juga terdapat

hal-hal yang berupa tantangan dan ancaman. Berikut ini merupakan gambar mengenai hubungan faktor-faktor tersebut:



Gambar 4.18 Sinergi antara Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kondisi ekonomi, maka faktor-faktor yang berhubungan erat seperti pendidikan dan kesehatan juga diperhitungkan dalam perencanaan. Masyarakat dengan penghasilan sedikit tidak akan bisa mengakses pendidikan atau menjaga kesehatannya dengan menggunakan tenaga medis. Dalam mewujudkan kesinambungan ketiga faktor tersebut, juga diperlukan gerakan yang sinergi antara pemerintah kabupaten dan organisasi masyarakat. Sehingga program tidak hanya berjalan secara horisontal simultan tapi juga secara vertikal struktur sosial dalam masyarakat. Selain itu, juga dibutuhkan

saluran komunikasi yang terbuka yang tidak terdapat manipulasi didalamnya dengan melibatkan partisipator aktif di tengah masyarakat yaitu generasi muda.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan desa tertinggal itu tidak hanya mensyaratkan tersedianya dana, sumber daya manusia, sumber daya alam atau bahkan sarana dan prasarana yang mendukung. Tetapi juga pemikiran-pemikiran jangka panjang dari pembangunan yang dihasilkan. Dalam pembangunan ekonomi desa ini, untuk kedepannya juga harus diperhitungkan mengenai kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehingga peran pemerintah kabupaten disini sangatlah penting untuk memberikan masukan terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

2) Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan aktor yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga peran kecamatan adalah untuk mempermudah tugas pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan dan sebagai fasilitator dalam setiap program pembangunan yang dilakukan daerah. Hal ini dilakukan karena kecamatan juga tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga diharapkan kecamatan juga mengetahui

dan memahami setiap kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

Di Desa Muktiharjo, pemerintah Kecamatan Margorejo telah melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pejabat desa bahwa setiap program pembangunan yang dilakukan desa akan selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan. Untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo seperti pertanian, perikanan, UKM dan pariwisata, pihak kecamatan akan melakukan monitoring ke lapangan yang nantinya akan dibuat laporan kepada pemerintah kabupaten.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecamatan tidak mempunyai otonomi, hanya melakukan tugas yang diberikan bupati. Perannya ini sangat penting untuk memberikan verifikasi terhadap kondisi lapangan kepada pemerintah kabupaten. Hal ini penting agar pemerintah kabupaten tidak melakukan kesalahan dalam menetapkan program pembangunan yang direncanakan. Karena pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pihak kecamatan adalah salah satu aktor yang dekat dengan masyarakat bawah. Komunikasi yang terjalin antara pihak kabupaten dan kecamatan ini penting guna melakukan pembangunan desa tertinggal yang berhasil guna.

3) Pemerintah Desa

Dalam upaya pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi ini, peran pemerintah desa merupakan sentral pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa beserta masyarakatnya adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan Desa Muktiharjo ini, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Pembangunan yang berasal dari bawah atau *grass root* merupakan model pembangunan yang didasarkan atas inisiatif dari masyarakat bukan dari pemerintah. Sehingga pembangunan yang dilakukan bukan bersifat *government-centered* tetapi *people-centered*. Prinsip *grassroot* ini merupakan penggalian potensi yang ada dalam masyarakat dengan menanamkan aspek kemandirian dan kesadaran bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dijadikan sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Tanpa adanya sebuah kesadaran yang berasal dari diri sendiri mengenai pembangunan ekonomi desa maka pemenuhan kebutuhan dasar atau bahkan peningkatan kondisi ekonomi cenderung akan statis.

Selain itu, untuk menciptakan pembangunan ekonomi desa juga diperlukan gerakan yang sinergi antara

pemerintah dan masyarakat. Sehingga program tidak hanya berjalan secara horisontal simultan tapi juga secara vertikal struktur sosial dalam masyarakat. Masyarakat mungkin menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan pemerintah dan begitu pula sebaliknya.

Di Desa Muktiharjo, komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat juga dilakukan dalam meningkatkan potensi ekonomi desa mereka. Hal ini seperti dalam bidang pertanian, dimana masyarakat memberikan usulan atau masukan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian seperti sistem pemilihan bibit, pengolahan lahan, penggunaan pupuk, sistem pengairan, pemanenan hasil sawah bahkan sampai distribusi hasil pertanian. Dibidang perikanan, masyarakat juga ikut memberikan inisiatif mereka dalam merencanakan pengembangan kawasan perikanan di desa mereka. Hal itu pula juga terjadi dibidang pariwisata yang mengarah pada pengembangan objek wisata gapura majapahit yang ada di desa ini. Bidang lain seperti UKM, masyarakat juga memberikan usulan untuk mengembangkan usaha mereka.

Dengan melihat kondisi lapangan yang ada di Desa Muktiharjo, dapat diketahui bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik apabila terdapat sinergitas antara para *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Sebaik apapun

program pembangunan dari pemerintah apabila tidak ada kepercayaan dari masyarakat, maka pembangunan itu akan sia-sia. Dukungan dan kepercayaan masyarakat akan pemerintahnya dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat mendukung berhasilnya suatu program pembangunan yang dijalankan.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sikap nurut terhadap kebijakan dari pemerintah mengindikasikan bahwa terdapat keterbukaan dari masyarakat desa untuk menerima perubahan yang akan menjadikan hidupnya lebih baik. Di Desa Muktiharjo, dapat diterimanya program pemberdayaan ekonomi oleh masyarakat, menggambarkan bahwa masyarakat sadar bahwa dengan pemberdayaan tersebut mereka akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah upaya pembangunan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan akan lebih mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya

dan bertanggung jawab atas output dari perencanaan tersebut. Menurut Friedmann (1992), konsep pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sehingga disini masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.

Dalam konsepsi Adisasmito (2006:45), partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah sarana pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan kepercayaan diri dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu juga sebagai wahana untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat yang akan menjadi subyek dan obyek dari implementasi rencana yang disusun. Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan juga muncul karena adanya rasa memiliki atas *outputnya*.

Di Desa muktiharjo, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa ini dapat dilihat dari adanya organisasi atau perkumpulan masyarakat seperti kelompok tani dan kelompok para pemilik kolam. Dalam kelompok-kelompok ini mereka saling memberikan ide, saran dan

pendapat untuk meningkatkan bidang masing-masing. Dengan adanya pembelajaran organisasi ini, apabila terdapat hambatan atau ide baru, mereka akan berdiskusi pula pada level yang lebih tinggi yaitu pemerintah desa. Sehingga, program pembangunan yang diambil oleh pemerintah desa tidak bertolak belakang dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, keterlibatan mereka juga dapat dilihat dalam perencanaan pembangunan desa atau biasa disebut dengan musrenbangdes. Kehadiran para *stakeholders* atau yang dalam hal ini adalah masyarakat sangatlah penting karena forum tersebut merupakan forum pengambilan keputusan formal satu-satunya yang melibatkan segenap unsur yang ada dalam masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi dan mengidentifikasi masalah yang berkembang dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pribadi dan motivasi untuk berpartisipasi dari para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya tuntutan dari luar maupun dalam wilayah desa, masyarakat Desa Muktiharjo ini pun sadar bahwa keterlibatan mereka sangat dibutuhkan. Masing-masing pribadi dengan kapasitas yang dimilikinya dapat mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa juga berfungsi sebagai forum pemberdayaan bagi individu-individu yang terlibat untuk mengembangkan kapasitas pribadinya sehingga dapat berpartisipasi dalam musyawarah pengambilan keputusan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan semacam ini perlu untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat yang saat ini sudah mulai berpikiran kritis. Partisipasi ini juga sebagai dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan pembangunan. Partisipasi yang aktif juga mencerminkan dimensi otonomi, kebebasan berkreasi dan mengekspresikan aspirasi serta kebutuhan transparansi dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan yang demokratis yang menjadi indikator pemberdayaan masyarakat. Disini masyarakat akan merasa bahwa mereka mempunyai andil dalam menentukan kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi mutlak harus menjadi tolok ukur pemerintah dalam menilai keberhasilan suatu program pembangunan.

c. Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keseriusan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan desa dilakukan dengan dikeluarkannya UU No.

6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil, desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan.

Di dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Berdasarkan kebijakan mengenai pembangunan desa di atas, maka pembangunan desa diarahkan dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat. Sehingga, secara konstitusional, pemberdayaan masyarakat desa sudah mempunyai dasar hukum. Pemberdayaan masyarakat adalah

model penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersumber dari bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah. Di Desa Muktiharjo, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan, kegiatan simpan pinjam dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemandirian mereka.

Dari sektor pertanian, dampak dari pemberdayaan ini adalah adanya peningkatan kapasitas dalam usaha tani, yaitu dengan penggunaan teknologi baru bagi masyarakat setempat, dalam bentuk pengolahan tanah, penggunaan bibit baru, dan pemeliharaan tanaman. Dalam konteks ini pemberdayaan bermakna “*to enable*”, yaitu membangun kemampuan baru, dari sebelumnya tidak mengetahui menjadi memahami dan mempraktekkan. Para petani di Desa Muktiharjo memiliki pengetahuan bertani yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tatkala mereka masih menggunakan cara-cara tradisional dalam berusaha tani.

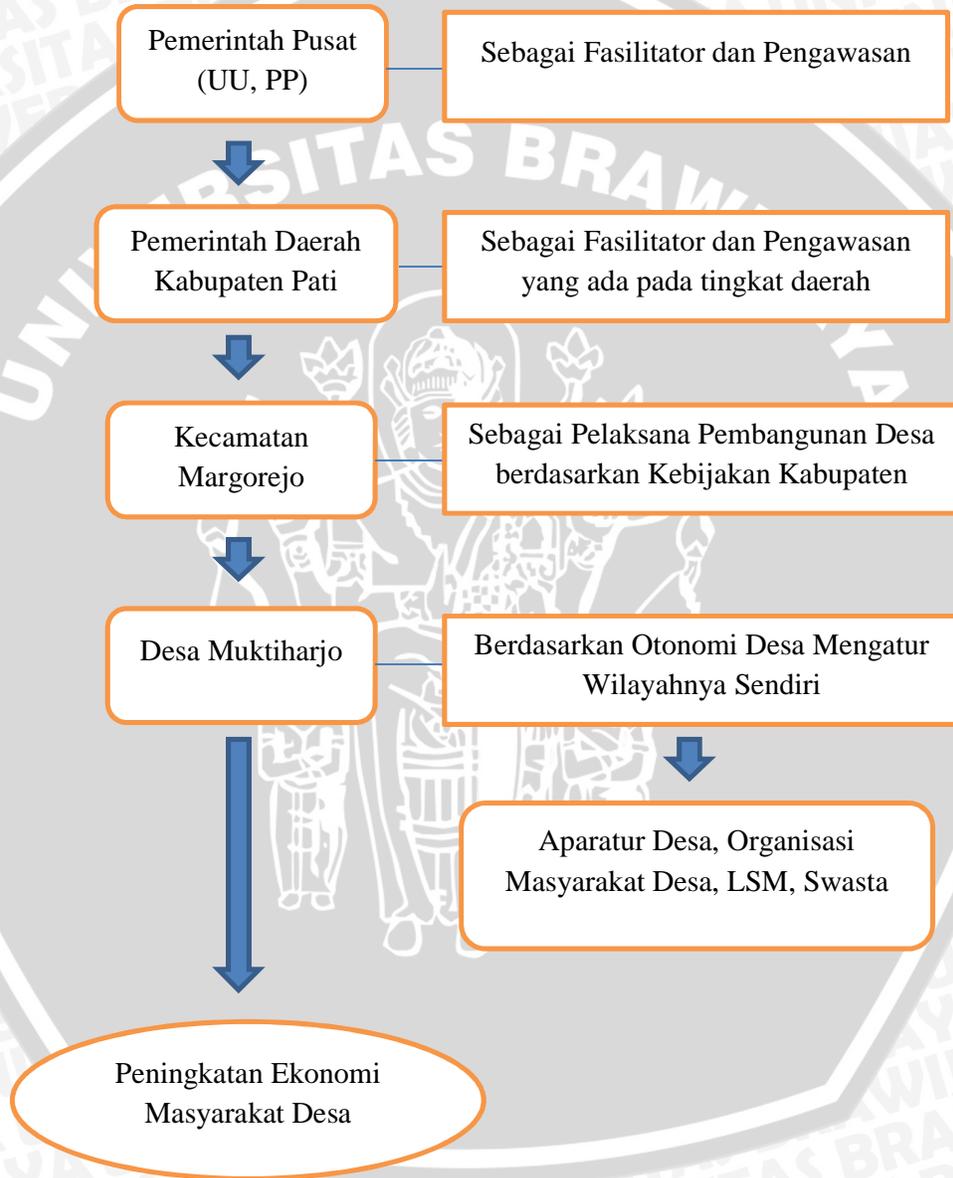
Semua ini karena peran dari adanya program pemberdayaan ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Dalam program dan kegiatan

pemberdayaan ekonomi terdapat berbagai bentuk pelatihan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat tani dengan memberikan pelatihan pembukaan sawah, pengolahan tanah dan pemupukan, cara bercocok tanam padi sawah, dan cara panen dengan menggunakan sabit. Manfaat ekonomis dari usaha ini dapat mereka rasakan secara langsung, walaupun belum dapat dipasarkan produksinya dalam skala yang lebih besar. Artinya, di samping memperoleh pengetahuan, masyarakat peserta pelatihan juga mendapat manfaatnya dari kegiatan tersebut. Hal ini membuat masyarakat memiliki keahlian untuk membuat usaha sendiri.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo ini jelas bahwa program berdampak pada perubahan sikap dan perilaku berusaha tani pada masyarakat tani pedesaan sebagai dampak dari pemberdayaan yang sangat ditentukan oleh faktor motivasional dari dalam diri individu petani untuk berpartisipasi dan dorongan dari luar. Dampak dari pemberdayaan ekonomi juga mempengaruhi sektor perikanan UKM dan pariwisata dalam meningkatkan ekonomi desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggalan potensi ekonomi desa sangat penting dalam penentuan perencanaan pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah. Hal ini dikarenakan potensi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan tentang pembangunan. Selain itu, peran setiap level pemerintahan juga diperlukan dalam upaya pembangunan desa tertinggal ini. Peran pemerintah dalam upaya pembangunan dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 4.19 Aktor dalam Upaya Pembangunan Desa
 Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan diagram di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dapat berhasil dengan baik jika ada dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa setempat untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai aktor sentral dan melakukan pengawasan serta pengaturan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah kabupaten diberi wewenang untuk mengelola wilayahnya dengan ketentuan tidak melanggar dari kebijakan pusat. Pihak kecamatan disini hanya sebagai pelaksana karena kedudukannya hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sedangkan pemerintah desa sebagai aktor yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan pembangunan desa. Dengan adanya otonomi desa, desa mempunyai kewenangan membuat program pembangunan yang tidak bertentangan dengan pusat dan daerah. Selain itu, pembangunan desa juga didukung oleh pihak-pihak seperti organisasi kemasyarakatan, LSM atau swasta. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah bisa dijadikan mitra pembangunan di desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Adisasmita (2006: 45) bahwa upaya memberdayakan masyarakat haruslah dimulai dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensinya dapat berkembang. Dengan adanya kerjasama dari level pemerintahan atas samapai terendah akan mampu menciptakan kerjasama dan koordinasi

lintas sektor. Dalam konteks ini, Freire (dalam Suryana, 2006) mengemukakan bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumberdaya alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara untuk menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, melepaskan masyarakat dari kebiasaan lama yang kurang menguntungkan atau menghambat percepatan perbaikan kondisi ekonomi mereka harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan tersebut.

Pola *bottom-up planning* mungkin menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan desa. Pemerintah menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator aktif (tentunya tidak berpangku tangan hanya menunggu dari masyarakat). Pemerintah memotivasi masyarakat untuk membangun daerahnya seraya pemerintah menyiapkan bantuan prasarana, sarana dan dana yang dibutuhkan. Pemerintah juga dapat melemparkan ide-ide pembangunan desa kepada masyarakat. Namun dalam tahap berikutnya masyarakat dilibatkan dalam menentukan keputusan mengenai apa yang akan dibangun, membuat dan menyusun rencana pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan.

4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muktiharjo Menuju Desa Tidak Tertinggal

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Alam yang melimpah

Sumber daya alam merupakan modal utama dalam melakukan pembangunan. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Desa merupakan wilayah yang identik dengan sumber daya alam yang melimpah. Desa dengan berbagai potensi alamnya dapat dijadikan faktor pendukung dalam pembangunan nasional. Ketersediaan lahan dan kesuburan tanah di desa menjadi faktor produksi utama dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Di Desa Muktiharjo, sumber daya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan penduduk untuk meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dapat dilihat bahwa penyokong utama sektor ekonomi di desa ini adalah bidang pertanian khususnya tebu. Selain itu, banyaknya aliran sungai dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan sektor perikanan. Melihat kondisi seperti ini, pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dapat memajukan ekonomi suatu wilayah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang terdiri dari air, tanah, udara dan iklim dapat dijadikan potensi dalam pembangunan desa tertinggal. Hal ini dikarenakan, ketertinggalan desa tidak berarti desa tersebut tidak mempunyai potensi sama sekali, tetapi karena kurang maksimalnya pengelolaan potensi tersebut.

2) **Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Banyak**

Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak dalam pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan desa tertinggal, sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat desa menjadi tolak ukur sukses tidaknya pembangunan yang dilakukan. Untuk lebih menggerakkan dan memacu pembangunan desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka yang pertama dan utama perlu dibangun adalah manusia sebagai pelaku dan calon pelaku pembangunan itu sendiri.

Kritik bagi model pembangunan selama ini adalah bahwa pembangunan lebih diarahkan untuk mengedepankan pembangunan fisik daripada pembangunan manusianya. Suryana (2006:56) mengemukakan bahwa pada pembangunan ekonomi ada kecenderungan mengagap esensi pertumbuhan ekonomi ialah besarnya penanaman modal untuk keperluan produksi. Ini dianggap faktor paling menentukan untuk mencapai suatu tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan manusia (masyarakat desa) sebagai subjek pembangunan, maka dituntut berbagai hal terhadap kapasitas dan kualitas manusia itu sendiri. Salah satu tuntutan peran sebagai subjek (pelaku) pembangunan yang semestinya dapat dan mampu dipenuhi oleh masyarakat di desa adalah kemampuan menciptakan atau daya cipta. Suryana (2006:34) mengemukakan bahwa pengembangan (pemekaran) daya cipta suatu bangsa bukan saja suatu kemampuan serta kejadian individual, melainkan juga suatu proses sosial yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial pula. Maksudnya adalah adanya lembaga dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai perkembangan daya cipta dalam pembangunan masyarakat.

Desa yang mempunyai jumlah penduduk yang besar maka mempunyai potensi tenaga kerja yang tersedia. Masalah pokok di desa sebenarnya ada pada masalah pemanfaatan potensi tenaga kerja yang produktif di desa. Karena pada desa-desa yang masih bermata pencaharian sebagai petani maka kelebihan tenaga kerja yang usia produktif belum bisa dimanfaatkan, sehingga banyak pengangguran tersembunyi. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Muktiharjo. Sebelum adanya program pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat Desa Muktiharjo banyak yang menjadi pengangguran diusia produktif. Faktor ini didukung pula dengan tidak dimilikinya ketrampilan dan keahlian. Namun,

setelah adanya program pemberdayaan, masyarakat semakin berdaya dengan ketrampilan dan pengetahuan baru yang mereka miliki demi kemajuan pertanian, perikanan, UKM dan pariwisata.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses memandirikan masyarakat agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, banyaknya jumlah penduduk dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan ekonomi desa. Sehingga apabila dengan jumlah penduduk yang banyak namun tidak bisa menghasilkan atau berkontribusi terhadap produktivitas dari pembangunan, maka akan terjadi beban yang besar yang harus ditanggung pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu menata ulang format pembangunan desa. Pembangunan yang dilakukan harus dilakukan secara arif dan bijaksana melihat desa per desa dari berbagai aspek. Bagi desa yang sudah memiliki manusia (penduduk) yang berkualitas, maka perlu didorong dan distimulir untuk memacu percepatan pembangunan desa dalam semua aspek. Sebaliknya, jika suatu desa yang belum memiliki kualitas dan kuantitas manusia yang mumpuni, maka perlu

didorong untuk lebih mengedepankan pembangunan manusianya, seperti pendidikan, pembimbingan dan pelatihan.

3) **Globalisasi**

Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu, globalisasi juga bisa diartikan hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Dalam konteks pembangunan desa, globalisasi sangat erat dengan terjadinya perubahan sosial, yang akhirnya mengubah sistem nilai, norma, pola berperilaku dan struktur sosial yang ada di desa karena masuknya nilai-nilai atau budaya-budaya dari luar, yang mana nilai-nilai atau kebudayaan-kebudayaan asing itu bisa masuk kedesa karena adanya globalisasi tersebut. Jika perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran.

Di Desa Muktiharjo, arus globalisasi menimbulkan banyak dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak

positif yang membuat keadaan masyarakat desa mulai berubah. Dengan adanya globalisasi, desa sudah tidak terisolasi seperti pada saat kondisi tertinggal, mata pencaharian masyarakat sudah cenderung terfokus pada sifat yang homogen yaitu pemanfaatan yang maksimal pada sumber daya alam dan tenaga kerja, subsistem dan sistem perekonomian yang ada di jaman dahulu sudah mulai berubah. Pembangunan transportasi seperti jalan dan saluran irigasi sawah, kemajuan teknologi dan komunikasi, kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan menyebabkan desa tidak lagi terisolasi dari dunia luar. Budaya-budaya dari luar (budaya kota) mulai masuk di kebudayaan desa. Baik tingkah laku, gaya berbusana, gaya berinteraksi dan sikap terhadap etos kerja pun mulai cenderung kearah yang lebih modern dibanding sebelumnya.

Faktor globalisasi yang mendukung adanya pembangunan desa dapat dilihat juga dari pengelolaan sumber daya yang didasarkan dari kebiasaan, bergeser kearah efisiensi teknis maupun ekonomis. Sistem perekonomian subsistem dengan insentif bersifat moral dan sosial bergeser menjadi sistem ekonomi yang mengejar pemuasan kebutuhan berlimpah dengan mekanisme pasar yang berdasar insentif ekonomi. Masyarakat yang bertumpu pada komunikasi lisan berkembang menjadi tradisi tulisan sebagai media

pengetahuan. Pola perekonomian masyarakat yang bersifat konsumtif bergeser kearah pola perekonomian produktif.

Perkembangan dari arus globalisasi semakin lama semakin cepat, sehingga sangat memperngaruhi percepatan luas jangkauan dari globalisasi itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga globalisasi ini sangat mempengaruhi perkembangan kemajuan dibidang mata pencahariaan masyarakat desa yaitu sebagai petani. Para petani mulai memakai sarana dan prasarana yang lebih modern dari sebelumnya. Bahkan untuk memilih bibit beras pun sudah memiliki metode yang tepat dalam memilihnya, sehingga terciptanya bibit unggul. Oleh karena itu hasil panen semakin baik dari yang sebelumnya akibat dari globalisasi.

Globalisasi juga membawa arus modernisasi di desa. Hal ini sangat penting sekali untuk kebutuhan hidup para masyarakat desa yang kebanyakan pekerjaan bertani dikerjakan secara manual dan terkadang hasil yang didapat tidak begitu bagus. Dengan model modernisasi ini, akan membantu meningkatkan mutu dan daya produksi dalam bertani sehingga hasil panen yang didapat itu membuat orang untuk lebih tertarik membelinya dan harga yang dipatok dengan modal yang dikeluarkan cukup baik untuk pendapatannya dibanding yang sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi akan memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan yang baru dalam hal perencanaan struktur dan infrastruktur perangkat desa, sehingga dapat memajukan desa lebih modern dan lebih efisien dalam penataannya. Tetapi dalam masuknya globalisasi ini ke masyarakat desa, tidak semua masyarakat desa mau menerima nilai-nilai baru dari akibat arus globalisasi ini. Tetapi juga ada masyarakat desa lain yang menerima nilai-nilai yang dibawa oleh arus globalisasi tersebut. Arus globalisasi juga akan mengakibatkan desa menjadi lebih modern, yang mana itu sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat desa dalam menunjang kehidupannya.

4) **Kemajuan Teknologi**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang kian pesat seperti di era sekarang ini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan manusia pada umumnya dan lebih khusus pada masyarakat yang tinggal di desa. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan munculnya sebagian besar alat-alat modern, mulai dari alat-alat dengan kualitas standar sampai kepada alat yang memiliki kualitas super canggih. Perkembangan ini kemudian membawa pengaruh besar pula terhadap keadaan masyarakat desa dari segi ekonomi.

Begitu besarnya pengaruh teknologi ini, sehingga sampai ke masyarakat desa. Masyarakat desa yang umumnya dikenal dengan masyarakat yang terpinggirkan, kampungan dan SDM rendah, kini pun ikut menerima dan mewarnai perkembangan teknologi seperti yang dirasakan masyarakat perkotaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya sebagian besar masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup harmonis, rukun, tentram dan memiliki tata krama yang lebih baik dari masyarakat perkotaan meskipun ada beberapa permasalahan yang terjadi. Mereka hidup saling membantu satu sama lain. Dan budaya yang tidak pernah luntur dari masyarakat desa adalah budaya saling gotong royong antar sesama jika ada yang kesusahan. Itulah hal yang jarang dilihat pada masyarakat perkotaan.

Di Desa Muktiharjo, penerapan teknologi informasi dan komunikasi membantu pengelolaan kegiatan informasi pemerintahan desa yang memberi peluang baru untuk melayani masyarakat dengan cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Selain masyarakat diuntungkan dengan layanan cepat dan terbuka, pemerintah pusat juga diuntungkan dengan naiknya pendapatan asli daerah karena begitu cepatnya akses pusat tentang potensi-potensi daerah yang bisa di kembangkan.

Pada umumnya teknologi yang banyak diserap dan digunakan oleh masyarakat desa adalah Teknologi Tepat Guna

(TTG). Ciri khas yang paling mendasar dari TTG adalah dapat dibuat dengan biaya yang relatif murah, cara membuatnya sangat mudah dan menggunakan sumber-sumber daya setempat. Jenis TTG yang banyak digunakan cenderung merupakan alat atau mesin yang menunjang sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan pangan, pengelolaan air dan sanitasi. Secara teknis, TTG merupakan jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggapan bahwa modernisasi hanya berlaku di daerah kota saat ini tidak benar. Hal ini dikarenakan pembangunan desa akibat adanya kemajuan teknologi dapat dilihat di Desa Muktiharjo seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi menyebabkan desa semakin maju. Pembangunan jalan dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak di perdesaan telah meningkatkan interaksi desa kota. Perkembangan jaringan telepon serta jangkauan siaran radio dan televisi di desa telah meningkatkan komunikasi antara penduduk desa dan penduduk kota. Penggunaan kompor gas dan mesin cuci banyak membantu para ibu di desa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian, terjadi perubahan kehidupan penduduk desa akibat pengaruh modernisasi. Hadirnya teknologi di desa, secara tidak langsung meningkatkan

kemampuan produksi, memberikan nilai tambah pada komoditas lokal unggulan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu saja, teknologi menciptakan kelompok-kelompok usaha mandiri yang berkemampuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Teknologi membuat desa semakin maju.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Modal

Modal merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketersediaan modal dapat mempengaruhi semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Desa yang identik dengan ketersediaan alam dan tenaga kerja yang melimpah, sebagian besar masih mempunyai daya pengelolaan sumber daya yang kurang maksimal. Sehingga kebanyakan dari desa tidak bisa berkembang adalah karena keterbatasan modal dan akses untuk mendapatkan modal. Hal ini kembali lagi pada konsep pemaksimalan pengelolaan potensi desa yang ada.

Selain itu, besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat desa masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat

desa terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan masyarakat desa sering terjatuh pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan mereka.

Di Desa Muktiharjo, keterbatasan modal ini juga sudah disampaikan oleh perangkat desa setempat. Hal ini karena belum adanya pelatihan dan pendidikan bagaimana untuk mengelola keuangan masyarakat sehingga terjadi perputaran dari sistem permodalan itu sendiri. Selain itu, pengelolaan yang kurang maksimal terhadap potensi desa juga masih menjadi kendala masyarakat Desa Muktiharjo untuk meningkatkan perekonomian mereka. Anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah desa harus melakukan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan keterbatasan dana. Hal ini dapat dilihat dari sektor perikanan. Sebagian besar kendala dari pemilik kolam ikan adalah pengadaan bibit ternak yang membutuhkan ongkos yang besar. Dari sektor pertanian, sistem irigasi dan pemilihan bibit unggul juga membutuhkan biaya besar. Ditambah lagi apabila terjadi musim penghujan

atau kemarau yang ekstrim, akan membutuhkan teknologi tepat guna yang juga membutuhkan modal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan:

1. Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur.
2. Didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kegiatan Ekonomi

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000) dalam Suryana (2006:34). Infrastruktur meliputi jalan, drainase dan jaringan air bersih.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk

mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antardaerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih.

Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antarwilayah kabupaten/kota, serta antara pedesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat di daerah pedesaan karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

Di Desa Muktiharjo, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi sangat berguna bagi akses masyarakat berinteraksi dengan dunia luar dalam meningkatkan ekonomi mereka. Peningkatan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, UKM dan pariwisata tidak akan berguna apabila tidak didukung dengan pembangunan sarana dan prasarananya. Rencana akan adanya pasar desa juga dimungkinkan akan membantu masyarakat dalam melakukan

transaksi ekonomi yang memudahkan mereka menjual komoditi mereka dan membeli kebutuhan sehari-hari. Sehingga keterbatasan infrastruktur juga dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi meskipun dari sisi sumber daya alam dan tenaga kerja mempunyai keunggulan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana merupakan jembatan masyarakat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di sekitar mereka.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menghasilkan pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sektor utama desa yaitu pertanian yang menghasilkan komoditas unggulan daerah. Pengelolaan potensi ekonomi masyarakat yang dibarengi dengan ketersediaan sarana yang memadai juga ditunjukkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, menaikkan kegiatan perdagangan lokal dan antar daerah, terbentuknya jaringan pemasaran yang baik, serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Sedangkan dalam hal optimalisasi pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk memberikan

nilai tambah bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan.

3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak dipisahkan dari pembangunan desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan dari program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan akan memberikan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga keaktifan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kualitas kehidupan mereka.

Di Desa Muktiharjo, masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun masyarakat terlibat dalam kelompok-kelompok tani, pemilik kolam ikan atau pemilik UKM, namun keterlibatan dalam upaya pembangunan desa masih kurang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pejabat desa setempat yang mengatakan akan meningkatkan partisipasi masyarakat di desa ini. Partisipasi masyarakat ini tidak harus dilakukan dengan hadir dalam acara rapat pembangunan desa. Tetapi dapat dilakukan dengan memberikan usulan atau umpan balik dari setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memberikan optimalisasi dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan aktifnya masyarakat, maka model pembangunan tidak selalu berasal dari atas tetapi juga bisa memperhatikan aspirasi masyarakat bawah. Model pembangunan yang demikian akan menghasilkan suatu sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembangunan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Di Desa Muktiharjo, faktor pendukung pembangunan desa tertinggal dapat dilihat seperti sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan sumber daya manusia yang banyak serta globalisasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan dari faktor penghambat dapat dilihat dari keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi serta masih kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sehingga dalam melakukan pembangunan desa, pengidentifikasian faktor pendukung dan penghambat ini penting untuk melakukan program pembangunan yang direncanakan. Karena pembangunan selalu dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, dapat diambil beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal dapat digambarkan seperti di bawah ini:

a. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Muktiharjo.

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Desa Muktiharjo untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Bidang pertanian/perkebunan, dalam bidang ini komoditi utama Desa Muktiharjo adalah tebu dan kapuk. Selain itu, juga terdapat tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.
- 2) Perikanan, dalam bidang ini masyarakat memanfaatkan letak desa yang dialiri oleh sungai. Sehingga potensi perikanan yang dapat dibudidayakan disini seperti lele, mujair dan gurami.
- 3) Pariwisata, bidang ini merupakan potensi budaya yang merupakan peninggalan dari kerajaan dahulu. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kas desa selain menambah pengetahuan mengenai sejarah.
- 4) UKM, dalam bidang ini berkembang setelah adanya program pemberdayaan dari pemerintah. Sehingga masyarakat mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk melakukan usaha

yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini karena sebelumnya banyak pengangguran di usia produktif karena tidak mempunyai keahlian. Jenis usaha yang saat ini berkembang seperti usaha pengolahan makanan kripik singkong, usaha jahit pakaian dan usaha bengkel.

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal di Desa Muktiharjo meliputi:

1) Pemerintah Kabupaten

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, upaya pemerintah kabupaten adalah sebagai pihak perencana pembangunan yang berkelanjutan dengan menyesuaikan potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo yaitu pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pati juga menjadi fasilitator dari upaya pembangunan desa seperti penyedia dana serta pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi terakhir dari pemerintah Kabupaten Pati dalam pemberdayaan ekonomi ini adalah pengawasan dan evaluasi dari setiap program pemberdayaan yang dijalankan, agar setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan misi serta memberikan *input* bagi program pembangunan selanjutnya. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten mempunyai otonomi tersendiri dalam mengelola wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.

2) Pemerintah Kecamatan

Kecamatan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini mempunyai peran sebagai fasilitator atau kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Di Desa Muktiharjo, pihak kecamatan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pihak kabupaten. Aspirasi tersebut dapat berupa pemberian dana atau pembangunan sarana dan prasarana umum. Hal ini dikarenakan kecamatan tidak mempunyai otonomi sendiri dan hanya melakukan tugas dari bupati. Selain itu, kecamatan adalah level pemerintahan yang berada dekat dengan rakyat.

3) Pemerintah Desa

Pemerintah desa dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini adalah sebagai aktor kunci karena merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga mempunyai otonomi untuk mengelola desanya sendiri sesuai kebutuhan. Di Desa Muktiharjo upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal adalah

- a. Menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam pemberdayaan ekonomi ini, pemerintah desa berusaha untuk menimbulkan public trust supaya masyarakat sadar dan mau untuk ikut dalam pembentukan, pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya kepercayaan

yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya maka diharapkan kemandirian dan kemauan masyarakat untuk meningkatkan kualitas ekonominya juga meningkat. Di Desa Muktiharjo, hal ini terjadi pada pembentukan kelompok usaha pertanian, perikanan dan UKM untuk mengembangkan sektor ekonomi yang ada.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa sangatlah penting, hal ini dikarenakan program pembangunan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo ini, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam organisasi usaha mereka untuk menambah pengetahuan mengenai usaha pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Selain itu, mereka juga aktif mengikuti musrenbangdes dalam upaya menyusun program pembangunan desa khususnya sektor ekonomi.
- c. Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti melakukan pelatihan dan pendidikan, mengadakan koperasi simpan pinjam dan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi dan sarana pendukung peningkatan ekonomi lainnya. Hal ini dapat menunjang dalam upaya pengembangan usaha mereka baik dibidang pertanian, perikanan, pariwisata serta UKM.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat Muktiharjo menuju desa tidak tertinggal yang dapat dibagi menjadi:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi pembangunan desa di Desa Muktiharjo meliputi:

1) Sumber daya alam yang melimpah

Dalam hal sumber daya alam, Desa Muktiharjo mempunyai potensi lahan pertanian yang luas. Sehingga dapat dimanfaatkan penduduk untuk meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian seperti tebu, kacang tanah dan kapuk. Selain itu, wilayah desa yang dialiri sungai dapat dijadikan usaha pengembangan perikanan seperti lele, mujair dan gurami.

2) Ketersediaan sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang banyak menjadi potensi yang ada di Desa Muktiharjo. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang banyak dapat dimanfaatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal. Hal ini juga dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, banyaknya jumlah penduduk ini dapat menciptakan masalah baru seperti pengangguran serta kurangnya dana untuk pembiayaan pembangunan.

3) Globalisasi

Globalisasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur sehingga interaksi ekonomi bisa terjadi lintas wilayah. Di Desa Muktiharjo, globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif dalam pembangunan desa seperti terjadinya modernisasi desa. Dampak positif yang terjadi dapat dilihat dari sektor pertanian dan perikanan. Penggunaan alat pertanian yang modern seperti traktor serta penggunaan bahan kimia untuk mempercepat produktivitas. Dibidang perikanan dapat dilihat dari pengembangbiakan bibit ikan. Proses ini berdampak positif bagi sektor ekonomi desa. Namun, juga terdapat dampak negatif yaitu banyaknya produk impor yang masuk desa sehingga sektor UKM yang masih dalam proses pengembangan kalah bersaing dengan produk luar negeri atau kota.

4) Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi dalam hal pembangunan desa tertinggal dapat dilihat dari pemilihan teknologi tepat guna yang digunakan di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat melalui mudahnya masyarakat mengakses informasi mengenai sistem pengolahan sawah yang modern atau bagaimana memasarkan hasil produksi pertanian. Pengaruh ini juga terjadi pada sektor lain seperti perikanan, pariwisata dan UKM. Selain itu juga pembangunan sarana komunikasi dan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

b. Faktor penghambat

1) Keterbatasan modal

Keterbatasan modal yang terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar Desa Muktiharjo. Selain itu, dengan terbatasnya anggaran desa sehingga perlu melakukan prioritas pembangunan yang dilakukan. Terbatasnya anggaran di Desa Muktiharjo dikarenakan jumlah penduduk yang banyak yang tidak diimbangi dengan penambahan modal. Hal ini dikarenakan pemerintah desa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah dan desa seadanya.

2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Muktiharjo ini adalah infrastruktur untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan sarana untuk mempermudah akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Penambahan pembangunan jalan, saluran irigrasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan masih dalam proses pengembangan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan sektor ekonomi, juga telah dicanangkan upaya pembangunan pasar desa yang bisa menampung hasil produksi masyarakat seperti pertanian, perikanan dan UKM.

3) Rendahnya partisipasi masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi desa di Desa Muktiharjo dikarenakan kurang adanya kemauan dan motivasi setiap individu untuk ikut langsung terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa terus berusaha untuk dapat menggali kemauan masyarakat dalam upaya perumusan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ekonomi desa.

5.2 Saran

1. Untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal, pemerintah desa sebagai pihak yang dekat dengan rakyat seharusnya bisa lebih jeli dalam melihat setiap potensi ekonomi yang ada di desanya. Sehingga potensi ini yang nantinya akan digunakan dalam upaya pemberdayaan desa. Selain itu peran penting semua aktor pembangunan mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa harus menjalin komunikasi dua arah sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi tanggungjawab bersama bukan satu aktor saja.
2. Pemerintah desa dengan dibantu oleh kecamatan dan pihak kabupaten harus bisa menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan secara berkala melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi desa. Sehingga antisipasi dan pemanfaatan

potensi yang ada secara maksimal dapat digunakan dalam pembangunan desa tertinggal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang. FIA UNIBRAW
- Adisasmito, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta. Graham Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Beratha, I Nyoman. 1984. *Teknologi Desa*. Jakarta. Ghalia
- Chambers, Robert. Poverty and Livelihoods. 1995. *Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York. New York University Press
- Daldjoeni, N. 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Jakarta. Alumni 1987
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2009-2013 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2012 Desa Muktiharjo
- Friedmann, Jhon. 1992. *Empowerment the Politics of Alternative Development*. Blackwell Publisher: Cambridge, Massachusetts, 02142 USA
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta. Yayasan Dian Desa
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Jakarta. Erlangga
- Ismawan, Bambang. 2005. *Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar. Seminar Ekonomi Rakyat*. Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (penyunting). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi (hasil bahasan seminar pendalaman ekonomi rakyat)*, Sains (yayasan sajogyo inti utama). Bogor
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. Pustaka Cidesindo
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. ITB
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa: Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen*. Jakarta. Media Widya Mandala

- Mawardi. 2011. *Model Pembangunan Desa Terpadu*, (Online), (<http://tegal-linggah.-wordpress.-com/-desa/model-pembangunan-desaterpadu/>), diakses pada 7 Maret 2012)
- Miles, MB dan Hubberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press
- Monografi Desa Muktiharjo 2013
- Mubyarto dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta. Adytia Media
- Mubyarto, dkk. 2005. *Ekonomi Rakyat Indonesia*. Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (penyunting). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi* (Hasil Bahasan Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat). Bogor. Sains: Yayasan Sajogyo Inti Utama
- Pambudi, Hirnawan S. 2003. *Politik Pemberdayaan*. Yogyakarta. Laperia Pustaka Utama
- Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Politik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta. CSIS
- Priyops. 2009. *Profil Kabupaten Pati*, (Online), (<http://andikasw.-wordpress.-com/profil-kabupaten-pati/>), diakses pada 7 Maret 2012)
- Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta. BPFE
- Siagian, Sondang P 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan*. Bandung. Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media Jogja
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Supriatna. 2000. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Universitas Setyagama

Suryana. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta. Salemba Empat

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang. Universitas Negeri Malang (UM Press)

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wasistiono, Sadu dan Tahir M. Irawan. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung. CV. Fokusmedia





LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Nama :

Alamat :

No. Telp :

Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah kondisi desa tertinggal di desa muktiharjo dulu dari segi:
 - a. Kondisi ekonomi
 - b. Kondisi pendidikan
 - c. Kondisi kesehatan
 - d. Kondisi sosial budaya
2. Bagaimanakah pembangunan yang terjadi di desa Muktiharjo dari segi:
 - a. Kondisi ekonomi
 - b. Kondisi pendidikan
 - c. Kondisi kesehatan
 - d. Kondisi sosial budaya
3. Apakah potensi yang paling menonjol di Desa Muktiharjo ini?
4. Bagaimanakah cara yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki ini?
5. Apakah ada perbedaan kondisi di Desa Muktiharjo sebelum dan sesudah pembangunan? kalau ada apasajakah perbedaan itu!
6. Apasajakah faktor pendorong dari pelaksanaan pembangunan desa Muktiharjo ini?
7. Apasajakah faktor penghambat dari pelaksanaan pembangunan Desa Muktiharjo ini?
8. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Muktiharjo ini?
9. Apakah ada program-program khusus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa ini?
10. Apakah ada aktor lain yang terlibat selain aparat desa dan masyarakat?

Lampiran 2

Lembar Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOREJO
KANTOR KEPALA DESA MUKTIHARJO
Jl. Raya Pati-Gembong Km.4 Telp.(0295)392368 Pati**

No. kode Desa
33.18.012.018

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/184.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : M.TAUFIK KUSUMA ADI WIJAYA
Tempat / tanggal lahir : Pati , 18 Agustus 1977
Pekerjaan : Kepala Desa Muktiharjo
Alamat : Dusun Rendole Desa Muktiharjo
RT 001 RW 001 Margorejo Pati

Menerangkan bahwa :

N a m a : ULLY HIKMAH ANDINI
Tempat / tanggal lahir : Pati , 19 Agustus 1990
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Rendole Desa Muktiharjo
RT.004 RW.001 Margorejo Pati

**Benar-benar sudah melakukan Penelitian di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorej
Kabupaten Pati Jawa Tengah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat guna memenuhi persyaratan membuat Skripsi.

Muktiharjo, 06 Oktober 2014
Kepala Desa Muktiharjo
KEPALA DESA
MUKTIHARJO

M.TAUFIK KUSUMA ADI WIJAYA